



Solihah Titin Sumanti, dkk.

Editor:

Prof. Dr. Abdul Mukti, MA

Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia

Kata Sambutan Oleh:

Prof. Dr. Hasan Asari, M.A

KATA PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, wa syukru lillah, wa laa haulaa wa laa quwwata illa billah.

Setelah melalui proses yang cukup panjang dan (hampir) melelahkan, akhirnya buku ini terbit juga. Penulis menyadari bahwa kendati buku ini sudah melalui review dari rekan-rekan sejawat, tetapi tentu saja masih belum mencapai puncak kepuasan dan kesempurnaan kualitatif, dengan arti masih ada kekurangan di sana-sini. Karenanya penulis masih terus berharap ada upaya dan tangan lainnya yang menjadikan buku ini dapat bermanfaat untuk semua.

Buku ini adalah *book chapter* yang terdiri dari rekan-rekan mahasiswa S.2 program studi Pendidikan Islam yang dalam perkuliahannya memberikan kontribusi perbaikan makalah yang secara berkelanjutan dan mengalami revisi-revisi dari dosen pembimbingnya seperti Prof. Dr. Abdul Mukti, M.A dan Dr. Yusnaili Budianti, M.A. Hasil revisi ini terus mengalami perbaikan sehingga uji materi dari makalah-makalah tersebut layak untuk ditampilkan dalam satu buku. Setelah proses panjang dalam membaca hasil karya mahasiswa dan mencoba mengkombain hasil karya ini saya juga terlibat untuk melakukan tulisan dalam buku ini yang bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang menyelaraskan ide pemikiran dalam struktur susunan buku ini. Dengan bantuan saudara Taslim, saya mencoba mensinkronkan struktur tulisan ini dengan memberikan desain cover pada buku ini sehingga memiliki gaya tulisan buku berbentuk *book chapter* yang mudah dibaca oleh pembaca hari ini.

Terima kasih saya sebagai perwakilan dari penulis *book chapter* ini kepada Prof. Dr. Hasan Asari, M.A, Guru Besar Sejarah Pendidikan Islam di UIN Sumatera Utara yang meluangkan waktu membacanya terlebih dahulu hingga kemudian memberikan kata sambutannya dalam buku ini. Kemudian Prof. Dr. Abdul Mukti, M.A sebagai dosen pengampu Mata Kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Program Pascasarjana yang juga mengoreksi tulisan-tulisan para mahasiswa ini sehingga tulisan ini memiliki bobot sebagai layaknya karya ilmiah, dan pada akhirnya menjadi editor dalam karya ilmiah ini. Kepada Ibu Dr. Yusnaili Budianti, M.A yang juga dosen pengampu Mata kuliah ini menyumbangkan pemikirannya dalam tulisan ini dan selalu memberi semangat kepada saya pribadi untuk melakukan penghimpunan tulisan ini sehingga menjadi sebuah karya buku yang monumental dalam peninggalan sebuah karya ilmiah di bidang Sejarah Pendidikan Islam.

Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian buku ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kiranya sumbangan dari seluruh pihak menjadi amal jariyah dalam proses penyempurnaan buku ini. Kepada mereka semua, hampir tidak ada sesuatu kata yang pas untuk penulis sampaikan selain berharap kepada Allah SWT, semoga jasa dan segala jenis bantuan yang penulis terima dari mereka di balas-Nya dengan kebajikan yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Medan, November 2021
Koordinator Penulis

Dr. Solihah Titin
Sumanti, M.Ag, dkk.

KATA PENGANTAR EDITOR

Gagasan penulisan buku ini menjadi sesuatu yang berharga untuk penulisan Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia yang dapat memberi khazanah bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Penulisan buku ini dituliskan secara kronologis memberikan nuansa historis dalam penyusunannya. Buku berjenis bunga rampai ini memberikan kontribusi dari masing-masing pemikir produktif oleh mahasiswa S2 Pendidikan Agama Islam yang pengelolaan kelasnya dikoordinir oleh Dosen Dr. Yusnaili Budianti, M.A dan Dr. Solihah Titin Sumanti, M.Ag.

Ide tulisan di bawah pembinaan seorang senioritas yaitu saya Prof. Dr. Abdul Mukti, M.A yang juga sebagai editor dalam tulisan ini, telah memberikan rasa bahagia dari proses pembelajaran rekan sejawat yang masih junior dalam mengupas tuntas kajian sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Keterlibatan Dosen dan Mahasiswa dalam penyelesaian pekerjaan kolaboratif ini menjadi sinergitas untuk menggagas perkembangan inovatif dalam buku-buku sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai seorang editor sekaligus senioritas dalam keilmuan ini menunjukkan perkerjaan ini memiliki dampak positif untuk pengembangan keilmuan sejarah pendidikan Islam ke depannya.

Proses perjalanan pendidikan Islam di Indonesia tergambar dalam buku ini, dimulai dari masa awal pendidikan Islam, terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam, pendidikan Islam di Era Penjajahan, hingga pendidikan Islam sesudah kemerdekaan termasuk para tokoh-tokoh yang berperan di dalam perjuangannya terhadap perjalanan pendidikan Islam. Posisi pendidikan Islam dengan segala dinamikanya dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia telah memberi warna bagi umat Islam yang mengenyam pendidikan Islam. Tawaran-tawaran pendidikan Islam yang proaktif dengan perkembangan zaman memberi peluang positif terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Tentunya buku ini masih memiliki kekurangan sumber-sumber yang memadai dalam proses pengkajian sejarah, namun tuntasnya penulisan ini merupakan kerja keras yang perlu diberi penghargaan atas hasil usaha mereka. Semoga buku ini memberikan sumbang pemikiran bagi buku-buku berikutnya. Kiranya buku ini akan memberi manfaat bagi semua pembaca untuk menambah wawasan keilmuan sejarah pendidikan Islam. Tentunya saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan dalam tulisan ini untuk perbaikan pada buku-buku berikutnya. Sebagai seorang editor saya mengucapkan selamat kepada penulis yang selalu bersabar dengan segala revisi-revisi dalam buku ini.

Editor

Prof. Dr. Abdul Mukti, M.A

KATA SAMBUTAN WAKIL REKTOR I UIN SUMATERA UTARA

Rasa syukur patutlah dihaturkan kehadirat Allah swt. karena atas perkenan-Nya kembali sebuah karya ilmiah lahir dari tangan-tangan para dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Salawat dan salam dialamatkan kepada ruh Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang telah meletakkan dasar-dasar ajaran tentang pentingnya tulisan dan bacaan. Di atas fondasi yang dibangunnya, literasi mendapatkan iklim sempurna untuk berkembang. Hal ini sudah dibuktikan secara tak terbantahkan oleh sejarah pendidikan Islam klasik yang cemerlang. Tak terbilang buku yang dapat dirujuk tentang tema ini, yang klasik maupun yang modern, yang ditulis penulis muslim maupun yang bukan.

Buku ini menyajikan Sejarah Pendidikan Islam dalam konteks geografis tertentu, yakni Indonesia, sebagaimana diindikasikan judulnya. Begitupun, sekitar separuh dari pembahasannya, sesungguhnya terkait dengan era sebelum Indonesia menemukan bentuk finalnya sebagai sebuah negara modern. Buku ini memberi perhatian besar pada akar sejarah: masalah teori-teori masuknya Islam ke Nusantara, era kejayaan kerajaan-kerajaan Islam, hingga kondisi pendidikan masa penjajahan. Dengan demikian maka pembaca dibekali dengan fondasi kuat untuk memahami perkembangan selanjutnya, yakni Sejarah Pendidikan Islam pascakemerdekaan. Meskipun di sana-sini jelas diperlukan *updating* informasi, buku ini jelas cukup komprehensif menyajikan tema-tema Sejarah Pendidikan Islam.

Seperti buku sejarah lainnya, buku ini membawa di dalamnya setidaknya dua fungsi: fungsi aktual dan fungsi potensial. Fungsi aktualnya adalah preservasi data (atau sekurangnya informasi) kesejarahan terkait pendidikan Islam Indonesia. Fungsi aktual lainnya adalah ekplanasi. Maksudnya, melalui penyajian informasi kesejarahan maka terjelaskanlah dinamika historis pendidikan Islam Indonesia, mencakup zaman yang cukup panjang dan aspek yang cukup luas. Adapun fungsi potensialnya adalah *ibrah* atau pelajaran yang diperoleh pembaca. Urusan ini sepenuhnya tergantung kepada kedalaman dan daya kritis bacaan para pembaca.

Saya juga ingin memberi catatan kecil terkait penulis buku ini, yang melibatkan dua generasi. Prof. Abdul Mukti telah menekuni bidang Sejarah Pendidikan Islam dan menjadi guru besar di bidang itu. Kedua penulis lainnya, Yusraili Budianti dan Solihah Titin Sumanti, adalah penulis yang lebih muda—murid langsung dan pernah menjadi *teaching assistant (TA)* di kelas-kelas asuhan Prof. Abdul Mukti. Ada nilai yang sangat mendasar di sini, yakni kerjasama lintas generasi yang tak terlalu menonjol di dunia pendidikan Islam saat ini. Lebih dalam lagi, buku ini akan menjadi bukti historis pewarisan pengalaman ilmiah dari seorang guru kepada muridnya, yang kemudian mendapat kehormatan menjadi *co-writer* sebuah karya.

Akhirnya, sebagai Wakil Rektor, dan terlebih sebagai sesama pembelajar sejarah, saya mengucapkan selamat serta menyambut gembira kehadiran buku *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia pengkajian ilmiah dan menjadi amal jariyah bagi semua yang mendukung produksinya.

Wallahu waliyy al-tawfiq

Prof. Dr. Hasan Asari, M.A
Wakil Rektor I
UIN SU Medan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	i
Kata Pengantar Editor	iii
Kata Sambutan Wakil Rektor I UIN Sumatera Utara:	
Prof. Dr. Hasan Asari, M.A	iv
Daftar Isi	vi
BAB I: Proses Islamisasi dan Peletakan Fondasi Pendidikan Islam di Indonesia	1
A. Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia	1
1. Proses Masuknya Islam ke Indonesia	1
2. Daerah Awal yang Mendapat Pengaruh Islam di Indonesia.....	3
B. Awal Pendidikan Islam di Indonesia	4
1. Pendidikan Islam Masa Kesultanan Pasai	6
2. Pendidikan Islam Masa Kesultanan Aceh	15
3. Pendidikan Islam Masa Kesultanan Mataram Islam	20
4. Pendidikan Islam Masa Kesultanan Gowa	25
BAB II: Peran Tokoh Pendidikan Islam di Indonesia	32
A. Tokoh-Tokoh Muslim sebagai Penuntut Ilmu di Masa Awal Pendidikan Islam di Indonesia.....	32
1. Syekh Nuruddin al-Raniri	32
2. Abdulrauf as-Singkili	35
3. Yusuf al-Maqassari	38
B. Tokoh-Tokoh Muslim sebagai Penggerak Pendidikan Islam di Indonesia	41
1. Tuanku Burhanuddin Ulakan	41
a. Riwayat Hidup Tuanku Burhanuddin Ulakan	41
b. Perjuangan Tuanku Burhanuddin Ulakan	42
c. Jenjang Pendidikan dan Kurikulum Surau	44
d. Murid dalam Sistem Pendidikan Surau	45
2. Syekh Abdullah Ahmad	47
a. Riwayat Hidup Syekh Abdullah Ahmad.....	47
b. Pembaruan Lembaga Pendidikan Islam: Madrasah Adabiyah.....	50
c. Pembaruan Sistem Pendidikan.....	52
BAB III: Pendidikan Islam masa Penjajahan.....	56
A. Pendidikan Islam masa Kolonial Belanda	56
1. Kedudukan Pendidikan Islam pada Zaman Kolonial Belanda	56
2. Sistem Pendidikan Islam pada Zaman Kolonial Belanda	60
B. Pendidikan Islam masa Jepang.....	62
A. Sejarah Masuknya Jepang ke Indonesia	62
B. Kebijakan Jepang Terhadap Pendidikan Islam.....	64
C. Sekolah-Sekolah Jepang	68
BAB IV: Pendidikan Islam Setelah Kemerdekaan	71

A.	Kebijakan Pendidikan Islam di masa Awal Kemerdekaan	71
1.	Pendidikan Agama sub-Sistem Pendidikan Nasional.....	71
2.	Pesantren, Madrasah, dan Sekolah	73
3.	Pendidikan Islam pasca Kemerdekaan	77
4.	Sistem Pendidikan	78
B.	Pendidikan Islam di Sistem Pendidikan Nasional.....	84
1.	Pengertian Pendidikan Islam.....	85
2.	Tujuan Pendidikan Islam	86
3.	Pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003	87
4.	Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran.....	91
C.	Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Islam	92
1.	Akademi Dinas Ilmu Agama Jakarta.....	93
2.	Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta	97
D.	Transformasi Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi	98
1.	Kelembagaan di Perguruan Tinggi Islam	99
2.	Faktor Sosial-Politik Hadirnya Perguruan Tinggi Islam	103
3.	Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi Islam	105
BAB V: Pendidikan Agama dan Pengajaran.....		107
A.	Pendidikan Agama Islam (PAI) di Tingkat Sekolah.....	107
1.	Kedudukan Pendidikan Agama Islam di Sekolah	107
2.	Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah	108
B.	Pendidikan Agama Islam (PAI) di Tingkat Perguruan Tinggi	112
1.	Kedudukan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi.....	112
2.	Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi	114
3.	Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi	116
Daftar Pustaka.....		118
Riwayat Editor dan Penulis.....		

BAB I

PROSES ISLAMISASI DAN PELETAKAN DASAR FONDASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

*Oleh: Ilham Amara Malik Daulay, Fitri Kamelia Hutapea, Neng Nurcahyati Sinulingga,
Nurul Huda ZH Harahap, Imron Bima Saputra*

A. Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia

Secara historis masuknya Islam ke Indonesia yang dahulu dikenal dengan nama Nusantara terbagi ke dalam dua cara, yaitu: pertama berasal dari kalangan ulama yang datang dari Timur Tengah, kedua berasal lewat jalur pelayaran dan perdagangan. Sejarah pertumbuhan jaringan antara para penuntut ilmu dari Nusantara dengan ulama Timur Tengah, khususnya Haramayn melibatkan proses sejarah yang cukup panjang. Jaringan murid-guru yang tercipta di antara kaum muslim, baik dari kalangan penuntut ilmu maupun awam umumnya terjadi di antara kedua kawasan ini. Proses tersebut terjadi dalam perjalanan Islam di Nusantara dan hubungannya dengan perkembangan Islam di Timur Tengah. Diperkirakan hubungan tersebut terjadi pada sekitar abad ke-17 M dan ke-18 M (Azra, 2013, p. 1).

Masuknya Islam ke Indonesia bermuara pada perdagangan, namun seiring berjalannya waktu para pedagang yang berasal dari Gujarat, Arab, dan Persia juga menyebarkan ajaran Islam. Buku ini menguraikan tentang latar belakang, indikasi yang termuat dalam konteks sejarah masuknya Islam ke Indonesia, daerah awal masuknya Islam ke Indonesia, kemudian dilanjutkan pada pembahasan kedua mengenai masa datangnya Islam, masa berkembangnya Islam di Indonesia, dan masa politik perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia agak unik bila dibandingkan dengan masuknya Islam ke negeri lain (Daulay, 2014b, p. 11). Keunikannya terlihat pada proses masuknya Islam ke Indonesia yang relatif berbeda. Islam masuk ke Indonesia secara damai yang dibawa oleh para pedagang dan mubaligh. Proses masuknya Islam ke negeri lain pada umumnya terjadi lewat penaklukan, seperti: Irak, Iran (Persia), Mesir, Afrika Utara, dan negeri-negeri lainnya (Yatim, 2008, p. 6).

1. Proses Masuknya Islam ke Indonesia

Terdapat beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, terutama yang berkenaan dengan waktu datangnya, negeri asalnya, dan siapa yang membawanya. Para sarjana Belanda kebanyakan berpendapat bahwa kedatangan Islam ke Nusantara berasal dari India, di antaranya: Pijnappel, J. D. Moquette, dan Snouck Hurgronje. Menurut Hurgronje abad ke-12 M adalah periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam ke Nusantara (Azra, 2013, p. 24).

Selain teori India, berkembang juga teori Arab yang berpendapat bahwa Islam datang dari Arab. Teori ini didukung oleh sejumlah sarjana, di antaranya: Crawford, Niemann, dan yang paling gigih mempertahankannya adalah Naquib al-Attas (Azra,

2013, pp. 27–28). Menurut beberapa sumber sejarah dijelaskan bahwa Selat Malaka sebagai rute perdagangan yang telah lama dikenal sebagai salah satu jalur perdagangan yang menghubungkan antara dunia bagian Timur dan Barat. Penjelasan ini dapat dilihat dalam tulisan Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto yang dikutip dari tulisan W.P Groeneveldt, “*Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources*” (Daulay, 2014b, p. 12).

Pada sekitar abad ke-7 M dan ke-8 M, ketika Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya, Selat Malaka sudah mulai dilalui oleh para pedagang muslim dalam pelayarannya berbagai negeri di sekitar Asia. Berdasarkan berita yang berasal dari masa kekuasaan Dinasti Tang, pada masa tersebut diduga sudah ada masyarakat muslim yang mendiami wilayah Kanton di Sumatera (Poesponegoro & Notosusanto, 1992, p. 1).

Sejalan dengan penjelasan di atas, di Medan pada tahun 1963 dan Kuala Simpang Aceh pada tahun 1980, telah dilaksanakan seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia. Kedua seminar tersebut sepakat menyatakan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-1 H atau 7 M langsung dari Arab. Inti pokok dari hasil seminar di Medan yang terpenting adalah Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah dan langsung dibawa dari Arab. Daerah yang mula-mula dimasuki oleh Islam adalah daerah pesisir Sumatera. Sedangkan kerajaan Islam pertama yang berdiri adalah di Aceh. Penyiaran Islam dilakukan secara damai oleh pedagang. Kedatangan Islam ke Indonesia adalah membawa kedamaian dan peradaban yang tinggi (*Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia*, 1963, p. 265).

Seminar yang dilaksanakan di Medan tersebut merupakan lanjutan dari seminar yang sudah terlebih dahulu dilakukan di Banda Aceh pada tahun 1978. Dalam seminar tersebut ditegaskan bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia ialah: Perlak, Lamuri, dan Samudera Pasai (Hasjmy, 1989, p. 143). Seminar tersebut diadakan sebagai upaya pelurusan tentang masuknya Islam ke Indonesia yang sebelumnya banyak dipelopori oleh para sarjana Barat. Dalam seminar tersebut juga disepakati bahwa masuknya Islam ke Indonesia tidak terjadi secara bersamaan. Ada beberapa daerah yang terlebih dahulu mendapat pengaruh Islam, sementara daerah lainnya terjadi belakangan. Berkenaan dengan ini telah disepakati bersama oleh para sejarawan Islam Indonesia, bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia lewat Sumatera (Amin, 2015, p. 164).

Sementara itu proses masuknya Islam ke Pulau Jawa diduga kuat terjadi pada abad ke-11 M berdasarkan sumber batu nisan Fatimah binti Maimun yang ditemukan di Gresik. Situasi politik mempercepat penyebaran Islam di Jawa, karena pada masa tersebut posisi Majapahit mulai melemah karena perpecahan. Para bupati yang berkuasa di daerah pesisir merasa mendapat kesempatan untuk melepaskan diri dari pengaruh Majapahit. Para bupati tersebut kemudian memeluk Islam dan mempercepat proses penyebaran Islam di wilayah tersebut (Al-Qurtuby, 2017, p. 65).

Sementara itu kedatangan Islam di wilayah Indonesia Timur juga diperkirakan berasal dari para pedagang yang terjadi pada sekitar abad ke-14 M (Jaffar, 2020, p. 12). Proses masuknya Islam di Sulawesi bagian Selatan diperkirakan terjadi pada abad ke-15 M yang dibawa oleh para pedagang. Menurut Tome Pires pada abad ke-16 M di daerah Gowa telah terdapat pedagang Muslim dan orang-orang Portugis yang telah melakukan hubungan dagang dengan Gowa (Poesponegoro & Notosusanto, 1992). Di Kalimantan (Borneo) proses masuknya Islam diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-16 M.

Kehadiran komunitas muslim di sebuah daerah terjadi lewat proses yang panjang sebagai hasil dari kerja keras para mubaligh dalam menyebarkan ajaran Islam. Komunitas tersebut kemudian tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kerajaan besar, seperti: Kerajaan Perlak, Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Banten, Demak, Mataram, Gowa, Bone, Ternate, Tidore, dan lain sebagainya. Dengan kehadiran kerajaan-kerajaan tersebut di Nusantara, maka fase keterlibatan kekuasaan Islam di bidang politik semakin berkembang. Tumbuhnya pusat-pusat kekuasaan Islam di Nusantara ini jelas sangat berpengaruh bagi proses islamisasi di Indonesia. Kekuatan politik digabungkan dengan semangat para mubaligh untuk mengajarkan Islam merupakan dua sayap kembar yang mempercepat tersebarnya Islam ke berbagai wilayah di Indonesia.

2. Daerah Awal yang Mendapat Pengaruh Islam di Indonesia

Wilayah pesisir timur Sumatera sejak dahulu menjadi jalur pelayaran dan perdagangan yang cukup ramai. Hal ini menjadi bukti kuat adanya hubungan dagang antara orang-orang Arab dengan Melayu yang sudah terjalin cukup lama. Pasca berdirinya Kesultanan Malaka dan Samudera Pasai, semakin ramai pula para pedagang Arab yang singgah ke Nusantara. Selain mencari keuntungan duniawi, para pedagang ini juga mencari keuntungan *ruhāniyah* dengan menyebarkan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Artinya mereka berdagang sambil mensyiarkan Islam sebagai ajaran Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada abad ke-7 M, daerah awal yang mendapat pengaruh Islam ialah Kesultanan Samudera Pasai. Kerajaan tersebut terletak di pesisir Aceh utara yang sedang mengalami pertumbuhan perdagangan yang cukup pesat. Samudera Pasai berkembang sebagai pusat perdagangan dan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 1285 M. Selain itu, daerah lain yang mendapat pengaruh Islam ialah Kerajaan Malaka. Kerajaan ini memiliki letak yang sangat strategis dalam hubungan perdagangan dan pelayaran di Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Timur. Kerajaan Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Akibatnya, Islam berkembang dengan sangat pesat di Malaka (Hasjmy, 1989). Dari kedua wilayah tersebut Islam terus berkembang dan bereksplorasi ke berbagai wilayah lainnya.

Namun pada tahun 1511 M, Kerajaan Malaka takluk kepada Portugis. Kekalahan tersebut kemudian menyebabkan rute perdagangan di Selat Malaka menjadi berubah. Para pedagang muslim tidak lagi tertarik untuk singgah ke pelabuhan Malaka, tapi lebih

memilih untuk singgah ke pelabuhan Aceh. Dari Aceh mereka melakukan kegiatan perdagangan di sepanjang Pantai Barat Sumatera dengan melewati Selat Sunda dan akhirnya sampai ke Pantai Utara Pulau Jawa. Sampai pada abad ke-18 M, Islam sudah tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia, namun belum semua wilayah tersebut menerima ajaran Islam (Azra, 2013).

B. Awal Pendidikan Islam di Indonesia

Islam datang ke Indonesia pada awalnya sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu-Budha. Pada masa tersebut Kerajaan Majapahit masih menguasai sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya pulau Jawa. Kemudian masyarakat Indonesia mulai berkenalan dengan Islam melalui jalur perdagangan. Penyebaran Islam pertama kali terjadi di wilayah pesisir yang masyarakatnya terbuka terhadap budaya asing. Setelah itu, Islam mulai menyebar ke wilayah pedalaman (pegunungan) melalui jalur ekonomi, pendidikan, dan politik. Masuknya Islam ke wilayah pedalaman berlangsung secara damai, lambat, dan beragam.

Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam tertua yang ada di Sumatera. Kerajaan ini berdiri pada tahun 225-692 H/840-1292 M. Raja Perlak pertama bernama Sultan Alaidin Syed Maulana Abdul Aziz Syah (225-249 H/840-864 M). Pada awalnya Islam berkembang di Perlak dipengaruhi oleh paham Syiah yang berasal dari Persia. Namun sejak masa pemerintahan Sultan Alaidin Syed Maulana Abbas Syah (285-300 M), paham ini mulai terkikis dan digantikan oleh paham Ahlusunnah wal Jamaah. Pada awalnya terjadi perang saudara di antara dua pengikut paham ini, namun akhirnya dicapai kesepakatan dengan wilayah Perlak dibagi menjadi dua, yaitu: wilayah pesisir dikuasai oleh mereka yang berpaham Syiah, sementara wilayah pedalaman dikuasai oleh mereka yang berpaham Ahlusunnah wal Jamaah. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Syed Maulana Syah (976-988 M) wilayah Kerajaan Perlak dapat disatukan kembali (Zainuddin, 1961). Setelah itu mulai muncul kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang sangat mempengaruhi proses perkembangan Islam di wilayah ini.

Berkembangnya ajaran Islam di Indonesia ditandai oleh beberapa saluran proses islamisasi, yaitu: perdagangan, perkawinan, kesenian, sufisme, dan pendidikan. Berbicara tentang pendidikan Islam tentu sebaiknya dimulai dari membicarakan apa sebetulnya esensi pendidikan tersebut. Dipandang dari sudut definisi pendidikan yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan, dari sekian banyak itu dapat diambil pengertian bahwa hakikat pendidikan itu adalah proses pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan. Dengan demikian, pendidikan Islam yang berkembang adalah proses pembentukan manusia sesuai dengan tuntunan Islam. Jika demikian pemahaman yang diberikan terhadap pendidikan, maka para pedagang atau mubaligh tersebut adalah pendidik, sebab mereka melaksanakan tugas-tugas kependidikan (M. K. Zuhairini, 1985). Dengan demikian, dapat dimaklumi bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam proses Islamisasi yang efektif di Indonesia.

Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga ikut dalam memperhatikan proses perkembangan pendidikan di wilayah kekuasaannya, salah satunya terdapat di Kerajaan Aceh Darussalam. Peranan kerajaan ini dalam bidang pendidikan dapat dilihat dalam tulisan Hasjmy "*Kebudayaan Aceh dalam Sejarah.*" Berkembangnya ajaran Islam di Kerajaan Aceh Darussalam ditandai dengan kemunculan lembaga-lembaga negara yang tersebar dalam *Qanun Meukata Alam*, di mana lembaga ini memiliki tiga balai yang bidang tugasnya meliputi masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu:

a. Balai Setia Hukama

Balai ini dapat disamakan dengan lembaga ilmu pendidikan dan pengetahuan tempat berkumpulnya para sarjana, hukama (ahli pikir tentang hukum) untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

b. Balai Setia Utama

Balai ini dapat disamakan dengan jawatan pendidikan yang membahas masalah pendidikan.

c. Balai Jama'ah Himpunan Ulama

Balai ini dapat disamakan dengan sebuah studi klub tempat para ulama/sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran, membahas masalah-masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan (Lombard, 2008).

Perkembangan Islam di wilayah Indonesia juga dilakukan oleh Kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kehidupan keagamaan mengalami kemajuan pesat. Sultan Agung berupaya memajukan agama cukup baik, hal ini dapat dilihat dari usaha memakmurkan masjid, yaitu dengan cara mendirikan Masjid Raya (masjid agung) di setiap kabupaten sebagai induk dari seluruh masjid yang ada di kabupaten. Selain itu pada setiap Ibu Kota distrik ada sebuah masjid kewedahan, begitu juga di setiap desa didirikan masjid desa. Masjid Agung dikepalai oleh seorang Penghulu, masjid kewedahan oleh Naib dan masjid desa oleh Modin (Saridjo, 1980, p. 40).

Pada pertengahan abad ke-16 M, Sultan Agung mendirikan sebuah lembaga pengajaran mirip dengan pesantren. Lembaga ini terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu:

- a) Tingkatan pengajian Alquran, tingkatan ini terdapat pada setiap desa, yang diajarkan meliputi huruf hijaiyah, membaca Alquran, Barzanji, rukun Islam, dan rukun iman.
- b) Tingkatan pengajian kitab, para santri yang belajar pada tingkat ini ialah mereka yang telah khatam Alquran. Tempat belajar biasanya di serambi masjid dan mereka umumnya mondok. Guru yang mengajar di sini diberi gelar Kiai Anom. Kitab yang mula-mula dipelajari ialah kitab-kitab 6 bis, yaitu sebuah kitab yang berisi 6 kitab

dengan 6 *bismillahirrahmanirrahim*. Kemudian dilanjutkan dengan *Matan Taqrib* dan *Bidáyatul Hidáyah* karangan Imam al-Ghazali.

- c) Tingkat pesantren besar, tingkat ini didirikan di daerah kabupaten sebagai lanjutan dari pesantren desa. Kitab-kitab yang diajarkan di sini adalah kitab-kitab besar dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, cabang-cabang ilmu yang diajarkan antara lain; fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, dan tasawuf.
- d) Pondok pesantren tingkat keahlian (takhusus). Ilmu yang dipelajari pada tingkat ini ialah satu cabang ilmu dengan secara mendalam. Tingkat ini adalah tingkat spesialis (Yunus, 1992, pp. 223–224).

1. Pendidikan Islam Masa Kesultanan Pasai

Setelah kedatangan Islam, terjadi proses penyebaran ajaran yang begitu luas. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam tersebut tumbuh dan berkembang di beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Penyebaran kerajaan Islam ini berkaitan dengan pelaksanaan sistem pendidikan. Pada masa tersebut terdapat sistem pendidikan yang dikembangkan demi mencapai tujuan yang telah dirancang sedemikian rupa.

Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di pesisir timur pulau Sumatera yang berbatasan dengan Selat Malaka menjadi semakin berkembang. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Aceh, Bican, Lambri, Pedir, Pirada, Pase, Aru, Arcat, Rupert, Siak, Kampar, Tongkal, Indragiri, Jambi, dan Palembang. Kerajaan-kerajaan tersebut ada yang sedang mengalami perkembangan bahkan ada yang sedang mengalami keruntuhan karena pergeseran politik. Berdasarkan data arkeologis, kerajaan Islam yang sudah tumbuh sejak dua abad sebelum kehadiran Tome Pires, yaitu Kerajaan Samudera Pasai (Armando, 1967). Tumbuhnya Kerajaan Samudra Pasai tidak dapat dipisahkan dari letak geografisnya yang senantiasa tersentuh pelayaran dan perdagangan internasional.

Selain itu, Kerajaan Samudera Pasai juga mengembangkan sistem pendidikan pada masa kekuasaannya. Adapun bagian-bagian dari sistem pendidikan yang dikembangkan adalah tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode dan sarana prasana pendidikan. Pada masa ini merupakan awal berkembangnya Islam di Indonesia. Perkembangan dan pelaksanaan pendidikan berhubungan dengan kebijakan sultan yang merupakan penguasa yang berkuasa. Selain itu juga terdapat *meunasah*, *rangkang* dan *dayah* yang merupakan bagian dari sistem pendidikan pada masa ini.

a. Pendidikan sebagai Pusat Propaganda Politik

Raja pertama Samudera Pasai sekaligus pendiri kerajaan adalah Marah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh, dan memerintah antara tahun 1285-1297 M. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, kerajaan tersebut telah memiliki lembaga negara yang teratur dengan angkatan perang laut dan darat yang kuat. Meskipun demikian,

secara politik Kerajaan Samudera Pasai masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1295 M, Sulthan Malik Al-Saleh menunjuk anaknya sebagai raja, yang kemudian dikenal dengan nama Sultan Malik Al-Zahir I (1297-1326 M). Pada masa pemerintahannya, Samudera Pasai berhasil menaklukkan Kerajaan Perlak. Setelah Sultan Malik Al-Zahir I mangkat, penguasa kerajaan diserahkan kepada Sultan Ahmad Laikudzahir yang bergelar Sulthan Malik Al-Zahir II (1326-1348 M).

b. Pendidikan sebagai Pusat Propaganda Agama

Berdirinya Kerajaan Samudera Pasai menyebabkan Kerajaan Perlak mengalami kemunduran. Samudera Pasai tampil sebagai bandar dagang utama di pantai timur Sumatera. Samudera Pasai tidak hanya menjadi pusat perdagangan lada ketika itu, tetapi juga sebagai pusat pengembangan agama Islam bermazhab Syafi'i.

Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh berkembanglah agama Islam yang bermazhab *Syafi'i*. Awalnya Sultan Malik Al-Saleh merupakan pemeluk *Syiah* yang dibawa oleh para pedagang Gujarat yang datang ke Indonesia pada abad 12 M. Para pedagang Gujarat bersama-sama pedagang Arab dan Persia menetap di wilayah tersebut dan kemudian mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Perlak. Namun kemudian Sultan Malik Al-Saleh berpindah menjadi memeluk Islam bermazhab *Syafi'i* atas bujukan Syekh Ismail yang merupakan utusan Dinasti Mamluk di Mesir yang bermazhab *Syafi'i*. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh juga Samudera Pasai mendapat kunjungan dari Marco Polo (Kartodirdjo & Dkk, 1975, p. 30).

Pada tahun 1345 M, Ibnu Batutah dari Maroko juga sempat singgah di Kerajaan Samudera Pasai pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir. Raja tersebut terkenal alim dalam ilmu agama dan bermazhab *Syafi'i*, mengadakan pengajian sampai waktu salat Ashar dan fasih berbahasa Arab serta mempraktikkan pola hidup yang sederhana (Z. Zuhairini, 2004, p. 135). Keterangan Ibnu Batutah tersebut bahwa pendidikan yang berlaku pada masa Kerajaan Samudera Pasai ialah sebagai berikut:

- a. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang *syari'at* adalah fiqh mazhab *Syafi'i*.
- b. Sistem pendidikannya secara informal berupa majlis ta'lim dan *halaqah*.
- c. Tokoh pemerintahan merangkap tokoh agama.
- d. Biaya pendidikan bersumber dari negara.

Pada masa Kerajaan Samudera Pasai mencapai kejayaannya sekitar abad ke-14 M, maka pendidikan juga tentu mendapat tempat tersendiri. Mengutip keterangan Tome Pires yang menyatakan bahwa, "*di Samudera Pasai banyak terdapat kota, dimana antar warga kota tersebut terdapat orang-orang berpendidikan*" (Ibrahim et al., 1991, p. 61).

Menurut Ibnu Batutah juga, Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-14 M, sudah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara, dan banyak berkumpul ulama-ulama

dari berbagai negeri Islam. Ibnu Batutah menyatakan bahwa Sultan Malikul Zahir adalah orang yang cinta kepada para ulama dan ilmu pengetahuan. Bila hari jum'at tiba, sultan sembahyang di masjid menggunakan pakaian ulama, setelah sembahyang mengadakan diskusi dengan para alim pengetahuan agama, antara lain: Amir Abdullah dari Delhi, dan Tajudin dari Isfahan. Bentuk pendidikan dengan cara diskusi disebut majlis ta'lim atau *halaqah*. Sistem *halaqah* yaitu para murid mengambil posisi melingkari guru. Guru duduk di tengah-tengah lingkaran murid dengan posisi seluruh wajah murid menghadap guru.

c. Lembaga Pendidikan: Meunasah, Rangkang, dan Dayah

Pada masa ini, pendirian tempat-tempat pendidikan semakin meningkat terutama di wilayah Arab maupun Persia. Sadiq sebagaimana dikutip oleh Abdul Mukti dalam bukunya yang berjudul *Konstruksi Pendidikan Islam: Belajar dari Kejayaan Nizhamiyah Dinasti Saljuq*, bahwa di Ray (Ibu Kota Dinasti Saljuk) terdapat sekitar 58 madrasah pendidikan (Mukti, 2017, p. 305). Jumlah ini semakin bertambah setiap tahunnya. Namun di kota-kota besar Persia, jumlah madrasah pendidikan tidak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, karena Dinasti Safawiyah menjadi aliran Syiah sebagai mazhab resmi negaranya.

Selain di wilayah Arab dan Persia, pertumbuhan madrasah pendidikan juga terjadi di wilayah Nusantara. Di Kerajaan Samudera Pasai, madrasah ini dikenal dengan nama Meunasah. Secara etimologi, kata Meunasah berasal dari bahasa Arab yang bermakna tempat belajar atau sekolah. Meunasah merupakan lembaga pendidikan Islam formal pertama di Kerajaan Samudera Pasai. Lembaga ini menyelenggarakan pendidikan pada tingkat rendah. Meunasah bisa dijumpai pada setiap kampung (*gampong*) dalam wilayah Kerajaan Pasai. Salah satu syarat untuk mendirikan sebuah kampung dalam wilayah kerajaan ini haruslah ada sebuah Meunasah. Meunasah ini berada dalam kepemimpinan seorang alim yang disebut Imam Meunasah. Meunasah biasanya dipimpin oleh seorang tengku yang disebut Tengku Besar Meunasah.

Tengku Besar Meunasah bertugas untuk membina agama di suatu kampung. Perlu dicatat bahwa kepemimpinan Imam Meunasah pada waktu itu mencakup sebagai pimpinan agama dan merangkap sebagai pimpinan adat yakni wakil sultan pada tingkat desa, seperti kepala desa sekarang. Sebagai pimpinan agama, Tengku/Imam Meunasah memiliki tugas-tugas keagamaan, antara lain: mengajar anak-anak membaca Alquran, menjadi imam salat, mengurus jenazah, memimpin do'a pada kenduri-kenduri di wilayahnya, menyembelih hewan, mengurus masalah pernikahan dan mengurus kegiatan-kegiatan ramadhan, seperti mempersiapkan berbuka puasa bersama di Meunasah, dan lain-lain (Daulay, 2014b, p. 24).

Konsekuensi seorang Tengku Besar Meunasah selain seorang alim juga harus menguasai adat. Meunasah mempunyai beberapa fungsi yakni; sebagai tempat musyawarah desa, tempat menyelesaikan persengketaan, lembaga pendidikan, tempat

melaksanakan salat lima waktu, salat tarawih, salat Idul Fitri dan Idul Adha, tempat melaksanakan akad nikah dan tempat anak-anak dan para tamu menginap (Ritongan, 2008, p. 109).

Menurut Haidar, selain beberapa fungsi di atas, beliau juga menuturkan bahwa Meunasah memiliki multifungsi, tidak hanya sebagai tempat belajar bagi anak-anak, tetapi juga berfungsi sebagai; lambang dari kesatuan masyarakat Aceh, pusat penyiaran berita untuk warga, balai gampong, tempat musyawarah seluruh warga gampong (kampung), tempat pejabat-pejabat gampong memutuskan dan memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, tempat warga gampong tidur di malam hari, tempat tadarus Alquran dan tempat perayaan dan kenduri massal dalam kampung, seperti maulid Nabi Muhammad SAW, nuzul Alquran, dan isra' mi'raj.

Kurikulum di Meunasah meliputi pembelajaran Alquran, dasar-dasar pengetahuan agama dan bahasa Arab. Kitab-kitab yang dikaji di Meunasah selain Alquran yaitu kitab *Masa'il al-Muhtadi li Ikhwan al-Mubtadi*, *Bidayat al-Mubtadi*, kitab Sharf, dan kitab *Al-'Awamil*. Bahkan jika Imam Meunasah itu ternyata seorang alim besar, maka kajiannya meliputi kitab *Hasyiyyat al-Bajuriy*, karya al-Bajuriy (w. 1277 H.) dan kitab *Alfiyyah* karya Ibn Malik (w. 1274 H) (Ritongan, 2008, p. 109).

Selanjutnya Hashmy sebagaimana dikutip Haidar Daulay mengemukakan bahwa jika ditinjau dari segi pendidikan, Meunasah adalah lembaga pendidikan awal bagi anak-anak yang dapat disamakan dengan tingkatan sekolah dasar. Di Meunasah para murid diajar menulis dan membaca huruf Arab, ilmu agama dalam bahasa Jawi (Melayu) dan akhlak (Daulay, 2014, p. 23).

Sistem pengajaran di Meunasah ialah guru membaca kitab sambil menjelaskan maknanya dalam bahasa Melayu atau bahasa Aceh. Kemudian guru meminta salah seorang murid untuk membaca ulang sambil memperbaiki kesalahan-kesalahan bacaan murid. Pendidikan di Meunasah hanya diikuti oleh laki-laki saja, sementara murid perempuan belajar dengan Imam Meunasah di rumahnya atau di rumah guru agama, dan mereka menginap di rumah guru agama tersebut. Meunasah setingkat dengan Sekolah Dasar (SD). Dalam hal ini fungsi Meunasah adalah mempersiapkan murid-murid yang akan melanjutkan pendidikannya pada tingkat menengah yakni Rangkang.

Rangkang adalah tempat tinggal murid yang dibangun di sekitar masjid. Menurut Qabub Meukuta Alam, dalam tiap-tiap kampung harus ada Meunasah. Masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan umat, termasuk di dalamnya kegiatan pendidikan. Sebab murid harus mondok dan tinggal, maka perlu dibangun tempat tinggal mereka di sekitar masjid, tempat tinggal murid di sekitar masjid inilah yang disebut dengan rangkang (Daulay, 2014, p. 24).

Rangkang menyelenggarakan pendidikan pada tingkat menengah (SLTP), sebagai kelanjutan dari Meunasah. Karena itu lembaga pendidikan ini tidak dijumpai pada setiap gampong, akan tetapi dijumpai pada setiap wilayah kemukiman. Wilayah

kemukiman terdiri dari beberapa desa di bawah pimpinan seorang pejabat yang disebut Mukim. Biasanya satu kecamatan dibagi menjadi empat wilayah kemukiman. Pejabat mukim bukanlah pimpinan formal, melainkan sebagai koordinator. Lembaga ini sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Pasai. Paling tidak setiap wilayah kemukiman mempunyai sebuah masjid. Pimpinan Rangkang disebut Teungku Rangkang. Kualifikasi seorang Teungku Rangkang adalah seorang 'alim yang sudah menamatkan pendidikannya pada tingkat Dayah. Sesuai dengan jenjangnya, maka pada Rangkang diajarkan pengetahuan-pengetahuan agama Islam setingkat lebih tinggi dari pendidikan Meunasah.

Kurikulum pendidikan di Rangkang ini terpusat kepada pendidikan agama dan bahasa Arab. Untuk pengetahuan bahasa Arab digunakan kitab *al-Jurumiyyah Mutammimah*. Sementara untuk pengetahuan agama dipakai *Matan Taqrib*, karya Abu Syuja' (w. 1196 H) dan kitab *Hasyiyyat al-Bajuri*, karya al-Bajuri (w. 1277 H). Semua kitab-kitab ini berbahasa Arab (Ritongan, 2008, p. 110).

Sistem pendidikan di Rangkang ini sama dengan sistem pendidikan di pesantren. Murid-murid duduk membentuk lingkaran dan sang guru menerangkan pelajaran, berbentuk *halaqah*, metode yang disampaikan di dunia pesantren disebut namanya dengan *sorogan* dan *wetonan*. Sistem pengajarannya ialah guru membaca kitab sambil menjelaskan maknanya dalam bahasa Melayu atau bahasa Aceh, kemudian guru meminta salah seorang murid untuk membaca ulang sambil memperbaiki kesalahan-kesalahan bacaan murid. Fungsi Rangkang adalah untuk mempersiapkan murid-murid yang akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat Dayah. Biasanya murid-murid Rangkang menginap di Rangkang sebagaimana halnya dengan murid-murid di Meunasah. Karena menurut ajaran Islam, sejak akil baligh, anak-anak harus berpisah tempat tidurnya dengan orang tuanya, dan karena itu pula rumah-rumah di Aceh tidak mempunyai kamar tidur untuk anak-anaknya yang sudah remaja.

Snouch Hurgronje mendeskripsikan Rangkang dalam bentuk rumah kediaman, tetapi lebih sederhana, memiliki satu lantai saja di kanan kiri gang pemisah (blok) masing-masing untuk 1-3 murid. Kadang-kadang rumah yang sudah tidak dipakai lagi oleh orang shaleh, diwakafkan untuk siswa. Rumah tersebut diserahkan kepada guru untuk dijadikan sebagai Rangkang (Hurgronje, 1997, p. 23). Lebih lanjut Hurgronje menyebutkan Tengku Rangkang bertugas untuk menjadi guru bantu yang membimbing siswa yang tinggal di Rangkang. Tengku Rangkang ini bertugas untuk memberi penjelasan dan keterangan tentang pelajaran yang kurang jelas bagi siswa. Tengku Rangkang membantu siswa dengan pengetahuan praktis, menuntun mereka memakai buku pikah (fikih) dan usuy (Ushuluddin) berbahasa Melayu seperti *Masailah*, *Bidayah*, dan surat al-Mustaqim (Hurgronje, 1997, p. 25).

Lembaga pendidikan berikutnya yang populer di Aceh adalah Dayah. Dayah berasal dari bahasa Arab, *Zawiyah*. Kata *Zawiyah* pada mulanya merujuk kepada sudut suatu bangunan, dan sering dikaitkan dengan masjid. Di sudut masjid itu terjadi proses pendidikan antara si pendidik dan si terdidik. Selanjutnya *Zawiyah* dikaitkan dengan

tarekat-tarekat sufi, di mana seorang syekh atau *mursyid* melakukan kegiatan pendidikan kaum sufi (Daulay, 2014, p. 26).

Dengan demikian, kata Dayah yang berasal dari kata *Zawiyah* di samping memiliki hubungan kebahasaan yakni berubahnya kata dari *Zawiyah* menjadi Dayah menurut dialek Aceh, juga memiliki hubungan fungsional, yakni sama-sama merujuk kepada tempat pendidikan. Dayah merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Aceh sejak masa Kerajaan Pasai. Dayah dipimpin seorang ulama besar yang disebut Teungku Chik. Karena itu Dayah hanya dijumpai di setiap daerah di mana seorang ulama besar berdomisili. Dayah menerima lulusan-lulusan Rangkang. Dengan demikian, tidak jarang seorang lulusan Rangkang harus meninggalkan kampung halamannya (*meudagang*) untuk menuntut ilmu di Dayah yang diinginkannya. Bahkan mereka harus tinggal bertahun-tahun di Dayah untuk menjalani pendidikannya. Di Dayah mereka belajar memasak dan mencuci sendiri. Hal ini diperlukan untuk mengajarkan murid-murid Dayah bisa hidup mandiri. Dayah mengajarkan pengetahuan-pengetahuan agama Islam yang tinggi-tinggi, meliputi ilmu fiqh, ushul fiqh, tauhid, tafsir, hadis, *balaghah* dan *mantiq*. Pendidikan Dayah terkesan sangat monoton dalam penyusunan kurikulum yang masih berorientasi kepada sistem lama. Artinya kitab yang diajarkan adalah kitab-kitab abad pertengahan. Secara keseluruhan bidang kurikulum ternyata tidak ada perubahan dan perkembangan, yang ada hanyalah pengulangan. Hal ini disebabkan pengaruh dari pendahulu yang begitu kuat sehingga tidak ada tokoh dayah yang berani untuk mengembangkan kurikulum yang representative (Sufi, 1987, p. 29).

Hashmy sebagaimana dikemukakan Haidar menjelaskan tentang Dayah adalah sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan mata pelajaran agama yang bersumber dari bahasa Arab, misalnya fiqh, bahasa Arab, tauhid, tasawuf, dan lain-lain. Tingkat pendidikannya adalah sama dengan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sebagai upadaya dalam kelancaran pendidikan dan pengajaran, Teungku Chik biasanya mengangkat asistennya yang disebut Teungku Rangkang, dan asisten ini seringkali direkrut dari kalangan murid-muridnya yang cerdas. Banyaknya Teungku Rangkang tergantung pada banyaknya murid Dayah (Mukti, 2017, pp. 110-111).

Pada masa Kesultanan Aceh, Dayah menawarkan tiga tingkatan pengajaran, yakni: Rangkang (rendah), Balee (sedang), dan Dayah Manyang (tinggi). Di beberapa Dayah hanya terdapat Rangkang dan Balee, sedangkan di tempat lain hanya ditemui tingkat Dayah Manyang saja. Meskipun demikian di tempat tertentu juga terdapat tiga tingkatan sekaligus, mulai rendah sampai tinggi. Sebelum murid belajar di Dayah, mereka harus sudah mampu membaca Alquran yang mereka pelajari di rumah atau di Meunasah dari seorang Teungku. Kepergian untuk menuntut ilmu agama di Dayah sering disebut dengan *Meudagang*.

Metode mengajar di Dayah pada dasarnya dengan lisan, *meudrah* dan metode hafalan. Pada kelas yang lebih tinggi, metode diskusi dan debat (*meudeubat*) sangat

dianjurkan dalam segala aktifitas proses belajar mengajar, dan ruang kelas hampir merupakan sebuah ruang seminar. Para Teungku biasanya berfungsi sebagai moderator, yang kadang-kadang juga berperan sebagai pengambil keputusan.

Santri (*aneuk dayah*) biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri *meudagang*. Santri kalong merupakan bagian *aneuk dayah* yang tidak menetap dalam pondok, tetap pulang ke rumah masing-masing setelah belajar. Mereka biasanya berasal dari daerah sekitar Dayah tersebut. Sementara santri *meudagang* adalah putra dan putri yang tinggal menetap dalam dayah dan biasanya berasal dari daerah jauh. Sistem pendidikan yang dikembangkan di Dayah atau Rangkang tidak berbeda dengan apa yang dikembangkan di pesantren-pesantren di Jawa atau surau-surau di Sumatera Barat, yakni bisa ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

- a. Ditinjau dari segi materi pelajaran yang diajarkan adalah mata pelajaran agama semata-mata yang bertitik tolak kepada kitab-kitab klasik (kitab kuning). Pada umumnya, pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana (kitab jawoe/kitab Arab-Melayu) kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam. Tingkatan suatu Dayah dapat diketahui dari jenis kitab-kitab yang diajarkan. Ada delapan macam bidang pengetahuan dalam kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di Dayah, yakni: 1) nahwu dan saraf (morfologi); 2) fiqh; 3) ushul fiqh; 4) hadis; 5) tafsir; 6) tauhid; 7) tasawuf dan etika, dan cabang-cabang lain seperti *tarik* dan *balaghah*. Tinggi rendahnya ilmu seseorang diukur dari kitab yang dipelajarinya (Dhofier, 1984, p. 52).
- b. Ditinjau dari segi metodenya adalah hafalan, *meudrah* dan *muedeubat*. Dalam tradisi pesantren di Jawa sering disebut *sorogan* dan *wetonan*.
- c. Ditinjau dari segi sistem pembelajaran adalah non-klasikal. Santri (*aneuk dayah*) tidak dibagi berdasarkan tingkatan kelas, tetapi berdasarkan kitab yang dipelajarinya.
- d. Ditinjau dari segi manajemen pendidikan, maka di lembaga pendidikan ini tidak mengenal nomor induk pelajar, ada rapor, ada sertifikat dan lain sebagainya (Hasbullah, 1999, p. 144).

Kebiasaan orang Aceh, belajar di Dayah, atau sering disebut *meudagang*, biasanya membutuhkan waktu yang tidak terbatas. Artinya seorang murid datang dan meninggalkan dayah kapan ia suka. Beberapa *aneuk dayah* (santri) belajar di beberapa Dayah, berpindah dari satu Dayah ke Dayah lainnya, setelah belajar beberapa tahun. Jumlah tahun yang dihabiskan oleh seorang murid tergantung pada ketekunannya atau pengakuan guru bahwa murid itu telah selesai dalam studinya. Kadang-kadang murid tersebut ingin melanjutkan studinya di Dayah sampai ia sanggup mendirikan Dayahnya sendiri. Dalam kaitan ini, tidak ada penghargaan secara diploma. Oleh Karena itu, setelah belajar dan mendapat pengakuan dari Teungku Chik (pimpinan Dayah) mereka

terjun ke dunia masyarakat dan bekerja sebagai Teungku di *Meunasah-Meunasah*, menjadi da'i atau imam-imam di masjid.

Adapun signifikansi lembaga Dayah itu adalah:

- 1) Sebagai pusat belajar agama (*The central of religious learning*).
- 2) Sebagai benteng terhadap kekuatan melawan penetrasi penjajah.
- 3) Sebagai Agen Pembangunan.
- 4) Sebagai Sekolah Bagi Masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Meunasah, Rangkang dan Dayah sangatlah berbeda pada tingkatannya. Kalau Meunasah pada tingkat rendah, Rangkang pada tingkat menengah sedangkan Dayah pada tingkat tinggi. Jadi pada masa sekarang seperti lembaga pendidikan formal mulai dari jenjang SD, SMP-SMA dan Perguruan Tinggi.

d. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan yang berlaku pada masa Kerajaan Samudera Pasai tentu tidak seperti zaman sekarang. Sistem pendidikan yang berlaku pada saat itu lebih bersifat non-formal, yang berbentuk *majlis taklim* dan *halaqah*. Namun demikian, komponen-komponen pendidikan yang ada pada masa kekuasaan Samudera Pasai pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan komponen-komponen pendidikan yang ada sekarang ini, hanya saja bentuk dan jenisnya masih sederhana. Namun demikian, secara substansial proses pendidikan dapat berjalan dengan sangat baik. Faktor-faktor pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pendidikan

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada saat itu adalah belajar untuk menuntut ilmu sehingga dapat memahami, menguasai, dan mengamalkan ajaran Islam yang sudah diperoleh dari sang guru. Lebih dari itu, mengembangkan ajaran Islam tanpa pamrih. Istilah lainnya ialah tidak berorientasi pada materi, melainkan berorientasi semata-mata menuntut ilmu karena Allah SWT.

2. Pendidik

Pada saat itu yang menjadi pendidik atau guru adalah para saudagar yang sekaligus merangkap sebagai da'i yang berasal dari Gujarat dan Timur Tengah. Mereka antara lain adalah Syekh Ismail dan Syekh Sayid Abdul Aziz. Demikian pula para Sultan Kerajaan Samudra Pasai, mereka ikut mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam kepada segenap rakyatnya.

3. Peserta Didik

Peserta didik pada saat itu adalah tidak terbatas usia, melainkan dari segala usia, yakni mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tidak terbatas pada kalangan tertentu,

melainkan dari berbagai kalangan, mulai dari rakyat biasa/jelata sampai dengan sultan atau raja.

4. Kurikulum dan Materi Pendidikan

Materi pendidikan Islam yang pertama kali diberikan pada peserta didik adalah dua kalimah *syahadat*. Ucapan itu dilakukan meskipun dengan bahasa sendiri. Setelah mereka mengucapkan dua kalimah *syahadat* yang berarti telah masuk Islam barulah mereka diberikan pelajaran selanjutnya, yaitu membaca Alquran, dan cara melaksanakan salat pada tingkat yang lebih tinggi. Materi yang diajarkan yaitu, pengajian kitab-kitab fiqh yang bermadzhab imam *Syafi'i*, seperti: *takrib, sulam taufiq*, bahkan terdapat pula pengajian yang dilakukan secara berkala pada setiap selesai salat Jum'at berupa pengajian kitab-kitab yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu kitab *Ihya Ulumuddin, Al Um*, dan lain-lain. Materi Alquran yang diajarkan untuk tingkatan yang sudah bisa membaca huruf Arab adalah berupa pengajian *Tafsir Jalalain*. Selain materi tersebut, sudah barang tentu para syekh mengajarkan tentang akidah dan akhlaq.

5. Metode Pendidikan

Metode yang digunakan dalam pendidikan pada masa tersebut ialah *halaqah*, metode ceramah, metode oral (membaca), kemudian pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi digunakan metode diskusi.

6. Sarana Pendidikan

Berkaitan dengan sarana yang digunakan dalam pendidikan yaitu masjid. Kemudian pada masa kerajaan ini sudah ada lembaga pendidikan Meunasah, Rangkang dan Dayah.

7. Biaya Pendidikan

Mereka belajar dan mengajar semata-mata ikhlas karena ingin mendapat ridha dari Allah SWT. Mereka belajar untuk menuntut ilmu. Mereka mengajar untuk meningkatkan dan mengembangkan kalimat tauhid. Oleh karena itu, tidak mengharapkan imbalan berupa materi. Kendatipun demikian, masyarakat tentu memahami dan mengerti akan kebutuhan-kebutuhan para syekh yang notabene adalah manusia yang tetap membutuhkan makan dan minum serta tempat untuk berteduh. Oleh karena itu, secara sukarela masyarakat tentu mengeluarkan berbagai macam hadiah atau pemberian kepada para guru tersebut, terutama dalam bentuk hasil pertanian, jamuan-jamuan dan sebagainya. Hal yang paling penting lagi adalah bahwa pendidikan pada saat itu dibiayai oleh negara/kerajaan, sehingga masyarakat secara resmi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar guru.

8. Waktu Belajar

Waktu yang digunakan untuk mempelajari atau mengerjakan pendidikan sesungguhnya tidak mengikat. Pendidikan dapat berjalan kapan dan di mana saja.

Pendidikan dapat berlangsung pagi, siang, sore atau bahkan malam hari. Namun secara khusus terutama yang terjadi di kalangan kesultanan, waktu-waktu belajar dapat dilakukan sebagai berikut: siang hari khususnya setelah salat Jum'at, sore hari (ba'da ashar), malam hari (ba'da maghrib/isyah). Adapun metode yang digunakan, khususnya di kalangan istana adalah diskusi.

Pada akhirnya Kerajaan Samudera Pasai hancur pada tahun 1512 M, tepatnya pada masa Kesultanan Aceh mulai berkuasa. Pendidikan mengalami kemajuan pesat pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan pada masa Kerajaan Samudera Pasai masih bersifat non-formal, yang berbentuk *majlis taklim* dan *halaqah* atau lebih sederhana dan masih bersifat tradisional.

2. Pendidikan Islam Masa Kesultanan Aceh

Catatan sejarah mencatat bahwa Kesultanan Aceh Darussalam mulai berdiri pada sekitar abad ke-16 M yang berasal dari penyatuan kerajaan-kerajaan kecil yang berada di sekitaran pantai utara sampai barat laut Aceh (Sunny, 1980, p. 31). Kesultanan Aceh berdiri pada saat Kerajaan Samudera Pasai mulai mengalami masa kemunduran. Pada saat itu Samudera Pasai mendapat serangan dari Majapahit pada sekitar pertengahan abad ke-14 M. Pada periode akhir kerajaan Islam pertama di Nusantara itu, maka benih-benih kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam mulai muncul. Kesultanan Aceh berdiri di atas puing-puing kerajaan yang beraliran Hindu-Budha, seperti: Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri) (Usman, 2003, p. 10).

Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1496 M yang sebelumnya telah dirintis pada abad ke-15 M oleh Sultan Mudzaffar Syah. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidie, dan Nakur. Pada tahun berikutnya (1524 M), wilayah Samudera Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan wilayah Kerajaan Aru. Dapat dikatakan bahwa Kesultanan Aceh merupakan pelanjut dari Kerajaan Samudera Pasai untuk membangkitkan dan meraih kembali kegemilangan kebudayaan Aceh yang pernah dicapai sebelumnya.

Pada awalnya, wilayah Kesultanan Aceh hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar. Tetapi pada saat pemerintahan keterangan mengenai keberadaan Kesultanan Aceh Darussalam semakin terkuak dengan ditemukannya batu nisan yang ternyata adalah makam Sultan Ali Mughayat Syah. Pada batu nisan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang berada di kompleks Kandang XII Banda Aceh ini, disebutkan bahwa Sultan Ali Mughayat Syah meninggal dunia pada 12 Dzulhijah 936 H atau bertepatan 7 Agustus 1530 M. Berdasarkan penelitian batu-batu nisan yang berhasil ditemukan,

diketahui bahwa Sultan Firman Syah pernah menjadi sultan di Kesultanan Aceh yang memerintah di Ibu Kota Kutaraja (Banda Aceh) (Said, 1981, p. 99).

a. Pusat Studi Kesultanan Aceh

Kesultanan Aceh dikenal menjadi “pusat studi keislaman (*center for Islamic studies*)” di kawasan Asia Tenggara (Hall, 1988). Prestasi ini tentu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi karena telah dicapai melalui berbagai bentuk kerja keras dari berbagai pihak yang dipadukan dengan tradisi pengetahuan dan keilmuan di bidang pembelajaran yang panjang serta berkesinambungan, maka pusat studi keislaman di Aceh dapat mencapai puncaknya pada abad ke-17 M.

Pada masa tersebut, ibu kota Kesultanan Aceh Kutaraja (Banda Aceh) merupakan salah satu kota yang menjadi pusat kegiatan pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan di kawasan Asia Tenggara. Tiga tempat utama di ibu kota kerajaan yang menjadi pusat kegiatan pendidikan, ialah: Masjid Baiturrahim, Masjid Baitul Musyahadah, dan Masjid Jamik Baiturrahman (Hasymy, 1975, p. 19). Banyak para pelajar yang menuntun ilmu di tempat-tempat ini berasal dari berbagai negeri yang ada di Asia Tenggara. Di sisi lain kemajuan telah diperoleh oleh Kesultanan Aceh dalam bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan. Kesultanan Aceh juga terkenal sebagai daerah yang merupakan salah satu pusat perdagangan muslim dan tempat berkumpulnya para pemikir (kaum cendikiawan dan ulama-ulama) (Kartodirdjo, 1988, p. 316).

Selain ketiga pusat studi di atas, ada beberapa lembaga yang didirikan oleh Kesultanan Aceh untuk mengembangkan pengetahuan dan pendidikannya. Di antara lembaga-lembaga kajian ilmiah yang dijadikan sebagai pusat studi tersebut ialah:

- a. Balai Sertia Ulama' (jawatan pendidikan).
- b. Balai Jama'ah Himpunan Ulama, yang merupakan studi klub yang beranggotakan para ahli agama.
- c. Balai Sertia Hukama' (lembaga pengembangan ilmu pengetahuan).

Adapun dalam rangka mencerdaskan rakyatnya, Kesultanan Aceh membangun beberapa sarana-sarana pendidikan untuk semua tingkatan pendidikan. Bentuk lembaga pendidikan yang terdapat di Kesultanan Aceh, meliputi:

- a. Meunasah (setingkat SD atau madrasah Ibtidaiyah).
- b. Rangkang (setingkat SMP atau madrasah Tsanawiyah).
- c. Dayah (setingkat SMA atau madrasah Aliyah).
- d. Dayah Teungku Chik (setingkat Perguruan Tinggi), yang didirikan oleh para ulama yang mengajarkan tafsir, tasawuf dan lain sebagainya (Kartodirdjo, 1988, p. 318).

b. Intelektualisme

Intelektualisme diartikan sebagai suatu pemahaman yang menggunakan daya pikir serta pencarian terhadap suatu ilmu yang diklarifikasikan berdasarkan bidang yang ditekuninya. Dengan demikian intelektualisme mengharuskan adanya akal atau kecerdasan otak untuk berpikir secara rasional. Berkenaan dengan intelektualisme yang berada di Kesultanan Aceh tidak terlepas dari beberapa gagasan pemikiran para tokoh dan ulama yang memiliki intelektualitas yang tinggi, terutama dalam bidang pendidikan.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Kesultanan Aceh menjadi pusat ilmu pengetahuan di wilayah Asia Tenggara yang banyak melahirkan para intelektual muslim yang terkenal. Di antara para intelektual muslim yang terkenal dari Aceh ialah: Hamzan Fansuri (w. 1600 M), Syamsuddin al-Sumatrani (w. 1630 M), Nuruddin al-Raraniri (w. 1657 M), dan Abdul Rau'uf as-Singkili (w. 1660 M). Berikut penulis sajikan biografi para intelektual tersebut:

1. Hamzah Fansuri

Dalam kajian mengenai mata rantai diskursus keislaman di Aceh ketika itu patut disebut Hamzah Fansuri. Pemikir, sastrawan, dan penganut paham Wujudiyah ini merupakan simbol dari kelanjutan budaya dan tradisi intelektual keislaman di Kesultanan Aceh ketika itu. Perannya di kerajaan tidak hanya terlihat dalam bidang intelektual, keagamaan, tetapi juga dalam bidang politik dan ekonomi. Kenyataan bahwa ajaran Wujudiyah yang ia kembangkan sangat populer ketika itu menunjukkan bahwa diskursus keagamaan sangat intens. Pada masanya John Davis menyaksikan bahwa “masyarakat Aceh adalah muslim, mereka mendidik anak-anak mereka, dan memiliki lembaga pendidikan (sekolah) yang banyak” (Davis, 1880, p. 151).

Aliran keagamaan ini kelihatannya mendapat dukungan dari pusat kekuasaan. Kedekatan tokoh ini dengan para penguasa dibuktikan tidak hanya oleh perannya dalam bidang ekonomi dan politik, akan tetapi juga dalam bidang intelektual (Hadi, 2018). Hamzah Fansuri menulis sebuah karya yang berjudul *Ikatan-Ikatan 'Ilmu al-Nisâ'*, sebuah karya sajak yang mengandung ajaran sufi, atas perintah Sultan Sayyid al-Mukammil, atau paling tidak didedikasikan kepadanya (Al-Attas, 1967, p. 49).

2. Syamsuddin al Sumatrani

Syamsuddin al-Sumatrani adalah seorang tokoh penganut ajaran Wujudiyah. Hubungan intelektualnya dengan Hamzah Fansuri diakui oleh para sarjana, di mana ia dikatakan berguru pada Hamzah, atau paling tidak memiliki hubungan intelektual dengannya. Kapasitas intelektualnya telah membawa A.H. Johns untuk menulis bahwa Syams al-Dîn adalah “putra Melayu pertama yang telah mewariskan banyak karya dalam bahasa Arab dan sejumlah karya yang berbentuk prosa dalam bahasa Melayu” (Nieuwenhuijze, 1945).

Adapun beberapa data yang berdasarkan informasi akurat tidak didapat mengenai aktivitas intelektual di kerajaan, terutama di istana, ketika itu. Namun, dapat diasumsikan bahwa hal ini juga dilakukan oleh penguasa. Hal ini dapat diperkuat oleh kenyataan bahwa Iskandar Muda merupakan murid dari Syamsuddin al-Sumatrani. Di antara sejumlah karya yang ia tulis, dua di antaranya didedikasikan kepada Iskandar Muda. Kedua karya tersebut ditulis sebagai panduan awal dalam tasawuf, yang berjudul *Thariqat al-Salikîn* dan *Nûr al-Daqâ'iq* (Nieuwenhuijze, 1953, p. 142).

3. Nuruddin ar-Raniri

Dalam bidang tasawuf, Nuruddin Ar-Raniry yang hidup pada masa Sultan Iskandar Tsani adalah pengembang tarekat Rifa'iyah di Aceh. Karya-karya beliau dalam bidang tasawuf di antara lain *Nubzah Fi Dakwazil Mada Shahibin*, *Hilluz Zil*, *Syifaul Qulub*, *Fathul Mubin'AlaI Mulihidin*, *Tambihul Awamili fi Tahqiqil Kalami fi Nawafil*, *Rahiqul Muhammadiyah fi Thariqish Shufiyah*, dan lain-lain (Mulyati, 2006, p. 78).

4. Abdurr Rauf as-Singkili

Abdurrauf as-Singkili atau dikenal juga dengan Teungku Syiah Kuala hidup di masa Sultanah Safiatuddin, istri dari Sultan Iskandar Tsani. Beliau adalah pengembang tarekat Syattariah yang kemudian berkembang di Sumatera Barat hingga Selatan. Di antara karya-karya beliau di bidang tasawuf ialah *Daqaiq al-Huruf*, *Tanbih al-Masyi*, dan *Umdat al-Muhtajin fi Waslak al-Mufradin* (Nata, 1998, p. 98). Perkembangan tasawuf selanjutnya diteruskan oleh ulama-ulama yang datang sesudahnya seperti Syeikh Abdullah Al-Asyi, Syeikh Muhammad Zein, Syeikh Muhammad bin Ahmad Khatib, dan juga Syeikh Abuya Muda Wali yang mendirikan Pesantren di Labuhan Haji, Aceh Selatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelaslah bahwa Kesultanan Aceh selain dikenal sebagai pusat studi Islam yang terkenal di Asia Tenggara juga menjadi tempat lahirnya para pemikir atau cendekiawan muslim yang mampu memberikan berbagai gagasan serta karyanya terutama di bidang ilmu pengetahuan Islam.

c. Literatur Islam

Berkaitan dengan literatur keislaman terutama di bidang pendidikan para ulama Aceh banyak terlibat dalam karya di bidang keagamaan yang dipakai dan tersebar luas di Asia Tenggara. Syaikh Abdur Rauf menerbitkan terjemahan dari *Tafsir Alqur'an Anwaarut Tanzil wa Asrarut Takwil*, karangan Abdullah bin Umar bin Muhammad Syirazi Al Baidlawy ke dalam bahasa Jawi.

Kemudian ada Syaikh Daud Rummy menerbitkan *Risalah Masailal Muhtadin li Ikhwanil Muhtadi* yang menjadi kitab pengantar di Dayah sampai sekarang. Syaikh Nuruddin Ar-Raniry setidaknya menulis 27 kitab dalam bahasa Melayu dan Arab, yang paling terkenal adalah *Sirath al-Mustaqim*, kitab fiqh pertama terlengkap dalam bahasa Melayu (Hasjmy, 1999, p. 131).

Adapun literatur lainnya yang berupa kitab-kitab yang muncul dalam literatur Islam di Kesultanan Aceh seperti, *Bustān Salātin*, *Tāj Salātin*, dan *Mābayna Salātin*. Ada juga karya lain yang ditulis bukan di Aceh, namun pernah menetap di Aceh, yakni kitab *Sulalāt Salātin*, karya Tun Sri Lanang (R. H. Ismail, 2012, p. 57).

Walaupun ada yang mengatakan bahwa hikayat-hikayat tersebut ditulis dalam bahasa Melayu, namun tidak sedikit pula pemikiran politik Aceh yang disajikan dalam hikayat-hikayat yang berbahasa Aceh, seperti *Hikayat Malem Dagang* yang dikenal juga dengan *Hikayat Meukuta Alam* atau *Hikayat Iskandar Muda* (R. H. Ismail, 2012, p. 58).

d. Bahasa Melayu sebagai Bahasa Agama

Kedatangan Islam membawa pengaruh besar di Aceh, terutama dalam bidang bahasa maupun kesusasteraan, dikarenakan adanya sumbangan agama Islam dalam pembentukan dan perkembangan bahasa Melayu sangat besar, yaitu dengan meningkatnya taraf sebagai alat pengucapan intelektual dan sekaligus sebagai *lingua franca* untuk berhubungan dengan berbagai suku bangsa di Aceh. Bahasa Melayu muncul sebagai bahasa pengantar bahkan sebagai bahasa sarjana dan para cendekiawan yang terkemuka. Sejalan dengan pengangkatan taraf bahasa Melayu itu ialah pengenalan *abjad Arab Jawoe (Jawi)*, dan melalui *abjad Arab* barulah bahasa Melayu menjadi sebagai bahasa sastra yang populer (Abdullah, 1990, p. 107).

Sastra sebagai salah satu penanda kebudayaan juga relatif mudah diketahui karena sastra menggunakan media bahasa yang kemudian dituliskan, misalnya seperti naskah-naskah yang ditulis dalam bahasa Melayu. Naskah sebagai sumber penelitian bahasa dan sastra yang terkandung di dalamnya sumber berbagai bahasa, Arab, Melayu, Parsi dan lainnya. Begitu halnya dengan *Hikayat Raja Pasai* yang merupakan salah satu naskah yang ditulis dalam bahasa Melayu. *Hikayat Raja Pasai* termasuk karya sastra lama yang tergolong dalam genre sastra sejarah juga disebut sebagai karya agung. Karya sastra sejarah biasanya menceritakan pembukaan negeri, corak organisasi pentadbiran, keadaan sosial-budaya dan corak politiknya. Karya sastra adalah refleksi pengarang tentang hidup dan kehidupan yang dipadu dengan gaya imajinasi dan kreasi yang didukung oleh pengalaman dan pengamatannya atas kehidupan tersebut (Djojuroto, 2006, p. 167).

Hakikat karya sastra adalah bercerita yang merupakan bentuk dari hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Karya sastra merupakan refleksi dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya merupakan suatu hal yang penting dan sudah menjadi keseharian dalam masyarakat, baik itu sebagai kebutuhan maupun hanya sekedar sebagai hiburan.

Hikayat Raja Pasai menceritakan kisah raja-raja di negara Islam pertama di Asia Tenggara kini yang bernama Pasai. HRP dianggap hasil kesusasteraan Melayu, mengisahkan masyarakat Melayu dan menggunakan bahasa Melayu (tulisan Jawi).

Tidak dapat dipastikan tarikh awal hikayat ini ditulis karena pada masa itu tradisi menceritakan semula cerita orang lain (seperti yang dilakukan pada cerita lisan) berlaku dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dalam sejarah sastra Islam di Nusantara, *Hikayat Raja Pasai* merupakan karya sastra sejarah tertua yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi antara tahun 1250–1350 M. Zaman ini adalah masa pemerintahan Raja Meurah Silu yang kemudian masuk agama Islam dan menggantikan namanya dengan Malikul Saleh.

3. Pendidikan Islam Masa Kesultanan Mataram Islam

Kerajaan Mataram Islam bermula dari tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang terhadap Ki Pemanahan sebagai balas jasa karena telah membantu Sultan Pajang untuk menghadapi perlawanan Arya Penangsang. Tanah perdikan yang diberikan Sultan Adiwijaya kepada Ki Pemanahan masih hutan yang dikenal dengan nama alas mentaok. Kurang lebih tujuh tahun Ki Pemanahan membangun Mataram Islam dan memindahkan pusat kekuasaannya di Kota Gede. Setelah Ki Pemanahan membangun Mataram Islam, kemudian ia menamakan dirinya sebagai Ki Ageng Mataram, meskipun Mataram masih di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Lambat laun Mataram berkembang menjadi kerajaan yang melebihi Kerajaan Pajang pada masa Panembahan Senapati (Santosa et al., 2008, pp. 4–5).

Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1584 M, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya yang ternyata memiliki bakat sebagai ahli strategi perang. Sutawijaya berhasil memegang penuh Kerajaan Mataram setelah melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Pajang dan menjadikan Kerajaan Mataram sebagai kerajaan yang mempunyai kekuasaan penuh atas kerajaannya. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada tahun 1578–1588 M. Dengan demikian Sutawijaya berhasil mengalami proses mobilitas vertikal dalam bahasa Jawa disebut dengan ungkapan: “*tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati, yang berarti keturunan rakyat jelata menjadi kelas penguasa.*” Sutawijaya memproklamkan Mataram sebagai Kerajaan Islam yang berdiri sendiri dan ia menggunakan gelar *Senapati Ing Alaga Sayidin Panatagama*. Semenjak itulah Sutawijaya dikenal dengan nama Panembahan Senapati, pemakaian gelar pada waktu itu penting karena dalam masyarakat Jawa, pemakaian gelar mempunyai efek sosial yang kuat. Martabat seorang bisa naik karena gelar, karena itu pemakaian gelar dimanfaatkan dan disesuaikan dengan kondisi politik serta perkembangan pengertian gelar dalam masyarakat. Dalam hal ini Panembahan Senapati menggunakan gelar tersebut sebagai legetimasi bahwa ia adalah penguasa kerajaan dan agama di Kerajaan Mataram Islam (Moerton0, 1985, pp. 21–22).

Kesultanan Mataram merupakan Kerajaan Islam yang berada di pedalaman Jawa yang dipimpin oleh Panembahan Senapati pada tahun 1584–1601 M. Pada masa kekuasaan Panembahan Senapati, Islam Sudah banyak dianut oleh penduduk di Kerajaan Mataram, hanya saja pola keagamaannya cenderung sinkretisme. Sebagai raja

di Kerajaan Mataram, Panembahan Senapati menjadikan Agama Islam sebagai agama resmi kerajaan (Yusuf, 2006, p. 84).

Kehadiran Islam menjadi semangat baru bagi masyarakat Jawa. Kehadirannya memberikan inspirasi dan aspirasi bagi penataan baru masyarakat dan negara, terutama dalam hubungan sosial antar warga masyarakat, serta hubungan antara negara dengan masyarakat (Hasbullah, 1999, p. 146). Kehadiran Islam di sini tidak hanya menyentuh masalah peribadatan individual dengan berbagai ritual, seperti syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Tetapi mengandung pedoman dan dorongan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tata kehidupan manusia secara menyeluruh. Pandangan agama Islam yang demikian ini membuat para wali dan tokoh agama tidak bisa berdiam diri akan kondisi negara dan masyarakatnya (Hasbullah, 1999, pp. 147-148).

Sebelum era konsolidasi Mataram, tokoh-tokoh suci muslim atau wali membentuk beberapa kerajaan independen yang berpusat di sekitar makam-makam suci seperti halnya yang terdapat di Giri, Cirebon, Kadilangu, dan Semarang. Para tokoh-tokoh muslim tersebut mendirikan masjid, sekolah, dan berdakwah di kalangan masyarakat Jawa. Sedangkan Kerajaan Mataram Islam mewarisi agama dan peradabannya sebagian besar dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kerajaan ini membawa pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa, dengan metode dakwah yang digunakan mampu menarik simpati masyarakat yang pada masa itu masih mayoritas beragama Hindu-Budha (Graaf, 1986, p. 275).

a. Yugosworo dan Tahun Saka

Sejak awal berdirinya Kesultanan Mataram Islam telah dinyatakan sebagai kerajaan yang bercorak Islam. Raja berkedudukan sebagai pemimpin dan pengatur agama. Kedudukan kepemimpinan agama tersebut kemudian diperjelas lagi dengan tambahan gelar *kalifhatullah* (wali Tuhan di dunia). Mataram menerima agama dan peradaban Islam dari kerajaan-kerajaan Islam pesisir yang lebih tua. Misalnya Sunan Kalijaga mempunyai pengaruh yang sangat besar di Mataram. Tidak saja sebagai pembimbing agama, tetapi Senapati juga memandangnya sebagai pembimbing rohani di bidang politik.

Islam dikembangkan oleh guru-guru agama atau orang-orang saleh melalui lembaga-lembaga pendidikan agama yang disebut pesantren. Sejak abad ke-17 M, pesantren nampak berkembang semakin pesat di daerah-daerah pedalaman.

Para penguasa Mataram mengizinkan perkembangan Islam melalui pesantren-pesantren tersebut. Secara politis keputusan ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Mengambil hati pemimpin keramat Islam di Gresik, Sunan Giri, yang memiliki pengaruh yang besar terhadap raja-raja Islam di Jawa Timur, bahkan sampai di Maluku. Pesantren juga merupakan pusat-pusat jaringan ekonomi dan komunikasi yang melibatkan desa dan masyarakat sekelilingnya.

2. Pesantren tidak memiliki organisasi yang menyatukannya, maka Mataram memandang penyebaran Islam melalui pesantren tidak berbahaya. Setelah pertengahan abad ke-17 M, ketika Islam telah jauh menembus pedalaman mulai terasa sebagai ancaman terhadap politik Mataram. Setelah itulah Amangkurat mulai mencurigai para ulama Islam (Daliman, 2012, p. 69).

Pada penanggalan Jawa disebut juga tahun Saka yang memberlakukan perhitungan berdasarkan peredaran bulan sebagaimana kalender Hijriyah. Dalam kalender Jawa terdapat putaran waktu khusus (siklus) yaitu Windu, Pasaran, Selapan dan Wuku. Kalender yang merupakan perpaduan Jawa asli dengan Hindu, dengan nama tahunnya Saka, dipakai oleh orang Jawa sampai tahun 1633 M. Setelah Islam masuk, banyak istilah yang diubah menjadi istilah Islam. Nama hari pada kalender umum di Indonesia dari Ahad sampai Sabtu juga istilah dari Islam (Purwadi, 2006).

Pada zaman Kesultanan Mataram, kalender Jawa Islam dibuat yang merupakan sebuah kalender perpaduan antara budaya Islam, budaya Hindu-Budha Jawa bahkan juga sedikit budaya Barat. Kalender ini dikenal pula dengan Kalender Jawa Sultan Agung. Pada tahun 1625 M, Sultan Agung menyebarkan agama Islam di pulau Jawa dalam suatu wadah negara Mataram memprakarsai untuk mengubah penanggalan Saka. Pada saat Sultan Agung Hanyakrakusuma bertahta, Raja Mataram yang terkenal patuh beragama Islam itu mengubah kalender di Jawa secara revolusioner. Pada waktu itu kalender Saka sudah berjalan sampai akhir tahun 1554 Saka. Angka tahun 1554 Saka itu diteruskan dalam kalender Sultan Agung dengan angka tahun 1955 Saka, padahal dasar perhitungannya sama sekali berlainan. Kalender Saka mengikuti sistem *syamsiyah*, yaitu perhitungan perjalanan bumi mengitari matahari. Sedangkan kalender Sultan Agung mengikuti sistem *qomariyah*, yakni perjalanan bulan mengitari bumi seperti pada kalender Hijriyah (Purwadi, 2006).

b. Kaum Priyayi, Kaum Abangan dan Kaum Santri

Pada masa kekuasaan Panembahan Senapati di Kerajaan Mataram daerah pesisir di bagian tengah meliputi daerah Kudus, Demak dan daerah sekitarnya. Mengenai Islam santri ajaran keimanan Islam, yaitu dengan mengakui Allah SWT sebagai Tuhanya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Kanjeng Nabi (Harun, 1995, p. 575). Masyarakat Jawa yang memadukan ajaran nenek moyangnya (kejawen) dengan Islam juga menganggap Alquran sebagai sumber utama dari segala pengetahuan. Namun orang-orang Islam di Jawa masih kerap melakukan berbagai aktifitas keagamanya sehari-hari yang banyak dipengaruhi oleh keyakinan, konsep-konsep, nilai-nilai, pandangan-pandangan, budaya dan norma-norma yang kebanyakan berada di dalam alam pikirannya (Saifullah, 2010, p. 268).

Pola budaya Islam kejawen pada masa Mataram sama seperti pola budaya kejawen pada zaman Hindu-Budha, hanya agamanya yang beralih dari Hindu-Budha kejawen menjadi Islam kejawen. Islam Jawa mengakar di daerah pedalaman Jawa, terutama

daerah yang masuk ke dalam kekuasaan Kerajaan Mataram, setelah kesultanan Demak mengalami kemunduran dan berlanjut sampai kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Kerajaan Mataram yang berpusat di daerah pedalaman Jawa memang mendapat keuntungan dan kerugian antara Islam pesantren yang ortodoks dan paham Islam Jawa, sehingga terjadi islamisasi Jawa dan jawanisasi Islam semakin kuat. Setelah Mataram berhasil menaklukkan pusat-pusat pengajaran Islam di pesisir utara Jawa, seperti Pasuruan, Tuban, Surabaya, Pati, dan Giri. Islam Jawa lebih menguat dengan mempertahankan warisan budaya dan peradaban kejawen. Berdirinya Kerajaan Mataram menjadi sejarah yang berarti di Jawa terutama dalam bidang keagamaan, kerajaan ini berhasil membangun perpaduan yang harmonis antara Hindu-Islam melalui islamisasi (Nata, 2011, p. 283).

c. Kaum Santri Mendirikan Pesantren

Kata santri berasal dari bahasa India yang artinya guru mengaji, sementara pendapat lainnya menyatakan kata santri berasal dari kata *shastri* (bahasa Sansekerta) yang berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau buku-buku agama dan buku-buku ilmu pengetahuan (Hana, 2018). Namun orang lebih mengenal dua pengertian santri yang secara sempit dan luas. Secara sempit santri berarti murid atau siswa yang sedang belajar ilmu keagamaan Islam di bawah asuhan kyai atau ulama. Secara luas santri berarti seorang muslim yang menjalankan ibadah keagamaannya secara kaffah sesuai dengan syariat Islam yang sesungguhnya. Sejak kehadiran agama Islam di tanah Jawa telah membangun komunitas alternatif berupa komunitas santri sebagai basis masyarakat Islam-jawa.

Kelahiran para wali sebagai ulama terkemuka pendiri pesantren antara lain Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunang Giri, Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Istilah pesantren berasal dari kata *pa-santri-an* yang berarti tempat santri. Biasanya para santri tinggal atau bermukim di sebuah tempat tinggal bersama yang disebut pondok, yang didirikan dekat masjid atau kediaman kyai pengasuhnya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional dengan demikian memiliki ciri penting yaitu santri, kyai, masjid dan pondok. Keempat unsur tersebut sangat erat seperti hubungan antara kyai dan santri, yang menggambarkan hubungan guru dan murid. Dalam pengertian luas pesantren tidak hanya mencakup sebagai lembaga pendidikan agama Islam tradisional akan tetapi juga mencakup pengertian sebuah komunitas muslim yang memiliki identitas, simbol dan tradisi budaya sebagai sebuah sub-kultur Islam di Jawa.

d. Sistem Pendidikan pada Masa Kesultanan Mataram Islam

Pada masa Kesultanan Mataram Islam, pendidikan sangat diperhatikan sedemikian rupa, seakan-akan tertanam semacam kesadaran akan pendidikan pada masyarakat pada waktu itu. Sistem pendidikan pada masa Kesultanan Mataram bersifat non-formal, yang berbentuk *majelis taklim* dan *halaqah*. Namun komponen-komponen pendidikan yang ada pada masa itu tidak jauh berbeda dengan komponen-komponen pendidikan

yang ada sekarang ini, hanya saja bentuk dan jenisnya masih sederhana (Hasbullah, 1999, p. 163).

Namun demikian, secara substansial proses pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Pendidikan

Bisa diputuskan bahwa pendidikan pada saat itu adalah belajar untuk menuntut ilmu supaya dapat memahami, menguasai, dan mengamalkan ajaran Islam yang sudah diajarkan sehingga mampu memberikan pengetahuan tentang agama, bukan untuk memberikan pengetahuan umum.

b. Pendidik

Pada saat itu hampir di setiap desa diadakan tempat pengajian Alquran, yang diajarkan huruf hijaiyah, membaca Alquran, barzanji, pokok dan dasar-dasar ilmu agama Islam dan sebagainya. Adapun cara mengerjakannya adalah dengan cara hafalan semata-mata. Di setiap tempat pengajian dipercayakan kepada beberapa orang dan dibantu oleh beberapa orang modin.

c. Peserta Didik

Peserta didik pada saat itu yakni anak-anak hingga dewasa, sementara itu pada daerah kabupaten diadakan pesantren besar yang dilengkapi dengan pondoknya, untuk kelanjutan bagi santri yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren-pesantren desa. Pesantren ini adalah sebagai lembaga pendidikan tingkat tinggi.

d. Kurikulum dan Materi Pendidikan

Adapun cara yang dipergunakan untuk mengajar kitab ialah dengan sistem sorogan, seorang demi seorang bagi murid-murid permulaan, dan dengan cara melingkar (*halaqah*) bagi pelajar-pelajar yang sudah lama dan mendalami keilmuannya. Kitab-kitab yang diajarkan pada pesantren besar itu ialah kitab-kitab besar dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan kata demi kata ke dalam bahasa daerah dan dilakukan secara *halaqah*. Berbagai macam ilmu agama telah diajarkan di sini, seperti: fiqih, hadits, ilmu kalam, tasawuf dan sebagainya. Selain pesantren besar, juga diselenggarakan semacam pesantren *takhassus*, yang mengajarkan satu cabang ilmu agama dengan cara mendalam atau spesialisasi.

e. Metode Pendidikan

Metode yang digunakan dalam pendidikan di masa tersebut ialah *halaqah*, metode ceramah, metode membaca, dan kemudian pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi digunakan metode diskusi.

f. Sarana Pendidikan

Berkaitan dengan yang digunakan dalam pendidikan yaitu tempat-tempat pengajian di desa dan pondok pesantren pada tingkat tertingginya.

4. Pendidikan Islam Masa Kesultanan Gowa

a. Asal-Usul Kesultanan Gowa

Kesultanan Gowa diperkirakan berdiri pada sekitar abad ke-14 M di wilayah yang dikenal dengan Makassar, oleh sebab itu masyarakat yang berasal dari wilayah ini dikenal berasal dari suku Makassar. Menjelang terbentuknya Kesultanan Gowa, komunitas Makassar terdiri atas sembilan kerajaan kecil yang disebut *Kasuwiyang Salapang* (sembilan negeri yang memerintah), yaitu: (1) Tombolo', (2) Lakiung, (3) Saumata, (4) Parang-Parang, (5) Data', (6) Aagang Je'ne, (7) Bisei, (8) Kalling dan (9) Sero'.

Di antara kerajaan-kerajaan kecil di atas sering terjadi perselisihan yang terkadang meningkat menjadi perang terbuka. Perang dapat diperkecil dengan mengangkat dari kalangan seorang pejabat yang disebut *Paccallaya*, yang berfungsi sebagai ketua dewan di antara kesembilan kerajaan kecil yang menjadi anggotanya. Di samping itu, ia merupakan arbitrator dalam mendamaikan perselisihan yang mungkin timbul di antara *gallarang* (penguasa) kerajaan-kerajaan kecil tersebut (Mahasin, 1996, p. 29). Namun, setiap kerajaan kecil tersebut tetap mempertahankan kedaulatan dan otonominya dalam mengatur pemerintahan sendiri dalam daerahnya. *Paccallaya* sebagai ketua dewan tidak memiliki kewenangan dan kekuatan memaksa dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul. Sehingga, ia tidak bisa menyelesaikan perselisihan secara tuntas, yang menyebabkan kerajaan-kerajaan kecil tersebut tidak pernah merasa tenang, bahkan sering timbul perselisihan yang mengarah kepada ketidakstabilan. Keadaan seperti ini berlangsung terus sampai datangnya Tomanurung yang mempersatukan semua kerajaan kecil itu dalam satu kerajaan besar yang dinamakan *Butta Gowa* (Tanah atau Kerajaan Gowa) (Rahim, 1989, p. 72).

Tomanurung adalah raja pertama dalam silsilah Kesultanan Gowa. Ia dinobatkan sebagai raja berdasarkan kesepakatan antara Tomanurung di satu pihak dan *Paccallaya* bersama dengan *Kasuwiyang Salapang* di pihak lain. *Kasuwiyang Salapang* sebagai raja-raja negeri bersepakat untuk menyerahkan kekuasaan pada Tomanurung sebagai raja. Sebaliknya, *Kasuwiyang Salapang* akan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, seperti masalah perang dan damai. Pelantikan Tomanurung sebagai raja diperkirakan terjadi pada abad ke-14 M. Tidak diketahui secara pasti tentang lamanya Tomanurung berkuasa. *Lontara Makassar*, menyebutkan bahwa ia digantikan oleh putranya bernama Tomassalangga Barayang (Matthes, 1883, p. 137).

Kesultanan Gowa muncul sekitar tahun 1300 M sebagai salah satu dari sekian banyak *chiefdom* agraris di jazirah Sulawesi Selatan. Sejak abad ke-16 M hingga seterusnya, Gowa dan sekutu pesisirnya, Tallo menjadi kekuatan besar pertama yang

mendominasi sebagian besar daerah semenanjung tersebut (Poelinggomang, 2002, p. 62). Pencapaian politik ini dimungkinkan dengan reformasi pemerintahan dan militer secara besar-besaran, termasuk pembentukan birokrasi pertama di Sulawesi Selatan. Oleh sejarawan William P. Cummings, Kesultanan Gowa pada abad ke-16 M dicirikan sebagai sebuah imperium, sementara masa-masa awal kerajaan telah dianalisis sebagai contoh pembentukan negara (Cummings & Worley, 2005, p. 26).

Bukti genealogis dan arkeologis menyiratkan bahwa dinasti Gowa bermula pada sekitar tahun 1300 M dengan perkawinan antara seorang wanita setempat dan kepala suku Bajau, sebuah suku laut yang hidup secara nomaden. Pendirian Gowa merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran masyarakat Sulawesi Selatan yang memicu percepatan intensifikasi pertanian padi lahan basah. Gowa pada masa awal merupakan negara agraris tanpa akses langsung ke tepi laut. Tallo didirikan dua abad kemudian ketika seorang pangeran Gowa melarikan diri ke pesisir setelah kekalahannya dalam sebuah konflik perebutan tahta. Lokasi pinggir laut memungkinkan negara baru ini untuk mengambil keuntungan lebih besar dalam perdagangan maritim dibandingkan Gowa.

Awal abad ke-16 M merupakan titik balik dalam sejarah kedua negara. *Karaeng* (penguasa daerah) Gowa Tumaparisi Kallonna menguasai daerah pesisir dan memaksa Tallo untuk menjadi sekutu muda Gowa. Penerusnya, Tunipalangga menjalankan serangkaian pembaharuan untuk memperkuat otoritas kerajaan dan mendominasi perdagangan di Sulawesi Selatan. Perang-perang penaklukan Tunipalangga didukung dengan adopsi senjata api dan inovasi dalam pembuatan senjata lokal. Pengaruh Gowa melingkupi jangkauan wilayah yang belum pernah ada tandingannya dalam sejarah Sulawesi, kekuasaan sang raja dapat dirasakan mulai dari Minahasa hingga Selayar. Walaupun menjelang akhir abad ke-16 M, kampanye militer Gowa demi menetapkan hegemoni mengalami kemunduran, kerajaan ini terus bertumbuh dalam hal kesejahteraan ekonomi dan kompleksitas pemerintahan. Fase awal sejarah Gowa dan Tallo dianggap berakhir pada tahun 1593 M, ketika seorang Karaeng Gowa yang bertindak sewenang-wenang digulingkan dan mangkubumi Karaeng Matoaya menjadi penguasa *de facto* Gowa (Cummings & Worley, 2005, p. 27).

b. Sejarah Masuknya Islam di Gowa

Sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan hampir pasti selalu dikaitkan dengan datangnya tiga ulama dari Minangkabau, yaitu: Datuk ri Bandang, Datuk ri Tiro dan Datuk ri Patimang. Hal ini dapat dimaklumi karena titik pijaknya adalah ketika Islam secara resmi diakui sebagai agama negara oleh Kesultanan Gowa. Kalau ini dijadikan dasar pijakan, maka Islam datang ke Sulawesi Selatan pada tahun 1605 M, setelah kedatangan tiga orang ulama tersebut. Tetapi kalau titik pijaknya adalah kedatangan para sayyid atau keturunan Nabi, maka jejak-jejak keislaman di Sulawesi Selatan sudah ada jauh sebelum itu, yaitu pada tahun 1320 M dengan kedatangan sayyid pertama di Sulawesi Selatan yakni Sayyid Jamaluddin al-Akbar Al-Husaini. Sayyid Jamaluddin al-

Akbar adalah kakek kandung dari empat ulama penyebar Islam di Jawa yang lebih dikenal dengan Wali Songo, yaitu: Sayyid Maulana Malik Ibrahim, Sayyid Ainul Yaqin atau Sunan Giri, Sayyid Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati (Duli et al., 2013).

Sekalipun para pedagang muslim sudah berada di Sulawesi Selatan sejak akhir abad ke-15 M, tidak diperoleh keterangan yang pasti, baik dari sumber lokal maupun sumber dari luar, tentang terjadinya konversi ke dalam Islam oleh salah seorang raja setempat pada masa itu. Sebagaimana yang terjadi pada agama Katolik, inilah salah satu faktor pendorong para pedagang Melayu untuk mengundang tiga orang muballigh dari Koto Tangah Minangkabau agar datang ke Makassar untuk mengislamkan petinggi Kerajaan Gowa dan Tallo. Motivasi lain yang mendorong para saudagar Melayu dalam mengambil keputusan mendatangkan tiga pendakwah ke Makassar adalah untuk mengimbangi Katolik. Para misionaris telah berusaha menyebarkan pengaruhnya ke dalam istana Kerajaan Gowa. Persaingan antara misionaris Katolik dan para pedagang muslim telah lama berlangsung (Sewang, 2005, p. 28).

Pada penghujung abad ke-17 M, kapal yang membawa Datuk ri Bandang (Abdul Makmur, Khatib Tunggal), Datuk ri Tiro (Abdul Jawad, Khatib Bungsu) dan Datuk ri Pattimang (Sulaiman, Khatib Sulung), merapat ke bandar Somba Opu milik Kerajaan Gowa-Tallo. Sejumlah catatan menyebutkan bahwa Islam sudah ada di Sulawesi Selatan waktu itu, meski penyebarannya belum pesat. Tiga abad sebelum mereka, sudah ada Sayyid Jamaluddin al-Akbar al-Husaini, seorang ulama asal Malabar di India, yang berdiam di Kerajaan Wajo sejak tahun 1320 M.

Setelah tiba di Makassar, mereka rupanya tak langsung melakukan aktivitas syiar Islam. Pengamatan dan pembacaan kondisi masyarakat dan politik kerajaan di Sulawesi Selatan waktu itu jadi hal utama. Beberapa keterangan diperoleh, antara lain Datuk Luwu adalah raja paling dihormati sebab posisi Kerajaan Luwu sebagai kerajaan tertua dan disebut sebagai asal leluhur para raja-raja di Sulawesi Selatan. Sementara yang paling kuat adalah Raja Gowa dan Raja Tallo.

Berbekal informasi tersebut, mereka kemudian berangkat ke Luwu untuk menemui sang Datuk Luwu yang berkuasa waktu itu, La Patiware Daeng Parabu dengan gelar *Petta Matinroe' ri Malangke* (1587 M-1615 M). Menurut naskah *Lontara Wajo*, sang petinggi Luwu kemudian memeluk agama Islam pada 15 Ramadan 1013 H atau tahun 1603 M. Tak lama kemudian, menyusul para petinggi dari Kerajaan Gowa-Tallo, salah satunya yakni I Malingkaan Daeng Mayonri (1539 M-1623 M), Ia kemudian digelari Sultan Abdullah Awalul Islam oleh ketiga Datuk, sekaligus menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan sejak 1605 M.

Setelah para petinggi dari dua kerajaan berpengaruh di Sulawesi Selatan memeluk Islam, para datuk itu kemudian berpencar membagi tempat dakwah menurut kondisi sosial dan kemampuan mereka. Hal tersebut dikemukakan dalam buku *Sistem Nilai*

Islam dalam Budaya Bugis-Makassar yang ditulis oleh Abdullah Hamid, salah satu peneliti dan sejarawan yang fokus terhadap dinamika masyarakat lokal Sulawesi Selatan. Datuk ri Bandang yang ahli ilmu hukum dan syariat Islam bertugas di wilayah Gowa-Tallo. Waktu itu, masyarakatnya masih kerap melakukan judi, minum *ballo'* (minuman keras tradisional) dan sabung ayam.

Datuk Pattimang yang ahli tauhid atau konsep keesaan bertugas di Luwu, lantaran masyarakatnya masih memegang sistem kepercayaan lama yakni menyembah *Dewata Seuwae*. Datuk Pattimang disebut mengajarkan hal-hal sederhana seperti sifat-sifat Tuhan. Datuk ri Tiro yang menguasai ilmu tasawuf atau sufisme bertugas di Bulukumba, bagian selatan. Waktu itu, masyarakatnya masih percaya terhadap hal-hal berbau kebatinan dan sihir. Sebuah riwayat menyebut jika Datuk ri Tiro mengakhiri masa kekeringan di wilayah tersebut dengan memunculkan mata air usai menancap tongkatnya ke tanah. Datuk Patimang bernama asli Datuk Sulaiman, juga bergelar Khatib Sulung.

Datuk Ri Bandang bernama asli Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal dan Datuk Ri Tiro bernama asli Nurdin Ariyani dengan gelar Khatib Bungsu. Dalam catatan sejarah, mereka tiba pertama kali di Kota Makassar pada abad ke-16 M. Awalnya, Raja Tanete di Barru mengirim utusan ke tanah Minang (Sumatera Barat sekarang), meminta ketiga ulama Minang tersebut untuk datang menyebarkan Islam di daerahnya. Ketiga ulama tersebut pun bersedia mengembara ke Sulawesi Selatan. Setiba di Makassar, ketiganya menyebar ke titik berbeda. Pemilihan tempat itu berdasarkan keahlian ilmu agama mereka miliki dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

Menurut sejarah, raja pertama yang masuk Islam adalah Raja Luwu, *La Patiware Daeng Parabu*. Berdasarkan catatan sejarah lokal, Raja Luwu masuk Islam pada pada 15 Ramadhan 1013 H atau tahun 1603 M. Cerita ini masih turun temurun dikisahkan ke anak cucu mereka, konon kabarnya proses pengislaman Raja Luwu diawali dengan adu kesaktian. Datuk Ri Bandang yang berdakwah di Makassar juga berhasil mengajak Raja Tallo untuk masuk Islam. Pada tahun 1605 M, Raja Tallo I Malingkang Daeng Manyonri Karaeng Katangka mengucapkan dua kalimat syahadat. Raja Tallo tersebut pun masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Secara resmi, Islam menjadi agama kerajaan pada tahun 1607 M. Tahun inilah, Sultan Alauddin mengirim utusan damai ke raja-raja sekitarnya untuk menerima Islam.

Sebelum para Wali Songo menyebarkan Islam di Jawa, Jamaluddin al-Husaini telah memulainya dan konon Wali Songo sempat berguru kepadanya. Ketika Datuk ri Bandang hendak memenuhi undangan Raja Gowa untuk menyebarkan Islam di kerajaannya, terlebih dahulu meminta pertimbangan gurunya Sayyid Ainul Yaqin atau Sunan Giri. Sang guru tentu saja gembira mengingat agama Islam telah dibawa terlebih dahulu oleh kakeknya, Sayyid Jamaluddin al-Husaini pada tahun 1320 M di daerah Bugis Sulawesi Selatan (Assegaf, n.d., p. 26).

Jamaluddin al-Husaini tidak pernah bersentuhan langsung dengan kerajaan Gowa-Tallo yang diketahui merupakan salah satu kerajaan yang terbesar saat itu di Sulawesi Selatan sehingga proses islamisasi di Sulawesi Selatan tidak dikaitkan dengan dirinya. Sejarah islamisasi di Sulawesi Selatan sesungguhnya tidaklah tunggal, yang menarik kemudian, dalam beberapa versi “resmi” tentang masuknya Islam di Kesultanan Gowa-Tallo disebutkan bahwa sebelum Datuk ri Bandang tiba di Tallo, Raja Tallo Sultan Abdullah diberitakan telah memeluk Islam. Setelah tamunya datang ke Tallo, sultan pun menemui tamu itu yang tak lain adalah Datuk ri Bandang.

Ada perbedaan model dakwah yang dikembangkan oleh Jamaluddin al-Husaini dengan Datuk ri Bandang dan para ulama lainnya. Ketika tiba di Tosora Wajo, dia dan para pengikutnya justru tidak mendakwahkan Islam. Sayyid Jamaluddin justru mengadakan pencak silat secara tertutup dengan para pengikutnya. Masyarakat sekitar pun ingin mengetahui pertemuan apa gerangan yang diadakan tiap sore itu. Akhirnya tersiarlah kabar bahwa yang dilakukan tamu-tamu itu adalah permainan langka yang dalam bahasa Bugis berarti suatu permainan gerakan yang bisa menjadi pembelaan diri bila mendapatkan serangan musuh. Karena yang memainkan permainan langka itu orang Arab (keturunan Arab) sehingga masyarakat setempat menamainya dengan langka Arab. Masyarakat pun kemudian memohon menjadi anggota agar dapat ikut dalam permainan langka itu. Karena permainan latihan berlanjut hingga malam hari, selepas magrib, Sayyid Jamaluddin dan rombongannya salat. Masyarakat setempat yang ikut latihan juga turut salat meskipun sekadar latihan. Lama-kelamaan, masyarakat yang mengikuti permainan tersebut banyak yang masuk Islam.

Ke arah selatan dari Kota Makassar, terdapat sebuah daerah bernama Gowa. Awalnya, Gowa merupakan nama kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan. Setelah Indonesia merdeka, Gowa dijadikan nama kabupaten. Di Kabupaten Gowa, tepatnya di Kecamatan Barrongbong, Kelurahan Somba Opu, dapat dijumpai sebuah situs bersejarah berupa benteng peninggalan Kerajaan Gowa bernama Benteng Somba Opu.

Menurut sejarah, Benteng Somba Opu merupakan benteng utama Kerajaan Gowa. Benteng ini didirikan oleh Raja Gowa IX yang bernama Karaeng Tu Mapa'risi Kallonna yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin dan raja-raja setelahnya. Pembangunan benteng ini bertujuan melindungi Kota Somba Opu dari serangan Belanda. Benteng Somba Opu berbentuk persegi dengan luas sekitar 15 ha. Sisi-sisi benteng ini berukuran 2 km dengan tinggi sekitar 7-8 meter dan ketebalan 12 kaki. Di tiap bagian ujung benteng, terdapat pagar tinggi yang terbuat dari batu tanah liat. Di dalam benteng ini, terdapat rumah adat dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

c. Sistem dan Lembaga Pendidikan di Kesultanan Gowa

Sistem pendidikan di Kesultanan Gowa tidak jauh beda dengan sistem pendidikan di tempat-tempat lainnya yang masih menggunakan sistem tradisional. Bentuknya berupa lembaga madrasah tetapi masih sangat sederhana. Lembaga ini hanya

mempelajari tentang menulis Alquran, dan hukum tentang bersuci ketika hendak menghadap Tuhan (Kodir, 2015, p. 168).

Di Kesultanan Gowa juga terdapat sejumlah pesantren yang berdiri dan berkembang pesat. Pada tahap awal pesantren dan surau dengan model lama sebagaimana yang terdapat di Sumatera dan Jawa, secara berangsur-angsur berdirilah madrasah menggunakan sistem klasikal yang dilengkapi bangku, kursi, meja dan papan tulis (Nata, 2011, pp. 269–270).

1. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan pada masa Kesultanan Gowa tidak lain adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam mengingat saat itu masyarakat Gowa banyak yang memiliki iman yang lemah sehingga mereka leluasa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

2. Pendidik

Pendidik saat itu merupakan ketiga ulama yang mengunjungi Gowa dan berhasil mengislamkan kerajaan kembar orang Makassar, Gowa dan Tallo. Pengajaran Islam dilanjutkan oleh ketiga ulama ini dengan memilih lokasi tertentu yang dianggapnya kuat berpegang pada tradisi. Datuk ri Bandang mengunjungi daerah-daerah Makassar dan Bugis yang kuat melakukan perjudian, minum *ballo'* (tuak) banyak melakukan perzinahan dan banyak makan riba. Bagi penduduk setempat, Datuk ri Bandang melakukan pendekatan syari'at, yaitu dakwah lebih banyak diberikan kepada mereka tentang hukum syari'at Islam yang mengharamkan minuman keras, perjudian dan makan babi. Pendekatan syari'at pula diberikan kepada mereka tentang hari pembalasan, tentang neraka dan surga, oleh karena itu Dato' ri Bandang dijuluki ahli hukum syari'at (fikih) oleh beberapa penulis (Mattulada, 1983, p. 340).

3. Peserta Didik

Peserta didik saat itu adalah masyarakat sekitar. Sulaiman Khatib Sulung Dato' Patimang (dimakamkan di Desa Pattimang, Luwu), mengunjungi daerah Bugis dan Makasar dan kemudian menetap di Luwu. Beliau mengadakan pendekatan kepada penduduk yang kuat berpegang pada kepercayaan lama yang menganggap Tuhan itu adalah *Dewata Seuwae*. Mula-mula beliau mengajarkan tauhid, yaitu pengetahuan tentang sifat-sifat Allah SWT yang terdiri dari 20 sifat wajibnya, 20 sifat mustahilnya. Tujuan utama ialah untuk mengganti kepercayaan *Dewata Seuwae* menjadi kepercayaan kepada Allah SWT, yang tercermin dalam dua kalimat syahadat sebagai ucapan pertama bagi seorang yang akan masuk Islam (Mattulada, 1983, p. 341).

Ulama lainnya ialah, Abdul Jawid Khatib Bungsu yang kemudian digelar Datok ri Tiro (dimakamkan di Tiro, Bulukumba). Beliau mengunjungi daerah Bugis-Makassar kemudian berpegang kepada ilmu kebatinan, ilmu sihir dengan segala manteranya. Pengajaran beliau melalui pendekatan tasawuf, yaitu pengajaran yang pertama-tama

harus didalami ialah pengetahuan syariat, lalu tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Pendekatan tasawuf menempuh cara-caranya sendiri menurut madzhab Ahlus Sunnah. Kesenangan orang-orang Tiro menggunakan ilmu hitam yang disebutnya *doti*, adalah suatu ilmu kebatinan yang menggunakan kekuatan sakti untuk membinasakan musuh-musuhnya melalui usaha batin dan metode semedi. Usaha batin ini digantikan oleh Dato' Tiro dengan usaha batin mendekati diri kepada Allah pencipta alam gaib dan alam nyata.

4. Metode dan Pendekatan Pembelajaran

Metode yang dipakai ketiga ulama tersebut adalah metode dakwah. Setelah mereka berhasil mengislamkan Dato' Luwu, mereka lalu menyusun strategi baru dengan memprioritaskan daerah-daerah tertentu untuk menyebarkan Islam selanjutnya, yaitu dengan membagi tenaga dan daerah sasaran dakwah disesuaikan dengan keahlian mereka dan kondisi daerah tugas masing-masing, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Hamid, sebagai berikut:

- a. Datuk ri Bandang yang dikenal sebagai ahli fikih bertugas untuk menghadapi masyarakat Gowa dan Tallo yang masih kuat berpegang kepada tradisi lama, seperti perjudian, minum *ballo'* (tuak) dan sabung ayam. Dalam menghadapi masyarakat demikian, metode dakwah yang dipakai Datuk ri Bandang lebih menekankan pada masalah pelaksanaan hukum syari'at.
- b. Datuk Patimang, bertugas di Kerajaan Luwu yang masyarakatnya masih kuat berpegang kepada kepercayaan lama, seperti *Dewata Seuwae*. Datuk Patimang memperkenalkan ajaran tauhid yang sederhana dengan mengemukakan sifat-sifat Tuhan, seperti sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Tuhan. Penekanan pada ajaran tauhid ini dimaksudkan untuk mengganti kepercayaan *Dewata Seuwae* menjadi keimanan kepada tauhid, yaitu Allah SWT.
- c. Datuk ri Tiro bertugas di daerah Tiro, Bulukumba dengan lebih menekankan pada ajaran tasawuf, sesuai kondisi masyarakat yang dihadapinya, yaitu masyarakat yang masih teguh berpegang kepada masalah-masalah kebatinan, sihir dengan segala mantranya. Masyarakat Tiro memiliki kegemaran dalam menggunakan kekuatan sakti (*doti*) untuk membinasakan musuh. Masyarakat demikian, menurut Datuk ri Tiro akan lebih berhasil jika dilakukan pendekatan rasawuf (Hamid, 2006).

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada masa Kesultanan Gowa salah satunya adalah menjadikan Masjid Klukubodoa menjadi pusat pengajian Islam yang dikunjungi oleh siswa, baik dari Kesultanan Gowa maupun luar kerajaan yang telah menerima Islam. Guru yang mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu Islam di lembaga ini disebut *Gurunta* (Kodir, 2015, p. 168).

BAB II

PERAN TOKOH PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Solihah Titin Sumanti, Taslim Batubara, Eny Ernawati, Harmida Ramadhani Nasution

A. Tokoh-Tokoh Muslim sebagai Penuntut Ilmu di Masa Awal Pendidikan Islam di Indonesia

Mekkah dan Madinah yang sering juga disebut dengan *al-Haramayn* menduduki posisi penting dalam Islam dan kehidupan kaum muslim. Selain menjadi pusat ibadah, *Haramayn* merupakan pusat intelektual di dunia muslim. Hal ini menyebabkan para ulama dan penuntut ilmu yang mengajar dan belajar di Mekkah dan Madinah pada umumnya memiliki pandangan keagamaan yang lebih kosmopolitan dibandingkan mereka yang berada di kota-kota muslim lain. Selain itu, superioritas yang didapat para penuntut ilmu selama belajar di *Haramayn* tidak hanya memperkuat dalam diri mereka ciri-ciri umum yang universal bagi seluruh muslim, tetapi juga menempa mereka ke dalam suatu formulasi masyarakat muslim maupun dunia Islam lainnya.

Ketika islamisasi telah mencapai tanah Indonesia yang dahulu disebut Nusantara, eksistensi Mekkah dan Madinah sebagai pusat intelektual muslim membuat para pelajar Indonesia banyak yang bercita-cita ingin menimba ilmu di tempat ini. Hal itu terbukti dari survei yang dilakukan pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1860, disebutkan bahwa bangsa terbesar yang berada di Makkah adalah orang “*Jawah*” (Nusantara) dan karena itu bahasa Melayu merupakan bahasa terbesar kedua di Mekkah setelah bahasa Arab.

Dengan latar belakang itulah, tiga ulama Indonesia terkemuka pada abad ke-17 M yaitu, Syekh Nuruddin Al-Raniri, Syekh Abdurrauf As-Singkili, dan Syekh Yusuf Al-Makassari, pergi ke Mekkah untuk menimba ilmu agama serta menjadi tokoh-tokoh besar dalam penyebaran Islam dan perintis awal kemajuan intelektual muslim di Indonesia.

1. Syekh Nuruddin al-Raniri

a. Perjalanan dalam Menuntut Ilmu

Nama lengkapnya Nur Al-Din Muhammad bin Ali bin Hasanji al-Hamid al-Syafi’I al-Aydarusi al-Raniri, di lahirkan di Ranir sebuah kota pelabuhan tua di Gujarat India sekitar akhir abad ke-16 M. Al-Raniri berasal dari keluarga ulama Hadhrami yang terkenal dengan banyak melahirkan para cendekiawan muslim ternama. Seperti ulama Hadhrami lainnya, al-Raniri mendapat pendidikan dasar agama di kampung halamannya (Azra, 2013). Setelah menginjak usia remaja, dia pergi ke Mekkah guna untuk menambah pengetahuan tentang ilmu agama lainnya. Selama keberadaannya di Mekkah inilah dia banyak melakukan hubungan dengan berbagai bangsa, terutama bangsa Melayu (*Jawi*) yang menjadi bangsa terbesar kedua yang ada di Mekkah pada saat itu.

Al-Raniri menuntut ilmu dengan banyak ulama terkemuka di Mekkah, namun gurunya yang paling terkenal adalah Abu Hafis Umar bin Abdullah Ba Syayban yang juga dikenal di wilayah Gujarat sebagai Sayid Umar al-Aydarus. Para ulama yang berasal dari keluarga Aydarusiyah menempatkan al-Raniri dan pembaruannya dalam konteks yang tepat; sebab tidak diragukan lagi para ulama Aydarus memainkan peran penting dalam menyalurkan gagasan keagamaan dari Timur Tengah ke wilayah India, bahkan sampai ke wilayah Nusantara (Azra, 1996).

Setelah melakukan perjalanan panjang dalam menuntut ilmu, dan ditunjuk sebagai khalifah Tarkat Aydarusiyah, tibalah waktu bagi al-Raniri untuk memulai kariernya sebagai intelektual besar. Beberapa karyanya menunjukkan bahwa dia sangat mengenal dunia Melayu, bahkan sebelum kedatangannya ke Nusantara. Al-Raniri juga pantas disebut sebagai salah satu perintis paling menonjol dari keluarga Aydarusiyah di Nusantara.

Tidak ditemukan sumber yang valid tentang bukti perjalannya ke Nusantara dan menetap di wilayah ini. Tetapi menurut prediksi beberapa sejarawan, al-Raniri tiba di Nusantara di antara masa perjalanan ia beribadah haji (1621-1637 M), dan tinggal di Aceh atau Pahang serta di beberapa negeri Melayu lainnya. Kenaikannya secara mendadak ke jabatan *Syaikh al-Islam* di Kesultanan Aceh (1637 M), menandai bahwa dia telah dikenal sebelumnya pada lingkungan elit politik Melayu, terutama di Kesultanan Pahang. Ketika putra mahkota Pahang yang baru berusia tujuh tahun dibawa ke Aceh oleh Iskandar Muda, al-Raniri ikut dalam rombongan tersebut karena ia merupakan guru dari sang putra mahkota tersebut.

Pada masa sebelum kehadirannya di Kesultanan Aceh, doktrin *wujudiyah* yang disebarkan oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani mengalami masa kejayaan karena mendapat perlindungan dari Iskandar Muda. Oleh karena itu belum tepat baginya untuk menentang tatanan politik dan keagamaan yang sudah lama dipegang oleh Kesultanan Aceh. Karenanya dia menunggu sampai situasinya menjadi lebih menguntungkan dan baik bagi dirinya.

Setelah diangkat menjadi *Syaikh al-Islam* dan memiliki pijakan kuat di istana, al-Raniri mulai melancarkan pembaharuan Islamnya di Aceh. Menurut pendapatnya, Islam di wilayah ini telah mendapat pengaruh yang buruk atas doktrin sufi *wujudiyah* yang berkembang sebelumnya. Al-Raniri hidup selama tujuh tahun di Aceh sebagai seorang yang dikenal alim, cerdas, dan penulis produktif yang mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk melawan doktrin *wujudiyah*. Bahkan lebih jauh lagi, al-Raniri kemudian mengeluarkan fatwa yang mengarah pada semacam perburuan terhadap orang-orang yang sesat, dan membunuh mereka yang menolak untuk melepaskan keyakinannya dari paham tersebut.

Setelah tidak lagi mendapat tempat di istana Kesultanan Aceh, al-Raniri kembali ke kota kelahirannya (Ranir) pada 1645 M. Al-Raniri melewati empat belas tahun masa

hidupnya di Ranir. Meski sudah jauh dari Aceh dan Nusantara, al-Raniri masih memberikan keperdulannya terhadap kaum muslim di Nusantara dengan banyak menuliskan karya yang menjawab tantangan keagamaan mereka. Al-Raniri wafat pada Sabtu, 21 September 1658 M (Daudy, 1978).

b. Karya, Pembaruan, dan Peran al-Raniri bagi Peradaban Islam di Nusantara

Al-Raniri merupakan penulis produktif dan cerdas. Menurut beberapa catatan sejarah, al-Raniri menghasilkan karya tidak kurang dari 29. Tetapi tidak semuanya ia tulis ketika berada di Aceh. Contoh salah satu karyanya yang paling banyak dibaca *al-Sirath al-Mustaqim*, ditulis sebelum ia datang ke Aceh. Karya-karyanya kebanyakan membicarakan tasawuf, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama (Zainuddin, 1961).

Nuruddin al-Raniri menulis beberapa buah kitab. Beberapa karya besar Syeikh Nuruddin Al-Raniri, yaitu: 1) *Kitab Al-Shirath al-Mustaqim (1634)* 2) *Kitab Durrat al-faraid bi Syarh al-'Aqid an Nasafiyah (1635)* 3) *Kitab Hidayat al-habib fi al Targhib wa'l-Tarhib (1635)* 4) *Kitab Bustanus al-Shalathin fi dzikr al-Awwalin Wa'l-Akhirin (1638)* 5) *Kitab Nubdzah fi da'wa al-zhill ma'a shahibihi (Azra, 2013)*.

Al-Raniri banyak menulis tentang kalam dan tasawuf, hal ini menandakan kepekaannya dalam melihat kebutuhan umat Islam di Nusantara. Dalam karyanya ia banyak menjelaskan hubungan antara hakikat Tuhan dengan alam raya dan manusia. Dia menggunakan doktrin *Asy'ariyah* untuk menjelaskan perbedaan tersebut. Berlandaskan pada ajaran *Asy'ariyah*, ia menjadi begitu sengit dalam bersikap dan menolak doktrin *wujudiyah* yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani yang tetap mempertahankan Tuhan dalam ciptaan-Nya.

Selama menjadi Syaikh Islam di Kesultanan Aceh, al-Raniri banyak memberlakukan hukuman mati kepada para pengikut *wujudiyah* yang memberikan dampak luas bagi kehidupan Islam di Nusantara (Hasjmi, 1983). Hal ini kemudian mendorong para ulama sesudahnya melakukan peninjauan kembali terhadap konsep-konsep dasar yang dikembangkan oleh al-Raniri, terutama konsep: muslim, kafir, toleransi, dsb.

Terlepas dari berbagai kontroversi dan fatwanya yang cenderung keras, al-Raniri memiliki peran yang cukup besar bagi perkembangan Islam di Nusantara. Al-Raniri memainkan peran penting dalam membawa tradisi besar Islam ke wilayah ini dengan menghalangi kecenderungan kuat intrusi lokal ke dalam Islam. Tanpa mengabaikan peranan para pembawa Islam dari Timur Tengah atau wilayah lainnya, kita dapat mengatakan al-Raniri merupakan sebuah perantara yang kuat, dalam menghubungkan tradisi Islam di Timur Tengah dengan Nusantara. Hal ini menjadi bukti bahwa ia merupakan salah seorang tokoh pembaruan Islam penting di Nusantara (Hasjmi, 1990).

Sebagai ulama besar, al-Raniri pasti memiliki jaringan guru dan murid yang luas di Nusantara. Salah satu muridnya yang paling terkenal ialah Yusuf al-Maqassari. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan al-Maqassari dalam karyanya yang berjudul *Safinat al-*

Najalah menuliskan silsilah Tarekat Qadariyah dari al-Raniri. Al-Maqassari secara gamblang menyatakan bahwa al-Raniri adalah salah satu gurunya (Hamka, 1963).

Al-Raniri adalah intelektual pertama di Nusantara yang berinisiatif untuk menulis semacam buku pegangan standar mengenai kewajiban-kewajiban agama (fikih) yang mendasar bagi semua orang. Meskipun aturan-aturan syariat atau fikih dalam batas-batas tertentu telah dikenal dan dipraktikkan sebagian kaum muslim di Nusantara. Namun belum ada satu karya pun yang dapat dijadikan pedoman sebelum karya yang dihasilkan oleh al-Raniri. Karena itu tidak sulit memahami mengapa karya ini menjadi sangat populer dan masih digunakan sampai hari ini di Nusantara (Bruinessen, 1995).

Selain memainkan peran penting dalam memberikan penjelasan tentang hal-hal dasar keimanan dan ibadah dalam Islam, tetapi juga dalam mengungkapkan kebenaran Islam dalam sebuah perspektif perbandingan agama-agama lain. Al-Raniri merupakan intelektual pertama di Nusantara yang menulis sebuah karya tentang perbandingan agama berjudul *Tibyan fi Ma'rifah al-Adyan* (Steenbrink, 1988).

Pengaruh lainnya dari al-Raniri terdapat pada bidang sejarah. Ia adalah penulis pertama di Nusantara yang menyajikan sejarah dalam konteks yang universal dan memprakarsai suatu bentuk penulisan sejarah Melayu. Karya-karyanya dalam bidang sejarah yang paling terkenal ialah kitab *Bustan al-Salatin* yang merupakan karya terbesarnya yang mencerminkan minat khusus dirinya terhadap sejarah. Kitab *Bustan al-Salatin* merupakan salah satu buku terpenting di Nusantara. Kitab ini merupakan sumber yang tidak tergantikan dalam merekonstruksi tentang sejarah Islam awal di Nusantara. Makna pentingnya semakin jelas mengingat kenyataan bahwa sejarah Islam di wilayah ini kebanyakan ditulis berdasarkan sumber-sumber barat (Ricklefs, 2008).

Al-Raniri juga berperan penting dalam mendorong lebih jauh perkembangan bahasa Melayu sebagai *lingua franca* di wilayah Nusantara. Al-Raniri bahkan dikatakan sebagai salah seorang pujangga Melayu pertama. Walaupun bahasa ibu al-Raniri bukanlah bahasa Melayu, namun penguasaannya terhadap bahasa ini tidak perlu diragukan. Seorang ahli bahasa Melayu menyatakan, bahwa penguasaan al-Raniri terhadap bahasa Melayu tidak menunjukkan kekakuan yang sering terjadi dalam bahasa Melayu klasik. Dengan demikian, karya-karyanya dalam perkembangan bahasa Melayu memberikan sumbangsih besar terhadap bahasa Melayu sebagai ilmu pengetahuan

2. Abdulrauf as-Singkili

a. Perjalanan dalam Menuntut Ilmu

Abdrauf As-Singkili bin Ali al-Jawi al-Fansuri al-Singkili, seorang ulama Melayu yang lahir di daerah Singkel yang terletak di Pantai Barat Sumatera tahun 1615 M. Menurut Hasjmi, nenek moyang as-Singkili berasal dari Persia yang datang ke Samudera Pasai dan menetap di sana pada akhir abad ke-13 M. Keluarga besar as-Singkili kemudian menetap di Barus, sebuah kota pelabuhan tua di sekitar Pantai Barat Sumatera.

Tambahnya, ayah as-Singkili merupakan kakak laki-laki dari Hamzah Fansuri (Hasjmi, 1980).

As-Singkili mendapat pendidikan awalnya di desa kelahirannya, Singkel yang berasal dari ayahnya. Menurut Hasjmi, ayahnya merupakan seorang alim ulama yang juga mendirikan sebuah madrasah yang menarik murid-murid dari berbagai tempat di Kesultanan Aceh. Menurut Hasjmi juga, as-Singkili kemudian mengadakan perjalanan ke Kuta Raja (Banda Aceh) Ibu kota Kesultanan Aceh untuk belajar dengan para ulama besar lainnya, seperti: Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani (Hasjmi, 1980).

Tidak diketahui secara pasti tentang catatan awal as-Singkili terkait dengan perjalanan studinya ke Mekkah. Namun dalam cataran pribadinya, as-Singkili mencatat mengenai tarekat-tarekat yang berafiliasi dengannya, tempat belajarnya, guru-gurunya, dan para ulama yang ia temui. Meski penjelasan itu ditulis secara ringkas, namun sudah dapat memberi kita gambaran yang bagus tentang bagaimana seorang intelektual ini melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu.

As-Singkili kemungkinan besar meninggalkan Aceh menuju Mekkah pada sekitar tahun 1642 M. Dia juga menuliskan daftar 19 guru yang dikunjungnya untuk mempelajari berbagai cabang disiplin ilmu Islam, dan 27 ulama lainnya yang dengan mereka dia mempunyai kontak dan hubungan pribadi. As-Singkili belajar di sejumlah tempat yang tersebar pada rute haji, yaitu: Dhuna (Doha), Yaman, Jeddah, dan akhirnya di Mekkah dan Madinah. Di Dhuha ia belajar kepada Syekh Abdul Qadir al-Mawrir tapi tidak berlangsung lama (Azra, 2013).

Setelah dari Dhuha, as-Singkili melanjutkan pengembarannya di Yaman, terutama di Bayt al-Faqih dan Zabid. Selain itu as-Singkili memiliki guru lainnya di Mawza, Mukha, al-Lumayah, Hudaydah, dan Tai'izz. Bayt al-Faqih merupakan pusat pengetahuan Islam di wilayah ini. Di tempat tersebut ia belajar dengan para ulama dari keluarga Ja'man, salah satunya Ibrahim bin Muhammad bin Ja'man. Di antara guru-guru as-Singkili dari keluarga Ja'man yang paling penting dalam perjalanan belajarnya ialah, Ibrahim bin Abdullah bin Ja'man (w. 1672 M), ulama terkenal sebagai seorang ahli hadis dan fikih.

Jaringan guru-guru as-Singkili semakin kompleks ketika dia melanjutkan pelajarannya di Zabid. Di antara guru-gurunya adalah Abdul Rahim bin as-Shiddiq al-Khash, Amin al-Mizjaji, dan Abdullah bin Muhammad al-Adnani, yang disebut as-Singkili sebagai *qari* terbaik di wilayah tersebut. As-Singkili juga menjalin hubungan dengan para ulama terkemuka Zabid dan Yaman lainnya, seperti: Abdul al-Fattah, Sayid al-Ahdal, dan Abdul Baqi al-Mizjaji, seorang syekh Naqsyabandiyah yang terkenal.

Dalam catatannya, as-Singkili mencatat dia melewati 19 tahun dalam perjalanan belajarnya di berbagai negeri muslim. Fakta bahwa ia bertemu dengan para guru-guru terkenal menunjukkan keunggulannya yang tidak tertandingi dari segi intelektual (Hawas, 1980). Hal ini karena as-Singkili datang dari sebuah wilayah pinggiran Islam, namun dapat memasuki jaringan inti para ulama dan dapat merebut hati sejumlah

ulama di Haramayn. Pendidikannya tidak disangkal lagi sangat lengkap mulai dari, syariat, fikih, hadis, dan disiplin-disiplin eksoteris hingga kalam dan tasawuf.

b. Karya dan Pembaruan as-Singkili

Sebagai seorang ulama besar dan memiliki kehebatan yang luar biasa dalam segi intelektualitas, as-Singkili menulis banyak karya di bidang tafsir, fikih, tasawuf, dan lain sebagainya, di antara karya-karya utamanya adalah: *Mi'rat al-Thullab fi Tasyil Ma'rifah al-Ahkam al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhab*, *Tarjuman al-Mustafid*, *Kifayat al-Muhtajin ila Masyrab al-Muwahhidin al-Qa'ilin bi Wahdat al-Wujud*, *Hadits Arba'in*, dan *al-Mawa'izh al-Badi'ah*. Karya utamanya *Mi'rat al-Thullab fi Tasyil Ma'rifah al-Ahkam al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhab*, ditulis atas permintaan Sultanah Shafiyah al-Din pada tahun 1663 M. Kitab ini berbeda dengan karya ar-Raniri yang hanya berbicara perihal ibadah, kitab ini berbicara lebih luas dalam aspek muamalat, fikih, politik, ekonomi, dan agama.

As-Singkili merupakan intelektual pertama di Nusantara yang menulis tentang *fiqh muamalat*. Melalui kitabnya tersebut, as-Singkili ingin menunjukkan kepada kaum muslim di Nusantara bahwa Islam tidak hanya terbatas pada hukum saja, namun juga melingkupi seluruh aspek kehidupan sehari-hari mereka. Kedudukan as-Singkili dalam bidang tafsir tidak dapat terbantahkan. Ia adalah intelektual pertama di Nusantara yang bersedia memikul tanggung jawab besar dalam menafsirkan Alquran dalam bahasa Melayu. Sebelum adanya karya as-Singkili, di Nusantara hanya ditemukan sepenggal tafsir dari surah al-Kahfi (Hasjmi, 1980).

Meskipun as-Singkili tidak memberikan angka tahun dalam penyelesaian tafsirnya yang berjudul *Tarjuman al-Mustafid*, namun tidak ada keraguan bahwa dia yang menuliskannya selama berkarier di Aceh. Sebagai tafsir yang paling awal, tidak mengherankan kalau karyanya tersebut berbeda luas di Nusantara. Bahkan edisi cetaknya dapat dijumpai di wilayah Afrika Selatan. Biarpun karyanya tersebut diterbitkan di Timur Tengah pada masa yang sudah lama, namun penyebarannya yang luas mencerminkan nilai tinggi dari karyanya tersebut serta ketinggian intelektual as-Singkili. Bahkan edisi terakhirnya masih diterbitkan di Jakarta pada tahun 1981 M, yang menunjukkan bahwa karya ini masih digunakan di kalangan kaum muslim di Indonesia pada masa sekarang (Azra, 2013).

Bila kita melihat karya dan pemikiran as-Singkili, jelaslah bahwa dia menyebarkan doktrin dan kecenderungan intelektual dan praktik dalam jaringan ulama untuk memperkuat tradisi Islam di Nusantara. Ciri paling menonjol dari ajarannya kemudian dikenal dengan istilah neo-sufisme. Karya-karyanya juga menunjukkan bahwa tasawuf harus beriringan dengan syariat. As-Singkili dikenal sebagai tokoh pembaruan yang berbeda dengan ar-Raniri. Dia seorang *mujadid* bergaya evolusioner bukan radikal. Dia lebih suka mendamaikan pandangan yang berbeda daripada menolak salah satunya.

c. Jaringan Intelektual as-Singkili di Nusantara

Setelah kembali ke Nusantara, as-Singkili mengajar dan mendidik banyak murid dari berbagai wilayah di Nusantara. Para muridnya ini kemudian juga bertanggung jawab atas tersebarnya ajaran dari Tarekat Syathariyah di berbagai wilayah di Nusantara. Muridnya yang paling terkenal ialah Burhanuddin Ulakan dari wilayah Minangkabau. Dalam catatan sejarah, Burhanuddin Ulakan termasuk ulama awal yang menyebarkan Islam di wilayah Minangkabau dan menguatkan semangat islamisasi pada penduduk setempat (Saharman, 2018). Setelah kembali ke kampung asalnya, Burhanuddin Ulakan mendirikan Surau Syathariyah, yaitu sebuah lembaga pendidikan tradisional di Minangkabau. Tak berselang lama, surau tersebut termahsyur dan menjadi salah satu pusat keilmuan di wilayah Minangkabau (Anam, 2017).

Murid lainnya yang terkemuka ialah Abdul Muhyi dari Jawa Barat. Lewat usaha yang dilakukan oleh muridnya ini, Tarekat Syathariyah mendapatkan banyak pengikut di Jawa. Walaupun masih terdapat perdebatan tahun terkait kapan ia belajar kepada as-Singkili, namun para sejarawan sepakat ia belajar sebelum berangkat ke Mekkah. Murid lainnya yang terkenal di Semenanjung Melayu ialah Abdul Malik bin Abdullah atau yang lebih dikenal sebagai Tok Pulau Manis dari Trengganu, Malaysia. Abdul Malik belajar kepada as-Singkili dan kemudian melanjutkan pembelajarannya ke Mekkah. Murid lainnya yang terkenal ialah Dawud al-Jawi Ali al-Rumi. Ia berasal dari keturunan serdadu bayaran Turki yang datang ke Aceh dalam perjuangan melawan Portugis.

As-Singkili meninggal dunia pada sekitar tahun 1693 M dan dimakamkan di dekat kuala Sungai Aceh. Tempat tersebut juga menjadi makam untuk para istri dan murid-muridnya. Karena lokasi makamnya tersebut berada di kuala sungai, ia kemudian dikenal sebagai *syekh di kuala*. Pusaran as-Singkili menjadi tempat ziarah keagamaan terpenting di Aceh hingga saat ini (Azra, 2013).

3. Yusuf al-Maqassari

a. Perjalanan dalam Menuntut Ilmu

Muhammad Yusuf bin Abdullah Abu al-Mahasin al-Taj al-Khalwati al-Maqassari, atau lebih dikenal dengan nama *Tuanku Salamaka ri Gowa* (Guru kami yang Agung dari Gowa). Al-Maqassari lahir sekitar tahun 1627 M dari sebuah keluarga yang taat memeluk agama Islam (Duli et al., 2013). Al-Maqassari mendapat pendidikan Alquran pertamanya dari guru setempat bernama Daeng ri Tasammang. Kemudian ia belajar bahasa Arab, fikih, tauhid, dan tasawuf dengan seorang guru bernama Sayid Alwi bin Abdullah al-Thahir. Setelah menginjak usia remaja, ia melanjutkan masa belajarnya ke Cikoang dengan Jalaluddin al-Aydid yang berasal dari Aceh dan kemudian menetap di Cikoang.

Pasca kembali dari Cikoang, al-Maqassari menikah dengan putri Sultan Gowa yang bernama Mangarangi Daeng Maurabiya. Al-Maqassari telah lama memendam hasrat untuk menuntut ilmu lebih lanjut di Timur Tengah; dan dia mengharapkan gurugurunya yang berasal dari wilayah tersebut dapat memberinya dorongan dan semangat

mengenai kemajuan Islam di Timur Tengah (Massiara, 1983). Hal ini kemudian menjadi kenyataan, al-Maqassari meninggalkan Makassar menuju Timur Tengah pada 1644 M. Tujuan utama perjalanannya adalah Yaman. Di wilayah ini dia belajar di Zabid dengan Muhammad Baqi al-Naqsyabandi, Sayid al-Zabidi, dan Muhammad al-Sadi al-Yamani. Guru utama al-Maqassari di Yaman yang disebutkannya bernama Ali al-Zabidi yang terkait dengan Tarekat Ba'Alwiyah.

Al-Maqassari tidak memberitahu kita tentang tahun ia singgah di Yaman, namun diprediksi dia menghabiskan beberapa tahun sebelum melanjutkan perjalanannya ke pusat jaringan ulama di Haramayn. Masa belajar al-Maqassari di Mekkah dan Madinah berbarengan dengan masa studinya as-Singkili. Karena itu kuat dugaan bahwa al-Maqassari juga belajar kepada guru-guru yang didatangi oleh as-Singkili. Di antara gurunya yang paling terkenal ialah adalah, Ahmad Qusyasyi, Ibrahim al-Kurani, dan Hasan al-Ajami (Azra, 1996).

Berbeda dengan as-Singkili, al-Maqassari tidak menyebutkan ilmu-ilmu keagamaan yang dipelajarinya dengan para ulama di Haramayn. Dia hanya menyebutkan guru-guru utamanya dan kaitannya dengan ajaran dan silsilah tarekat menjalang akhir bagian dari sebagian karya-karyanya. Setelah selesai menimba ilmu di Timur Tengah, al-Maqassari melanjutkan perjalanannya ke Damaskus sebagai salah satu pusat pengetahuan Islam lainnya. Di Damaskus ia belajar dengan seorang ulama terkemuka bernama Ayyub bin al-Dimasyqi.

Menurut sumber sejarah, ketika berada di Mekkah al-Maqassari telah mulai mengajar. Seperti ulama lain pada umumnya, murid-muridnya juga banyak yang berasal dari wilayah Nusantara, baik berasal dari para jamaah haji maupun dari komunitas lainnya di Haramayn. Di antara para muridnya yang terkenal ialah Abdul Basyir al-Dharir, yang berasal dari Rappang Sulawesi Selatan. Muridnya ini kemudian menjadi penyebaran ajaran Tarekat Nasyabandiyah dan Khalwatiyah di Sulawesi Selatan (Azra, 2013).

b. Pembaruan dan Karya al-Maqassari

Seperti dua tokoh pembaruan lainnya yaitu al-Raniri dan as-Singkili, al-Maqassari memainkan peranan yang penting dalam politik di Kesultanan Banten. Tidak hanya itu, al-Maqassari pun melangkah ke garis depan dalam peperangan melawan Belanda setelah ditangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa. Namun seperti kebanyakan ulama dalam jaringan ulama abad ke-17 M, al-Maqassari juga tidak memanfaatkan organisasi tarekat untuk menggerakkan massa, terutama untuk tujuan perang.

Al-Maqassari menulis karya-karyanya dalam bahasa Arab yang baik, persinggahannya yang lama di Timur Tengah memungkinkannya menulis dalam bahasa tersebut. Di antara karya-karya besar al-Maqassari ialah: *Safinat al-Najah*, *Zubdah Al-Asrar fi Tahqiq Masyarib Al-Akhyar*, *Kaifiyyat Al-Nafy wa Al-Isbat Bi Al-Hadis Al-Qudsi*, *Taj al-Asrar fi Tahqiq Masyarib al-'Arifin*, dan *Bidayat Al-Mubtadi*. Hampir semua karya-

karyanya membicarakan perihal tasawuf dan kaitannya dengan ilmu kalam. Seperti dua tokoh sebelumnya, al-Maqassari mengembangkan ajaran-ajarannya sering mengutip ulama dan sufi besar lainnya, seperti: al-Ghazali, Junayd al-Baghdadi, Ibnu Arabi, al-Jili, Ibnu Atha, dan sufi besar lainnya.

Konsep utama tasawuf al-Maqassari adalah pemurnian kepercayaan (*aqidah*) pada keesaan Tuhan. Hal ini merupakan usahanya menjelaskan transedensi Tuhan atas ciptaan-Nya. Ini jelas merupakan tema sentral yang juga dikembangkan oleh para tokoh lain dalam jaringan intelektual awal di Nusantara. Meskipun berpegang teguh pada transedensi Tuhan, al-Maqassari percaya Tuhan itu mencakup segalanya (*al-ahathah*) dan ada di mana-mana (*al-ma'iyah*) atas ciptaan-Nya (Tudjimah, 1987). Dalam kedua konsep tersebut, Tuhan (*tanazzul*) sementara manusia (*taraqqi*), yaitu suatu proses spiritual yang membawa keduanya semakin dekat. Namun perlu dicatat, menurut al-Maqassari proses itu tidak akan mengambil bentuknya dalam kesatuan wujud, pada akhirnya manusia akan tetap jadi manusia, dan Tuhan tetaplah Tuhan. Dari pernyataannya tersebut dapat dilihat bahwa al-Maqassari menolak konsep *wujudiyah*.

Ciri utama dalam teologi al-Maqassari mengenai keesaan Tuhan adalah bahwa dia berusaha mendamaikan seluruh atribut atau sifat Tuhan. Dalam konsep Islam, Tuhan memiliki berbagai macam atribut namun saling bertentangan. Sepanjang menyangkut teologi al-Maqassari, dia sangat mematuhi doktrin *asy'ariyah*. Dia menekankan kesetiaan penuh pada keenam rukun iman yang berlaku dalam Islam. Lebih jauh lagi, dia juga menghimbau agar kaum muslim dapat sepenuhnya menerima makna yang mendua dari beberapa ayat Alquran.

Meskipun kebanyakan ajaran-ajaran al-Maqassari tampaknya terbatas pada tasawuf, hal ini tidak menyembunyikan perhatian utamanya, yaitu pembaruan kepercayaan dan amalan kaum muslim di Nusantara melalui pengajaran sufisme yang lebih berorientasi pada syariat. Akan hal ini berbagai tarekat yang dikaitkan dengan al-Maqassari adalah Tarekat Khalwatiyah yang tumbuh dan berkembang di Sulawesi Selatan. Jika di kemudian hari orang-orang di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat dikenal sebagai muslim yang taat, kita dapat melihat bagaimana peran besar yang sebelumnya dilakukan oleh al-Maqassari dalam pengembangan ajaran tersebut.

B. Tokoh-Tokoh Muslim sebagai sebagai Penggerak Pendidikan Islam di Indonesia

1. Tuanku Burhanuddin Ulakan

a. Riwayat Hidup Tuanku Burhanuddin Ulakan

Tuanku Burhanuddin Ulakan hidup antara tahun 1056-1104 H/1646-1692 M (Azra, 1999b, p. 209). Namun menurut Mahmud Yunus, Tuanku Burhanuddin Ulakan lahir di Sintuk, Pariaman tahun 1066 H/1646 M dan wafat pada tahun 1111 H/1691 M (Yunus, 1992b, p. 89). Sementara menurut Boestami, Tuanku Burhanuddin yang bernama kecil Pono lahir di Pariangan, Padang Panjang tahun 1066 H/1646 M. Ayahnya bernama

Pampak suku Koto dan ibunya Puteri Cukuep suku Guci (Boestami, Naim, & Anwar, 1981, p. 11). Pendapat lain menyebutkan bahwa Tuanku Burhanuddin dilahirkan hari Selasa tanggal 17 Syafar tahun 1026 hijriah di sebuah desa yang bernama Guguk Sikaladi Kanagarian Pariangan, Padang Panjang tepatnya di sebuah gubuk hasil bangunan dari nenek moyangnya yang bernama Puteri Aka Lundang.

Tuanku Burhanuddin adalah anak tunggal dari keturunan dari 'Pampak Sakti Karimun Merah' dan ibunya bernama 'Puteri Cukuep Bilang Pandai' (Hikmah, 1993, p. 33). Berdasarkan beberapa pendapat di atas, tidak ada perbedaan mengenai tempat kelahiran dan asal usul orang tuanya. Meskipun terdapat perbedaan tentang tahun kelahiran Tuanku Burhanuddin, tetapi dapat ditegaskan bahwa beliau diperkirakan lahir dan hidup awal abad ke-17 M. Kemudian berdasarkan ketentuan adat pada masyarakat Minangkabau yang menganut paham *matrilineal*, artinya suku atau marga berdasarkan garis keturunan ibu, maka Tuanku Burhanuddin memiliki garis keturunan suku dari ibunya yaitu Guci (Hakimy, 1978, p. 40).

Nama kecil Tuanku Burhanuddin dipanggil *Buyung Pono* juga terdapat beberapa versi. Pertama menyebut ia dipanggil dengan *Buyung Panuah* artinya anak laki-laki yang sudah mapan (kuat dan bisa dipercaya). Kedua, menyebut nama kecilnya *Buyung Pono* yang diambil dari gelarnya "*Samparano*", artinya sempurna. Bila disesuaikan antara pemberian nama versi yang pertama dan versi kedua terlihat tidak ada perbedaan makna, karena menurut bahasa Minang kata '*Panuah*' dan kata '*Samparano*' dapat diartikan sama yaitu mengindikasikan makna 'sempurna'. Ketiga, menurut Imam Maulana menyebut nama kecilnya *si Qanun* (Samad, 2003, p. 20). Keempat, teman-teman sepermainan masa kecilnya memanggil juga dengan gelar *si Pincang* (Hikmah, 1993, p. 43).

Sejak usia dini, *Buyung Pono* telah dididik oleh orang tua dengan pendidikan akhlak dan budi pekerti yang baik sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Minangkabau yang selalu mendasarkan filosofi adatnya, *alam takambang jadi guru*, demikian pepatah yang sering menjadi acuan dalam pendidikan anak bagi setiap orang Minang. Bukti adanya pendidikan oleh orang tua terhadap *Buyung Pono* adalah ketika ia berusia 7 tahun telah dibawa orang tuanya untuk belajar pada seorang Gujarat yang disebut dengan "*Illapai*", yaitu pedagang Gujarat yang melakukan perdagangan dari arah Timur ke Batang Bengkaweh (Pekan Tuo Batang Bangkaweh), sebelumnya merupakan salah satu jalur perdagangan (Samad, 2003, p. 21). Tuanku Burhanuddin berpulang ke rahmatullah pada hari Rabu, tanggal 11 Syafar 1111 H dalam usia 84 tahun. Beliau dimakamkan di Ulakan tempat beliau mengajar (Samad, 2003, p. 23).

b. Perjuangan Tuanku Burhanuddin Ulakan

Tuanku Burhanuddin Ulakan mendirikan surau Syattariyah, sebuah lembaga pendidikan tradisional di Tanjung Medan yang saat itu segera termashur sebagai salah satu pusat keilmuan Islam di wilayah tersebut. Surau tersebut pada mulanya diberi nama

Surau Batang Jelatang, dan kini dikenal sebagai Surau Gadang. Surau ini berdiri di atas sebidang tanah pemberian Raja Ulakan. Pada awalnya kehadiran surau ini mendapat penolakan dari golongan *Ninik Mamak* dan pemimpin adat lainnya yang merasa khawatir pengaruhnya akan berkurang bagi masyarakat sekitar yang memeluk Islam (Boestami et al., 1981, p. 19).

Tuanku Burhanuddin Ulakan bersama Tuanku Idris Majolelo terus berusaha mengembangkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Seiring perkembangan zaman, anak-anak yang belajar mengaji di suraunya terus bertambah. Surau ini berdiri berkat gotong-royong Tuanku Burhanuddin dan para muridnya (Boestami et al., 1981, p. 20). Tuanku Burhanuddin lewat Tarekat Syattariyah terus mendakwahkan ajaran Islam yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Lewat ajaran tarekat yang dibawanya, Tuanku Burhanuddin Ulakan mengajak untuk meningkatkan kualitas spiritual dan penyucian batin masyarakat. Dalam perjalanan selanjutnya, surau menjadi sebuah tempat yang tidak bisa dipisahkan dari tradisi tarekat yang ada di wilayah Minangkabau. Karena dengan adanya institusi surau, telah memainkan peran penting dalam proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan Islam.

Kata surau sendiri bermakna “tempat penyembahan. Namun dalam pengertian asalnya, surau ialah bangunan kecil yang dibangun sebagai tempat penyembahan nenek moyang. Oleh sebab itu, surau biasanya dibangun di atas puncak bukit atau tempat yang tinggi (Azra, 1999b, p. 117). Surau merupakan lembaga pendidikan tertua di Minangkabau, bahkan sebelum Islam masuk. Pasca kedatangan Islam, surau mengalami proses islamisasi tanpa mengubah namanya. Selanjutnya surau semakin berkembang di Minangkabau. Selain fungsinya sebagai tempat beribadah (salat), tempat mengajarkan Alquran dan Hadis serta ilmu lainnya, juga sebagai tempat musyawarah, tempat mengajarkan adat, sopan santun, ilmu beladiri (silat Minang) dan juga sebagai tempat tidur bagi pemuda yang mulai remaja dan bagi laki-laki tua yang sudah bercerai.

Setelah Islam berkembang, arsitektur bangunan surau di Minangkabau masih terpengaruh oleh budaya dan kepercayaan setempat. Misalnya, puncak bangunan surau ada yang bergonjong. Ini sebagai refleksi dari kepercayaan mistis tertentu dan belakangan sebagai lambang adat Minangkabau. Dengan berkembangnya lembaga pendidikan surau ini, terjadi transformasi ilmu pengetahuan dan budaya terhadap pemuda-pemuda Minang. Ilmu yang didapatkan di surau ini tidak hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengetahuan adat, ilmu bela diri, sopan santun, kemandirian dan sebagainya. Surau walaupun berbentuk seperti masjid, tetapi tidak sama dengan masjid. Fungsi surau tidak berubah setelah kedatangan Islam, hanya saja fungsi keagamaannya semakin penting yang diperkenalkan pertama kali oleh Tuanku Burhanuddin Ulakan, di wilayah Pariaman. Pada masa ini, eksistensi surau di samping sebagai tempat salat juga digunakan oleh Tuanku Burhanuddin Ulakan sebagai tempat mengajarkan agama Islam, khususnya tarekat (suluk) (Yunus, 1992b, p. 23).

Tuanku Burhanuddin Ulakan mendirikan surau Syatariyah sebagai sebuah lembaga pendidikan sejenis ribat di Ulakan. Setelah itu surau yang beliau dirikan tersebut menjadi satu-satunya pusat keilmuan Islam di wilayah Mianangkabau. Surau tersebut yang terkenal dengan nama Surau Ulakan menarik banyak murid dari seluruh wilayah Minangkabau (Schrieke, 1973, p. 25). Mereka mengambil keahlian dalam berbagai cabang disiplin ilmu Islam dan kemudian juga mendirikan surau-surau sendiri ketika telah kembali ke desa-desa kelahiran masing-masing.

Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan *halaqah*. Materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih seputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Alquran. Selain itu diajarkan juga ilmu-ilmu keislaman lainnya, seperti keimanan, akhlak dan ibadah. Pada umumnya pendidikan ini dilaksanakan pada malam hari. Pokok ajarannya terkenal dengan sebutan “Martabat Tujuh” ketujuh martabat itu ialah:

- a. *al-Ahadiyyah* atau *an-Ta’ayyun* atau *al-Ithlaq* atau *Zat al-Bath*. Artinya memandangi dengan hatinya akan semata-mata wujud zat (esensi) Allah SWT dengan tiada iktibar sifat, *asma* (nama-namanya), dan *a’al* (perbuatan-perbuatannya).
- b. *al-Wahiddayyah* yaitu penampakan pertama (*al-Ta’ayyun al-Awwal*) dari esensi Tuhan yang mutlak itu berupa *al-Haqiqah al-Muhammadiyah* yakni ibarat Allah SWT dengan wujud zat (esensi-Nya) dan segala sifat-Nya dan segala makhluk atas jalan perceraian setengah dari setengahnya, yang diartikan ilmu Tuhan mengenai diri-Nya serta alam semesta secara global (Schrieke, 1973, p. 42).
- c. *al-Wahidiyyah* yaitu penampakan kedua (*al-Ta’ayyun al-Sani*) dari esensi Tuhan yang mutlak itu berupa *al-Haqiqah al-Insaniyyah* dalam rupa. Hakikat insan yakni ilmu Tuhan mengenai dirinya serta alam semesta secara terperinci. Martabat yang tiga ini zat (esensi) Allah SWT dan sifat-sifat-Nya, sekalian makhluk di alam ini, maujud dalam ilmu Allah SWT, artinya belum zahir dalam maujud. Berdasarkan kepada martabat ini, Tuhan belum menampakkan diri-Nya dalam rupa alam lahir.
- d. *‘Alam al-Arwah* atau Nur Muhammad SAW yang dijadikan Allah SWT dari roh-Nya. Roh tunggal asal dari segala makhluk hidup baik manusia ataupun yang lain.
- e. *‘Alam al-Misal* yaitu diferensiasi dari Nur Muhammad dalam rupa roh perseorangan seperti laut melahirkan dirinya dalam bentuk ombak.
- f. *‘Alam al-Ajsam* yaitu alam benda yang terdiri dari empat unsur, api, angin, air dan tanah, sedangkan martabat ketujuh adalah *insan*, atau alam paripurna, yakni tempat berhimpun semua martabat sebelumnya, sehingga ia dinamakan juga “penampakan lahir Allah SWT yang kemudian sekali.”
- g. inti ajaran Martabat Tujuh adalah bahwa semua yang ada merupakan penampakan diri Allah SWT. Pemikiran semacam ini dikembangkan menjadi ajaran *wahdat al-wujud*, kesatuan wujud dengan Tuhan (Nasution, 1999, pp. 92–95).

c. Jenjang Pendidikan dan Kurikulum Surau

Secara bertahap, eksistensi surau sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami kemajuan. Ada dua jenjang pendidikan surau pada era ini, yaitu jenjang pengajaran Alquran dan jenjang pengajian kitab. Dalam tingkatan mempelajari Alquran, terdapat dua macam tingkatan, yaitu:

- a. Pendidikan rendah, yaitu pendidikan untuk memahami ejaan huruf Alquran dan membaca Alquran. Selain itu juga dipelajari cara berwudu dan tata cara salat yang dilakukan dengan metode praktik dan menghafal. Tentang keimanan terutama dipelajari hal yang berhubungan dengan sifat dua puluh dan akhlak yang dilakukan dengan cerita tentang Nabi dan orang-orang saleh lainnya.
- b. Pendidikan Atas, yaitu pendidikan membaca Alquran dengan lagu, kasidah, barzanji, tajwid dan kitab parukunan. Lama pendidikan di kedua jenis pendidikan tersebut tidak ditentukan. Seorang siswa baru dikatakan tamat bila ia telah mampu menguasai materi-materi di atas dengan baik. Bahkan adakalanya seorang siswa yang telah menamatkan mempelajari Alquran dua atau tiga kali baru berhenti dari pengajaran Alquran (Nasution, 1999, p. 72).

Sementara untuk jenjang pengajian kitab adalah tahap setelah anak-anak tamat mempelajari Alquran. Maka sebagian besar di antara mereka ke luar untuk terjun di tengah-tengah masyarakat dan sebagiannya lagi meneruskan pelajaran ke tingkat lanjutan yang dinamai pengajian kitab. Pada setiap negeri (desa) ada seorang syekh yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dengan mendalam.

Materi pelajaran pada tingkat pengajian kitab terdiri dari atas; Ilmu Saraf/Nahu (gramatika bahasa Arab); Ilmu Fiqih; Ilmu Tafsir dan lain-lain. Pelajaran yang mula-mula diajarkan ialah sharaf, dimulai dengan menghafal *kata-kata arab serta artinya dalam bahasa melayu (daerah)*, setelah itu diajarkan *tasrif: fi'il-madli, mudlari, mushdar Ismufa'il ismu muf'ul, fi'l amr, nahi, ismu zaman, ismu makan dan ismu alah*, yang dinamai *tafsir Sembilan*. Kitab yang dipakai untuk pelajaran Ilmu saraf bernama *Kitab Dhammun*, yaitu kitab tulisan tangan dan tidak diketahui siapa pengarangnya dan tahun berapa dikarang. Menurut beberapa pendapat mengatakan bahwa kitab itu karangan ulama Indonesia sendiri. Pelajaran Ilmu Nahu menggunakan kitab yang bernama *Al-Awamil*, kitab *Al-Kalamu*, kitab *Ajrumiah*, yang sampai sekarang masih dipakai di pesantren dan madrasah-madrasah.

Murid-murid yang belajar di surau Syattariyah terbuka untuk mempelajari seluruh rangkaian pengetahuan Islam. Salah satu buku yang dipelajari Tuanku Burhanuddin Ulakan dan murid-muridnya adalah karya Syekh Abdurrauf yang memperlihatkan penghargaan tertinggi terhadap syariat. Beberapa surau Syattariyah juga mempelajari cabang ilmu agama lainnya, sehingga terjadi spesialisasi pengajaran agama Islam di Minangkabau. Masing-masing surau memperdalam salah satu cabang ilmu agama, seperti surau Kamang dalam ilmu alat (nahu-saraf dan tata bahasa Arab), Koto Gadang

(ilmu mantiq ma'ani), Koto Tuo)tafsir Alquran, tarbiyah dan hadis), surau Sumanik (ilmu faraidh/pewarisan, hadis), surau Talang (ilmu badi', ma'ani dan bayan/tata bahasa Arab).

d. Murid dalam Sistem Pendidikan Surau

Orang-orang yang menempuh pendidikan di surau disebut dengan murid. Hal ini mencerminkan sebuah sifat yang sangat alamiah dari fungsi awal surau, karena istilah murid merujuk pada terminologi tasawuf yang bermakna pengamal tarekat. Dalam konteks tasawuf, pengajaran dilakukan oleh seorang syekh atau pemimpin sah tarekat. Syekh biasanya akan sangat memahami murid-muridnya, dan mengarkan mereka sesuai dengan tingkatan kemampuan masing-masing individu murid. Seorang syekh juga tahu secara intuitif kapan seorang murid dapat naik dari satu maqam (tingkatan spiritual) ke tahap berikutnya. Ketika si murid sudah dianggap layak orang seorang syekh untuk menjadi penggantinya, ia akan dipanggil secara pribadi dan memberinya ijazah atau izin mengajar, serta memasukkan orang-orang baru ke dalam tarekat yang mereka amalkan dan bertindak sebagai wakil syekh selama sang syekh tidak berhadir.

Melalui pendekatan ajaran Tarekat Sattariyah, Tuanku Burhanuddin Ulakan menanamkan ajaran Islam kepada masyarakat Minangkabau. Dengan ajarannya yang menekankan kesederhanaan, Tarekat Sattariyah berkembang dengan pesat. Muridnya tidak hanya berasal dari Ulakan, Pariaman saja, melainkan berasal dari daerah-daerah lain di sekitar Minangkabau. Seperti Tuanku Mansiang Nan Tuo yang mendirikan surau Paninjauan dan Tuanku nan Kaciak yang mendirikan surau di Koto Gadang. Sehingga pada akhirnya, murid-murid Tuanku Burhanuddin Ulakan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan surau sebagai lembaga pendidikan bagi generasi selanjutnya. sebagian murid-muridnya diangkat menjadi 'khatib'¹ atas mufakat dengan *Ninik Mamak* dan *Panghulu*.

Khatib pertama yang dinobatkan oleh Tuanku Burhanuddin Ulakan adalah Idris teman seperjuangan ketika belajar dengan Tuanku Madinah. Idris dari suku Koto diberi gelar dengan *Katik Majolelo*. Kemudian banyak juga di antara murid-muridnya yang dinobatkan menjadi 'Labai'.² Labai diangkat oleh Tuanku Burhanuddin Ulakan pada setiap surau, mereka memiliki kegiatan keagamaan di surau yang dipimpinnya. Kemudian Labai juga meluas kepada perangkat penghulu yang menjadi jembatan

¹ *Katik* adalah ulama yang dinobatkan dan didukung oleh pemuka adat yang fungsinya hampir sama dengan imam, namun ia lebih bersifat operasional. Tugas dan fungsi katik adalah pelindung *tuangku* (da'i) dan syekh dalam berdakwah. Ia juga menjadi salah satu anggota sidang dalam sidang Ju'mat untuk menentukan imam salat, khatib Jum'at, petugas masjid dan kebutuhan masjid lainnya.

² *Labai* berasal dari kata *labbai* dan *lebai* yang berarti orang yang ahli dalam ilmu agama. Di Minangkabau *Labai* lebih dititikberatkan pengertiannya pada orang yang menjadi manajer dan penentu kebijakan pada suraunya sekaligus berusaha menghidupkan surau. Tugasnya mengurus masalah kematian, kurban Idul Adha, mengumumkan kapan puasa dimulai dan diakhiri. Jadi *labai* lebih difokuskan pada pelaksana dalam bidang teknis keagamaan di surau bagi yang diangkat oleh *nagari* dan di lingkungan kaumnya bagi yang dinobatkan oleh sukunya.

antara penghulu dengan kalangan pemuka agama sehingga labai juga ada yang masuk dalam struktur adat di Ulakan dan sekitarnya (Hasbullah, 1999, p. 42). Melalui penobatan gelar *tuangku*, *imam*, *khatib* dan *labai* sebagai pemegang pengatur keagamaan (ahli agama). Tuanku Burhanuddin Ulakan bahu membahu bersama muridnya mengajak dengan cara-cara yang akomodatif dan persuasif. Kebiasaan dan tradisi masyarakat yang masih terpengaruh dengan tradisi nenek moyang dan tidak sesuai dengan Islam dirubahnya dengan cara bijaksana.

Adapun murid-murid Syekh Burhanuddin yang menjadi khalifah untuk menggantikan kedudukan Syekh Burhanuddin setelah ia meninggal adalah sebagai berikut:

1. Syekh Muhammad Idris bin Salaim menjadi khalifah pertama terhitung mulai tahun 1111 H sampai 1126 H, kurang lebih selama 15 tahun.
2. Syekh Abdur Rahman bin Abdur Rahim diangkat menjadi khalifah tahun 1126 sampai 1137 H, lebih kurang 11 tahun.
3. Syekh Kharuddin, menjadi khalifah tahun 1137 H sampai 1146 H, lebih kurang 9 tahun.
4. Syekh Jalaluddin, diangkat menjadi khalifah tahun 1146 H sampai 1161 H, lebih kurang 14 tahun.
5. Syekh Abdul Muhsin Tuangku Faqih, menjadi khalifah tahun 1161 H sampai 1180 H, lebih kurang 19 tahun.
6. Syekh Abdul Hasan bin Husin, menjadi khalifah tahun 1180 H sampai 1194 H, lebih kurang 14 tahun.
7. Syekh Khaliluddin bin Khalid, menjadi khalifah tahun 1194 H sampai 1211 H, lebih kurang 17 tahun.
8. Syekh Habibullah bin Alif, menjadi Khalifah tahun 1211 H sampai 1231 H, lebih kurang 20 tahun.
9. Syekh Tuangku Qusha'i, menjadi khalifah tahun 1231 H sampai 1248 H, lebih kurang 17 tahun.
10. Syekh Tuangku Ja'far bin Muhammad, menjadi khalifah tahun 1248 H sampai 1280 H, lebih kurang 32 tahun.
11. Syekh Tuangku Muhammad Sani, menjadi khalifah tahun 1280 H sampai 1311 H, lebih kurang 31 tahun.
12. Syekh Tuangku Busai, menjadi khalifah dari tahun 1311 H sampai 1366 H, lebih kurang 55 tahun.

13. Syekh Tuanku Barmawi menjadi khalifah tahun 1366 H sampai sekarang dan bertugas menjaga pakaian Syekh Burhanuddin di Tanjung Medan (Hikmah, 1993, p. 40).

Sampai sekarang jumlah murid-murid dari Tuanku Burhanuddin Ulakan sampai Syekh Tuanku Barmawi banyak tersebar di berbagai wilayah Sumatera dan Jawa, bahkan ada pula yang sampai ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Paham mereka dapat diterima masyarakat karena mereka bermazhab Syafi'i dan penganut paham ahlu sunnah wal jamaah.

2. Syekh Abdullah Ahmad

a. Riwayat Hidup Syekh Abdullah Ahmad

Berbicara tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia, tidak dapat ditinggalkan nama Abdullah Ahmad. Abdullah Ahmad lahir di Padang Panjang pada tahun 1878 (Djaya, 1975, p. 73). Ia adalah putra Haji Ahmad, seorang ulama Minangkabau yang senantiasa mengajarkan agama di surau-surau, di samping sebagai saudagar kain (Nata, 2003, p. 157). Pendidikan Abdullah Ahmad dimulai dengan mempelajari agama Islam kepada orang tuanya serta beberapa guru yang ada di daerahnya. Setelah baligh/dewasa, ia dimasukkan ke sekolah kelas dua (sekolah yang diperuntukkan bagi kaum pribumi) di Padang Panjang. Karena ayahnya seorang ulama yang berpikiran modern, maka Abdullah Ahmad sangat diharapkan menjadi orang terpelajar dan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang agama (Djaya, 1975, p. 73).

Selanjutnya, pada usia 17 (tujuh belas), ia berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, sambil melanjutkan pelajaran agama pada Syaikh Ahmad Khatib, seorang ulama asal Minangkabau yang bermukim di Mekkah, serta kepada beberapa ulama lainnya di Mekkah. Salah satu pertimbangan dikirimnya Abdullah Ahmad ke Mekkah adalah karena di Minangkabau (Sumatera Barat) pada saat itu belum ada sekolah agama yang baik, sementara Mekkah pada saat itu terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam, dan sudah banyak orang Minangkabau yang bermukim di sana.

Selama empat tahun belajar di Mekkah, Abdullah Ahmad juga terus mengikuti perkembangan gerakan Wahabiah yang digencarkan pada waktu itu. Gerakan ini dilakukan untuk menghapus praktek bid'ah, khurafat dan takhayul yang disisipkan ke dalam ajaran Islam dan banyak diamalkan ummat Islam Mekkah pada saat itu. Masalah lain yang mendapatkan perhatian Wahabiah ini adalah masalah taqlid, yaitu sikap mengikuti pendapat orang lain secara membabi buta tanpa mengetahui dasar hukumnya dari Al-Quran dan Hadis.

Berkat ketekunan dan kecerdasannya dalam menguasai pengetahuan agama, selama di Mekkah, Abdullah Ahmad pernah diangkat sebagai asisten dari Syaikh Abdul Khatib (Hajar, 1990, p. 26). Selanjutnya pada tahun 1899, Abdullah Ahmad kembali ke Minangkabau dan mulai mengajar di Surau Jembatan Besi Padang Panjang. Di daerah ini ia mulai mengajar dengan menggunakan cara tradisional, yaitu dengan sistem

halaqah, yaitu cara pengajaran yang dilakukan dengan cara seorang guru didatangi para santri. Mereka duduk melingkar di sekeliling guru sambil mengikuti pelajaran yang disampaikan guru.

Pada tahun selanjutnya Abdullah Ahmad mengubah sistem pengajaran tradisional itu dengan sistem sekolah agama (madrasah) yang diberi nama Adabiyah School. Penamaan ini mungkin sekali dimaksudkan sebagai simbol kebangkitan ilmu pengetahuan sebagai penunjang utama bagi kebangkitan peradaban Islam dan mungkin pula diilhami oleh hadis Nabi yang diriwayatkan Al-Asyqari. Hadis tersebut selengkapnya berbunyi, *“Tuhanku telah mendidiku, maka perbaikilah pendidikanku.”* (Ridha: 1818).

Proses belajar mengajar dengan menggunakan sistem klasikal tersebut menggunakan sarana yang biasa terdapat pada sekolah yang dilaksanakan pemerintahan Belanda, seperti meja, bangku dan papan tulis. Tentu saja bagi masyarakat yang terbiasa dengan sistem berhalaqah di daerah setempat, merasa asing dengan pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah Ahmad, sehingga keadaan yang demikian itu mendapatkan tantangan keras dari kalangan ulama tradisional, karena dianggap melakukan cara-cara yang dilakukan oleh orang kafir. Karena tantangan tersebut demikian kuat, maka Abdullah memutuskan untuk pindah ke Padang untuk menggantikan pamannya, Syaikh Abdul Halim yang meninggal dunia sebagai guru. Di kota ini ia mengadakan tabligh-tabligh dan pertemuan-pertemuan tentang masalah-masalah agama dan mendirikan perkumpulan Jamaah Adabiah beberapa tahun kemudian.

Asal mula perkumpulan ini ialah kelompok murid-muridnya sejumlah delapan orang yang tanpa absen menghadiri ceramahceramahnya. Ia juga memberikan pelajaran kepada kira-kira 300 orang penduduk kota tersebut. Sebagian daripadanya terdiri dari orang-orang dewasa. Pengajian ini diselenggarakan dua kali seminggu secara berganti-ganti dari rumah yang satu ke rumah yang lain (Noer, 1996, p. 46). Keperluan terhadap pendidikan yang sistematis dan kenyataan bahwa tidak semua anak-anak dari pedagang di Padang dapat masuk sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah menyebabkan Abdullah Ahmad membuka sekolah Adabiyah dengan bantuan pedagang-pedagang ini. Hal ini terjadi pada tahun 1909 setelah ia mengunjungi sekolah Iqbal di Singapura. Selain kegiatan ini, ia juga menjadi Ketua Persatuan wartawan di Padang pada tahun 1914. Ia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan siswa-siswa sekolah menengah pemerintah di Padang dan sekolah dokter di Jakarta dan memberikan bantuannya dalam kegiatan Jong di Sumatranen Bond. Ia merupakan pendiri dari majalah Al-Munir 1911 dan Al-Akhbar tahun 1913 (suatu majalah berita) dan menjadi redaktur dalam bidang agama dari majalah Al-Islam tahun 1916 yang diterbitkan oleh Sarekat Islam (Noer, 1996, p. 47).

Sebagai pelopor majalah-majalah pembaharu suatu pembicaraan singkat tentang Al-Munir bukanlah tidak pada tempatnya di sini. Majalah ini diterbitkan dua minggu

sekali di Kota Padang dari tahun 1911 sampai tahun 1916. Kedudukan Abdullah Ahmad dalam majalah tersebut adalah sebagai Ketua Dewan Redaksi, yang dibantu oleh Abdul Karim Amrullah Danau, Muhammad Dahlan Sutan Lebak Tuah, H.M.Thaiib Umar Sungayang Batusangkar, Sutan Muhammad Salim dan sebagainya (Al-Munir, p. 5). Adalah jelas bahwa Abdullah Ahmad memanfaatkan lembaga Adabiyah sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk menerbitkan Al-Munir. Al-Munir diterbitkan secara terang-terangan dengan menggunakan bahasa Melayu yang berhuruf Arab. Sebagian besar edisinya terdiri dari enam belas halaman. Pada edisinya yang paling pertama, Al-Munir bahwa dirinya sebagai jurnal agama, pengetahuan dan agama Islam. (Azra, 1999).

Penting dicatat bahwa di dalam penjelasan Al-Munir tentang fungsi jurnal Islam, ia mengungkapkan bahwa jurnal Islam bagaikan seorang guru yang memberikan bimbingan di jalan yang benar kepada para pembacanya; mengingatkan mereka atas dosa pada masa lalu; menghibur mereka pada saat berduka; membantu mereka untuk sembuh dari kebakhilan; membangunkan mereka menuju kebajikan dan menajamkan akal mereka (Azra, 1999b). Maka, majalah dua minggu ini memuat artikel yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pembacanya. Jenis artikel ini mencakup masalah agama (seperti perlunya beragama), biografi Nabi Muhammad SAW, pengertian tentang mazhab, perlunya hisab dibandingkan dengan ru'yah dan masalah duniawi, seperti umpamanya kegunaan surat kabar dan majalah, kegunaan organisasi serta juga kejadian-kejadian di luar negeri, terutama di Timur Tengah. Ada juga terdapat artikel-artikel yang lebih dalam sifatnya, yaitu yang filosofis tetapi masih berkisar pada persoalan agama juga, seperti soal tauhid (Noer, 1996, p. 47).

Selain menulis dalam artikel Al-Munir dan menerjemahkan buku, Abdullah Ahmad juga menulis sebuah kitab yang berjudul "*Titian ke Surga*" yang merupakan kitab berisi pokok-pokok agama. Kitab ini diterbitkan oleh Syarikat Ilmu dan dicetak pada percetakan Majalah Al-Munir di Padang. Di dalam buku ini dibahas tentang arti agama, pokok agama dan hukum. Karangan Abdullah Ahmad berikutnya adalah "*Al-Islam*", yang berbicara tentang Islam yang sesungguhnya, syariat Islam, ilmu tarikh, dan lain sebagainya. Selanjutnya Abdullah Ahmad menulis buku berjudul "*Ilmu Sejati*". Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang berbentuk buku, terbit dalam bahasa Arab Melayu, terdiri dari 4 jilid dan dicetak pada percetakan al-Munir, Padang antara tahun 1916-1917. Abdullah Ahmad juga menulis tentang sya'ir perukunan yang berisi kumpulan-kumpulan sya'ir untuk nyanyian murid-murid sekolah, diterbitkan di Padang pada bulan Agustus 1917. Selain itu masih ada buku berjudul "*Pembuka Pintu Surga*", "*al-Ittifaq wa al-Iftiraq*", serta "*Izharu Zaglil Kazibin*" (Nata, 2003, p. 160-161). Pengetahuannya tentang Islam diakui oleh ulama-ulama Timur Tengah pada suatu konferensi khilafah di Kairo tahun 1926, di mana ia bersama Haji Rasul memperoleh gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) dalam bidang agama (*doktor fi ad-din*). Ia meninggal di Padang tahun 1933 (Noer, 1996, p. 47).

b. Pembaruan Lembaga Pendidikan Islam: Madrasah Adabiyah

Dasar pemikiran ini penulis pinjam dan dijadikan kerangka dasar dalam mencermati perkembangan modernisasi (pembaharuan) Islam di Nusantara, khususnya di Minangkabau yang diperkirakan oleh para ahli sejarah Islam sebagai akar dari pembaharuan tersebut. Dua persyaratan yang diminta Caskel tersebut telah terpenuhi dalam kasus tersebut di Minangkabau. Pertama, adanya kesadaran kurangnya tingkat intelektualitas keagamaan dalam masyarakat Minangkabau dalam upaya mengimplementasikan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakatnya. Hal tersebut dilihat dari segi kuantitas sedikitnya jumlah ulama di daerah ini disebabkan banyak yang terbunuh dalam menghadapi peperangan dengan kolonial Belanda, maupun dari kualitas “kelompok ulama” dalam memahami ajaran Islam.

Kenyataan inilah yang menyebabkan banyaknya orang Minang yang pergi ke tanah suci untuk menuntut ilmu, di samping tujuan utama untuk menjalankan ibadah haji. Kedua, sebagai dampak dari pertama, terciptanya kontak intelektual masyarakat Minangkabau yang belajar ke Saudi Arabia, khususnya di Mekkah dengan ulama Haramayn, sehingga menambah wawasan dan kesadaran baru bagi mereka untuk dikembangkan dan disebarluaskan kelak di kampung halaman mereka. Pada masa itu situasi dan kondisi masyarakat di Minangkabau yang jauh dari nilai-nilai Islam menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk mengubah ataupun meluruskan pemahaman dan praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Proses modernisasi tersebut terus-menerus berlangsung tahap demi tahap dan menghasilkan perubahan-perubahan yang menyebabkan terintegrasikannya ajaran Islam dengan adat (tradisi) pada masyarakat Minangkabau sehingga melahirkan pepatah: *Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*, agama mengatakan, adat memakai (melaksanakannya). Tercatat beberapa nama ulama besar yang berperan sebagai pembaharu bidang pendidikan Islam yang muncul di Timur Tengah, seperti Muhammad Ali Pasya, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha.

Kemudian tercatat nama Muhammad Iqbal dari India dan sebagainya. Pada masa kemunduran Islam abad 13-18 M, segala warisan filsafat dan ilmu pengetahuan diperoleh Eropa dari Islam, ketika umat Islam larut dalam kegemilangan sehingga tidak memperhatikan lagi pendidikan, maka Eropa tampil mencuri ilmu pengetahuan dan belajar dari Islam. Eropa kemudian bangkit dan Islam mulai dijajah dan mengalami kemunduran. Hampir seluruh wilayah dunia Islam dijajah oleh Bangsa Eropa termasuk Indonesia (Daulay, 2014b, p. 161).

Sebenarnya kesadaran akan kelemahan dan ketertinggalan kaum muslimin dari bangsa Eropa telah timbul mulai abad ke 11 sampai ke 17 M. Dengan kekalahan-kekalahan yang diderita oleh Turki Usmani dalam peperangan dengan negara-negara Eropa. Mereka mulai memperhatikan kemajuan yang dialami Eropa dengan mengirimkan utusan-utusan untuk mempelajari kemajuan Eropa terutama dari Prancis

dan didirikan sekolah-sekolah militer di Turki pada tahun 1734 (Yusrianto, 2011, p. 52). Dalam membuka mata kaum muslimin akan kelemahan dan keterbelakangannya, sehingga akhirnya timbul berbagai macam usaha pembaharuan dalam segala bidang kehidupan, untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan, termasuk usaha-usaha di bidang pendidikan (Yunus, 1992a).

Kebangkitan kembali umat Islam khususnya bidang pendidikan Islam adalah dalam rangka untuk pemurnian kembali ajaran-ajaran Islam dengan pelopor-pelopor di berbagai daerah masing-masing. Adapun mereka mengemukakan opini kebangkitan dengan mengacu kepada tema yang sama yaitu adalah:

- a. Mengembalikan ajaran Islam kepada unsur-unsur aslinya, dengan bersumberkan kepada Alquran, Hadis dan membuang segala *bid'ah*, *khurafat*, tahayul dan mistik.
- b. Menyatakan dan membuka kembali pintu ijtihad setelah beberapa abad dinyatakan ditutup.

Secara garis besar ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses pembaharuan pendidikan Islam.

- 1) Pertama, faktor internal yaitu, faktor kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertaqwa, dan beriman kepada Allah.
- 2) Kedua, faktor eksternal adanya kontak Islam dengan barat juga merupakan faktor terpenting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan pragmatik umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada barat, sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa terminimalisir.

Salah satu tokoh pembaruan pendidikan Islam di Nusantara ialah Syekh Abdullah Ahmad. Beliau lahir di Padang pada tahun 1878 M, sebagai anak dari Haji Ahmad yang dikenal sebagai seorang ulama dan juga sebagai pedagang kecil. Pendidikannya dimulai dengan mempelajari agama Islam pada orang tuanya sendiri, serta beberapa orang guru yang ada di daerahnya. Karena ayahnya seorang ulama yang berpikiran modern, Abdullah Ahmad sangat diharapkan agar menjadi orang terpelajar dan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang agama (Diya, 1975, p. 73).

Modernisasi pendidikan Islam Indonesia masa awalnya dikenalkan oleh Belanda pada awal abad ke-19 M. Program yang dilaksanakan oleh kolonial Belanda dengan mendirikan *Volkshoolen*, sekolah rakyat, atau sekolah desa (Nagari) dengan masa belajar selama 3 tahun, di beberapa tempat di Indonesia sejak dasawarsa 1870-an. Pada tahun 1871 M telah berdiri 263 sekolah dasar semacam itu dengan siswa sekitar 16.606 orang dan menjelang 1892 M meningkat menjadi 515 sekolah dengan sekitar 52.685 murid (Saharman, 2018).

Sistem Pendidikan Islam pada mulanya diadakan di surau-surau dengan tidak memakai kelas dan tiada pula memakai bangku, meja, dan papan tulis, hanya duduk bersela saja. Kemudian mulailah perubahan sedikit demi sedikit sampai sekarang. pendidikan Islam yang mula-mula berkelas dan memakai bangku, meja dan papan tulis, ialah sekolah Adabiyah (*Adabiyah School*) di Padang (Daulay, 2014b, p. 173). *Adabiyah school* merupakan madrasah (sekolah agama) yang pertama di Minangkabau, bahkan di seluruh Indonesia. Madrasah Adabiyah didirikan oleh Almarhum Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 M. Adabiyah hidup sebagai madrasah sampai tahun 1914 M, kemudian diubah menjadi H.I.S. Adabiyah pada tahun 1915 M di Minangkabau yang pertama memasukkan pelajaran agama dalam rencana pelajarannya. Sekarang *Adabiyah* telah menjadi sekolah rakyat dan SMP (Daulay, 2014b, p. 174).

Berbeda dengan pendidikan surau, *Adabiyah School* menerapkan sistem tradisional yang dilaksanakan secara konsekuen. Sekolah ini diatur berkelas, sistem belajar dan mengajar dilaksanakan dengan memakai bangku, meja, papan tulis, dan buku-buku. Materi pelajaran agama Islam seperti yang terdapat di surau-surau ditambah pengetahuan umum seperti membaca huruf Latin serta berhitung. Namun demikian, sekolah ini tidak berumur panjang dan belum sampai usia setahun sudah dipindahkan ke Padang. Kegagalan sekolah ini tidak lebih karena mendapat reaksi dan tantangan yang keras dari masyarakat, sehingga Abdullah Ahmad kesulitan untuk mengembangkannya.

Perkembangan lebih lanjut, *Adabiyah School* di Padang yang baru didirikan dapat berkembang, karena masyarakat Padang lebih dinamis dan berpikiran luas. Setelah berdirinya madrasah *Adabiyah*, maka selanjutnya diikuti madrasah lainnya seperti *Madrasah School* di Sungayang (daerah Batusangkar) oleh Syekh M. Thaib pada tahun 1910 M, *Diniyah School* (madrasah diniyah) oleh Zainuddin Labai Al-Junusi di Padang Panjang tahun 1915 M.

c. Pembaruan Sistem Pendidikan

Pada tahun 1910 M, Syekh Muhammad Thaib Umar mendirikan *Madrasah School* di Sungayang yang memberikan pengajian tentang kitab-kitab besar menurut sistem *halaqah*, tetapi pada tahun 1913 M sekolah ini terpaksa ditutup karena kekurangan tenaga guru. Namun pada tahun 1918 M, sekolah tersebut dihidupkan kembali oleh Mahmud Yunus. Pada tahun 1915 M, Zainuddin Labai mendirikan *Diniyah School* di Padang Panjang, sebuah sekolah agama plus pendidikan umum, kebalikan *Adabiyah School* Padang. Sekolah ini masih bertempat di surau atau masjid tetapi diselenggarakan dengan sistem dan metode pendidikan umum, berkelas, berbangku, berpapan tulis dan memakai buku pelajaran. Sekolah ini dibagi kepada dua tingkat; tingkat dasar (*ibtidaiyah*) dan menengah (*tsanawiyah*), lama belajar masing-masing tiga dan empat tahun. *Adabiyah School* Padang dan *Diniyah School* Padang Panjang dapat dianggap sebagai pelopor pendidikan nasional di bidang sekolah agama, karena memadukan

pendidikan umum dan agama. Menurut Daya, kedua sekolah tersebut merupakan satu pola kombinasi pendidikan yang harmonis.

Pada awal abad ke-20 M, pendidikan Islam di Indonesia mengalami babak baru dalam sejarah, yaitu masa pembaruan. Pembaruan dalam pendidikan Islam adalah salah satu jawaban terhadap kekuasaan dan dominasi Eropa. Respon pendidikan berupa penolakan, adaptasi, ataupun sampai kepada akulturasi dan pembaruan, dengan akibatnya masing-masing. Setelah diketahui sistem pendidikan, maka dapat dicermati beberapa perubahan yang terjadi, antara lain pada (Subhan, 2012, pp. 132–133):

a. Tujuan dan Materi

Tujuan pendidikan Islam tentu harus sesuai dengan apa yang dikandung dalam Alquran dan Hadis. Tujuan dari berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam (khususnya pesantren) berorientasi pada pendidikan agama. Tujuannya mengacu pada pembentukan manusia yang sempurna di mana seorang muslim memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani. Sebelum Belanda mengembangkan sistem pendidikan baratnya, pendidikan Islam yang ada hanyalah mengembangkan tujuan keagamaan.

Setelah pendidikan Belanda berdiri, mau tidak mau para pelaku pendidikan Islam berpikir ulang agar sistem yang dikembangkan tetap diminati masyarakat. Maka sistem pendidikan Islam mulai terbuka dengan memasukkan pelajaran-pelajaran umum ke dalam kurikulumnya (Ramayulis, 2011, pp. 303–304). Hal ini dilakukan agar pesantren tidak ketinggalan zaman tanpa mengubah orientasi atau landasan dasarnya. Seperti misalnya pesantren *Mambaul Ulum* di Surakarta, kurikulumnya berubah dengan dimasukkannya pelajaran membaca huruf Latin, aljabar dan berhitung. Akhirnya muncul dua macam pesantren, yaitu pesantren salafi yang masih mempertahankan kurikulumnya, dan pesantren khalafi yang telah memasukkan pelajaran umum.

Perubahan tersebut juga ditandai dengan munculnya lembaga madrasah dan sekolah. Munculnya madrasah di Indonesia merupakan salah satu wujud respon terhadap kebijakan pemerintah Hindia-Belanda di Indonesia. Madrasah muncul setelah sistem pendidikan Belanda hadir, yaitu yang pertama kali berdiri pada tahun 1909 M (*Adabiyah School*), atau dapat dikatakan, madrasah dari tidak ada menjadi ada. Keberadaannya menjadi salah satu upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Pola dan variasi madrasah tidak akan keluar dari tiga format dasar: madrasah yang menyerupai sekolah Belanda, madrasah yang menggabungkan secara lebih seimbang antara muatan-muatan keagamaan dan non-keagamaan, dan madrasah yang lebih menekankan pada muatan-muatan keagamaan dan menambahkan muatan-muatan umum secara terbatas.

b. Metode dan Sarana

Dalam perubahan metode dan sarana adalah penyesuaian terhadap materi berdasar tujuannya. Pengajaran pada madrasah ataupun sekolah memakai sistem tradisional, di

mana ada pengelompokan siswa dalam kelas-kelas. Pesantren Tebu Ireng, dengan mendirikan madrasah salafiyah merupakan modernisasi. Selain diajarkan pengetahuan umum, madrasah tersebut memakai sistem tradisional dengan perjenjangan: madrasah Ibtidaiyah, madrasah Tsanawiyah, madrasah *Mu'allimin*. Sarana yang ada di pesantren berupa pondok, bangku yang digunakan untuk meletakkan kitab.

Madrasah diorganisasikan berdasarkan sistem tradisional atau madrasi, di mana murid dipisah-pisahkan dalam beberapa tingkatan, persis seperti yang dilakukan organisasi pendidikan umum dalam sistem pendidikan nasional. Dalam sistem madrasah, pelajaran-pelajaran di kelompokkan dan penyampaiannya diberikan secara bertingkat-tingkat dengan memperhitungkan rentang waktu yang dibutuhkan.

Lembaga pendidikan sekolah cenderung meniru pola yang diterapkan oleh Belanda. Pada sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah, pengorganisasiannya menyerupai sekolah-sekolah Belanda. Muhammadiyah membagi sekolahnya mirip dengan sekolah-sekolah Belanda: HIS Muhammadiyah, MULO, AMS Muhammadiyah. Dengan adanya kelas-kelas tersebut, tentunya ada gedung-gedung sekolah dengan kelas-kelas khusus. Di mana tiap kelas terdapat papan tulis, bangku-bangku, dan kursi. Sistem penyampaiannya tidak secara individual seperti pada model Sorogan di pesantren, tetapi lebih cenderung berkelompok di mana satu guru menyampaikan materi dan semua siswa mendengarkan.

c. Evaluasi

Pada mulanya pesantren berorientasi *ukhrawi*, mengukur keberhasilan lembaganya jika mampu menghasilkan santri yang taat, berakhlak mulia tanpa berharap berprofesi dalam jabatan tertentu. Pada lulusan pesantren dengan ikhlas kembali ke masyarakat dan tidak mengharapkan jabatan tertentu yang bersifat keduniawian. Dengan kata lain, para santri dididik untuk sukses hidup di akhirat. Ijazah seperti halnya yang diberikan oleh sekolah-sekolah Belanda tidak dikenal. Mereka hanya mengenal ijazah sebagai tanda seberapa kualitas ilmu agama yang didapatkan dari para guru/kyainya, sementara sekolah-sekolah Belanda didirikan untuk melatih warga negara Indonesia bagi pemenuhan (salah satunya) profesi Pamong Praja. Perubahan keinginan bangsa Indonesia terlihat dengan adanya madrasah, yang eksistensinya merupakan usaha menyempurnakan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem yang lebih memungkinkan lulusan-lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum yaitu kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah.

Sementara pembaruan sistem pendidikan oleh Syekh Abdullah Ahmad dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Pemerataan pendidikan, beliau adalah orang pertama yang memelopori berdirinya madrasah di Indonesia, yaitu model sekolah agama yang menggunakan sistem tradisional lengkap dengan sarana dan pra-sarananya. Dialah orang yang pertama

mengadakan pembaruan pendidikan dalam bidang kelembagaan atau institusi pendidikan.

2. Kurikulum, sebagai mana dicatat dalam sejarah bahwa sekolah Adabiyah diubah menjadi HIS Adabiyah pada tahun 1915 M. Menurut Mahmud Yunus, itulah HIS yang pertama di Minangkabau yang memasukkan pelajaran agama dalam rencana pengajarannya.
3. Dana pendidikan, Syekh Abdullah Ahmad telah berhasil melakukan upaya adanya dana alternatif bagi pendidikan Islam, dan dana itu justru datang dari pemerintah Belanda sendiri.
4. Kemodrenan yang ditandai dengan sikap keterbukaan yang objektif dan kritis.
5. Metode pengajaran, yaitu adanya *debating club* adalah termasuk metode yang diterapkan oleh Abdullah Ahmad (Yunus, 1992b, p. 159).

BAB III

PENDIDIKAN ISLAM MASA PENJAJAHAN

Oleh: Aisyah, Irwan Syahrudin

A. Pendidikan Islam masa Kolonial Belanda

Sistem pendidikan Islam di Indonesia sudah berkembang sejak abad-abad pertama Islam datang ke Indonesia (sekitar 614 M). Dalam UU No. 20 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) Pasal 3 disebutkan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menyikapi sistem pendidikan nasional yang dikembangkan di Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, pendidikan Islam sangat mempengaruhi sistem tersebut. Pendidikan Islam mendukung sistem pendidikan nasional. Hal ini juga secara sepintas bias dilihat dalam tujuan pendidikan yang diterapkan di Indonesia yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penaklukan bangsa Barat atas dunia Timur dengan jalan perdagangan, kemudian dengan kekuatan militer. Kedatangan bangsa Barat memang telah membawa kemajuan teknologi. Tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah, begitu pula di bidang pendidikan. Mereka memperkenalkan sistem dan metode baru tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Orang-orang Barat menyebut pembaruan pendidikan itu adalah Westernisasi dan Kristenisasi demi kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan penjajahan Barat di Indonesia selama ± 3,5 Abad (Zuhairini, 2008, p. 146).

1. Kedudukan Pendidikan Islam pada Zaman Kolonial Belanda

Sejak zaman VOC (kongsi dagang Belanda) kedatangan mereka di Indonesia sudah bermotif ekonomi, politik dan agama. Dalam "Hak Oktroi" VOC terdapat suatu pasal yang berbunyi bahwa badan ini harus berniaga di Nusantara dan bila perlu boleh berperang dan harus memperhatikan perbaikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah. Ketika Van den Boss menjadi Gubernur Jenderal di Batavia (Jakarta modern) pada tahun 1831 M, keluarlah kebijaksanaan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu dan di setiap daerah Keresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Gubernur Jenderal Van den Capellen pada tahun 1819 M mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat

membantu pemerintah Belanda. Dalam surat edarannya kepada para Bupati tersebut bahwa dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara (Z. Zuhairini, 2004, p. 148).

Setelah runtuhnya VOC pada tahun 1799 M, pemerintah Kerajaan Belanda menggantikan kedudukan VOC di Hindia-Belanda pada tahun 1801 M dengan terang-terangan menyatakan bahwa tanah jajahan harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada perdagangan dan kepada kekayaan Kerajaan Belanda. Pada tahun 1842 M, Merkus yang menjabat sebagai menteri jajahan memberikan perintah agar Gubernur Jenderal berusaha dengan segenap tenaga untuk memperbesar keuntungan bagi negerinya. Walaupun setiap Gubernur Jenderal pada penobatannya berjanji dengan khidmat bahwa ia akan memajukan kesejahteraan Hindia-Belanda dengan segenap usaha, ternyata Hindia-Belanda sebagai negeri yang direbut harus terus memberi keuntungan kepada negeri Belanda sebagai tujuan pendudukan itu. Pada masa VOC, yang merupakan sebuah kongsi dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Berbeda dengan kondisi di negeri Belanda sendiri di mana lembaga pendidikan dikelola secara bebas oleh organisasi-organisasi keagamaan. Maka selama abad ke-17 M hingga 18 M, bidang pendidikan di Indonesia harus berada dalam pengawasan dan kontrol ketat VOC. Sekalipun penyelenggaraan pendidikan tetap dilakukan oleh kalangan agama (gereja), tetapi mereka adalah berstatus sebagai pegawai VOC yang memperoleh tanda kepangkatan dan gaji.

Pada tahun 1882 M pemerintah Hindia-Belanda membentuk badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan yang disebut *Priesterraden* (Zuhairini, 2008, p. 149). Maka pada tahun 1901 M, muncullah apa yang disebut dengan politik ETIS yakni politik balas budi bangsa Belanda kepada Indonesia. Pencetus politik ini adalah Van Deventer, yang kemudian politik ini dikenal juga dengan Trilogi Van Deventer. Secara umum isi dari politik ETIS ini ada tiga macam yaitu: education (pendidikan), Imigrasi (perpindahan penduduk) dan Irigasi (pengairan). Buku ini akan spesifik mengupas mengenai bidang pendidikan. Pada tahun 1905 M, pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan peraturan yang isinya menyatakan bahwa orang yang memberikan pengajaran harus meminta izin terlebih dahulu. Pada tahun 1925 M, pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan agama Islam, yaitu tidak semua orang (kiyai) boleh memberikan pelajaran mengaji.

Pada tahun 1932 M keluar lagi peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnnya atau memberikan pelajaran yang tak disukai oleh pemerintah yang disebut Ordonansi Sekolah Luar (*Wilde School Ordonantie*). Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan nasionalisme-islamisme pada tahun 1928 M, dalam bentuk "Sumpah Pemuda." Selain itu, pengajaran

keagaaman di lingkungan orang-orang Kristen di Indonesia juga selalu mendapat reaksi penolakan dari rakyat yang menjaga agar di sekolah-sekolah umum ajaran Kristen tidak disebarluaskan. Oleh sebab itu kemudian pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan peraturan agar pemerintah netral terhadap semua agama. Pemerintah Hindia-Belanda tidak memihak kepada salah satu agama sehingga pemerintah melindungi tempat peribatan semua agama (Ramayulis, 2011, p. 253).

Karena peraturan tersebut, pendidikan Islam di Indonesia mulai lumpuh dan kacau-balau. Namun semangat umat Islam terhadap pendidikan laksana air hujan yang sulit dibendung oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya Politik Etis dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS), sekolah dengan pengantar bahasa daerah (IS, VS, VgS), dan sekolah peralihan. (2) Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO, HBS, AMS) dan pendidikan kejuruan. (3) Pendidikan tinggi.

Pendidikan selama masa penjajahan Kolonial Belanda dapat dibagi ke dalam dua periode besar, yaitu: masa VOC berkuasa, dan masa pemerintahan Hindia-Belanda, berikut pembagiannya (Adam, 2004, p. 45).

a. Pendidikan Dasar

Berdasarkan peraturan tahun 1778 M, pendidikan dibagi ke dalam tiga kelas, yaitu: kelas satu (tertinggi) diberi pelajaran membaca, menulis, agama, menyanyi dan berhitung, kelas dua mata pelajarannya tidak termasuk berhitung kelas tiga (terendah) materi pelajaran fokus pada alphabet dan mengeja kata-kata. Proses kenaikan kelas tidak jelas disebutkan, hanya didasarkan pada kemampuan secara individual. Pendidikan dasar ini berupaya untuk mendidik para murid-muridnya dengan budi pekerti. Contoh pendidikan dasar ini antara lain *Batavische school* (Sekolah Betawi, berdiri tahun 1622 M); *Burgerschool* (Sekolah Warga-negara, berdiri tahun 1630 M).

b. Sekolah Latin

Diawali dengan sistem numpang-tinggal (*in de kost*) di rumah pendeta tahun 1642 M. Sesuai namanya, selain bahasa Belanda dan materi agama, mata pelajaran utamanya adalah bahasa Latin. Setelah mengalami buka-tutup, akhirnya sekolah ini secara permanent ditutup tahun 1670 M.

c. *Seminarium Theologicum* (Sekolah Seminari)

Sekolah untuk mendidik calon-calon pendeta yang didirikan pertama kali oleh Gubernur Jenderal van Imhoff tahun 1745 M di Batavia. Sekolah ini dibagi menjadi empat kelas secara berjenjang; kelas satu belajar membaca, menulis, bahasa Belanda, Melayu dan Portugis serta materi dasar-dasar agama; kelas dua pelajarannya ditambah bahasa Latin; kelas tiga ditambah materi bahasa Yunani dan Yahudi, filsafat, Sejarah,

Arkeologi dan lainnya; kelas empat materinya pendalaman yang diasuh langsung oleh kepala sekolahnya. Sistem pendidikannya asrama dengan durasi studi 5,5 jam sehari dan sekolah ini hanya bertahan selama 10 tahun.

d. *Academie Der Marine* (Akademi Pelayaran)

Berdiri tahun 1743 M, dimaksudkan untuk mendidik calon perwira pelayaran dengan lama studi 6 tahun. Materi pelajarannya meliputi matematika, bahasa Latin, bahasa Ketimuran (Melayu, Malabar dan Persia), navigasi, menulis, menggambar, agama, keterampilan menunggang kuda, anggar, dan dansa. Tetapi akhirnya Akademi Pelayaran ini ditutup pada tahun 1755 M.

e. Sekolah Cina

Pada tahun 1737 M didirikan sekolah yang ditujukan untuk keturunan Cina yang miskin, tetapi sempat berhenti karena peristiwa *de Chineezenmoord* (pembantaian etnik Cina) tahun 1740 M. Selanjutnya sekolah ini berdiri kembali secara swadaya dari masyarakat keturunan etnik Cina sekitar tahun 1753 M dan 1787 M.

f. Pendidikan Islam

Pendidikan untuk komunitas muslim relatif telah mapan melalui lembaga-lembaga yang secara tradisional telah berkembang dan mengakar sejak proses awal masuknya Islam ke Indonesia. VOC tidak ikut campur mengurus atau mengaturnya. Pada akhir abad ke-18 M, pasca VOC mengalami kebangkrutan, kekuasaan di Hindia-Belanda akhirnya diserahkan kepada pemerintah Kerajaan Belanda. Pada masa ini, pendidikan mulai memperoleh perhatian relatif maju dari sebelumnya. Beberapa prinsip yang oleh Kerajaan Belanda diambil sebagai dasar kebijakannya di bidang pendidikan antara lain: (1) Menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama tertentu; (2) Memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak mampu mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kepentingan kolonial; (3) Sistem pendidikan diatur menurut pembedaan lapisan sosial, khususnya yang ada di Jawa; (4) Pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintah kolonial.

Secara tidak langsung, pemerintah Hindia-Belanda telah memanfaatkan kelas aristokrat pribumi untuk melanggengkan *status quo* kekuasaan kolonial di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia mendapati tahapan barunya menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900 M, yakni era Ratu Juliana berkuasa di kerajaan Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda menerapkan politik etis (*Etische Politiek*) pada tahun 1899 M dengan motto "*de Eereschuld*" (hutang kehormatan) dan slogan "*Educatie, Irigatie, Emigratie*".

Prinsip-prinsip atau arah etis (*etische koers*) yang diterapkan di bidang pendidikan pada masa ini adalah:

- Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi pribumi. Bahasa Belanda diupayakan menjadi bahasa pengantar pendidikan;
- Pendidikan rendah bagi pribumi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sistem pendidikan pada masa ini belum lepas dari pola stratifikasi sosial yang telah ada, dan beroleh pengesahan legal sejak tahun 1848 M dari penguasa kolonial (Mahfud, 2012, p. 23).

Pada penjelasan di atas sudah disebutkan bahwa pendidikan pada masa kolonial Belanda sangat diskriminatif sebagaimana kemudian Belanda mengeluarkan peraturan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak diizinkan yang disebut dengan Ordonansi sekolah liar. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa colonial Belanda sejak diterapkannya Politik Etis dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS), sekolah dengan pengantar bahasa daerah (IS, VS, VgS), dan sekolah peralihan.
- Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO, HBS, AMS) dan pendidikan kejuruan.
- Pendidikan tinggi.

2. Sistem Pendidikan Islam pada Zaman Kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda pendidikan Islam disebut juga dengan bumi putera, karena yang menempuh pendidikan Islam seluruhnya orang asli Indonesia. Pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda terbagi menjadi tiga, yaitu:

- Sistem pendidikan peralihan Hindu Islam
- Sistem pendidikan surau (langgar)
- Sistem pendidikan pesantren (Mahfud, 2012, p. 48).

a. Sistem Pendidikan Surau

Lembaga pendidikan surau tidak mengenal birokrasi formal sebagaimana yang dijumpai pada lembaga pendidikan modern. Aturan yang ada didalamnya sangat dipengaruhi oleh hubungan antar individu yang terlibat. Secara kasat mata dapat dilihat di lembaga pendidikan surau tercipta kebebasan, jika murid melanggar suatu aturan yang telah disepakati bersama, murid tidak mendapatkan hukuman tapi sekedar nasihat. Lembaga surau lebih merupakan suatu proses belajar untuk sosialisasi dan interaksi kultural dari hanya sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan saja. Di lembaga pendidikan ini nampak jelas fungsi *learning society* dalam pengajarannya.

Sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas. Murid dibedakan sesuai dengan tingkatan keilmuannya, proses belajarnya tidak kaku, semua

murid diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki. Dalam proses pembelajaran, murid tidak memakai meja ataupun papan tulis, yang ada hanya kitab kuning yang menjadi sumber utama dalam pembelajaran. Metode utama dalam proses pembelajaran di surau dengan memakai metode ceramah, membaca dan menghafal. Materi pembelajaran dilaksanakan dengan sang guru duduk di lantai dan para muridnya membentuk setengah lingkaran. Sang guru kemudian membacakan materi pembelajaran, semantara para murid menyimak dan mencatat bagian-bagian penting menggunakan sebuah buku khusus yang telah disiapkan oleh sang murid. Sistem pembelajaran seperti ini terkenal dengan istilah halaqoh (Ramayulis, 2011, p. 123).

b. Sistem Pendidikan Pesantren

Salah satu ciri tradisi yang selalu dipertahankan dalam pesantren yaitu pengajian kitab salaf atau yang lebih familiar disebut kitab kuning. Para sarjana Islam abad pertengahan membuat kitab itu yang sampai sekarang masih digunakan oleh kalangan pesantren. Kitab kuning tersebut merupakan karya intelektual muslim yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Dalam kitab kuning terdapat dua unsur yaitu *matan* dan *syarah*. *Matan* merupakan bagian inti yang dibahas pada bagian *syarah*. Pada zaman sekarang, keberadaan kitab kuning menjadi saling terkait dengan keberadaan sang guru. Kitab kuning adalah kodifikasi nilai yang dianut oleh para santri di pesantren, sedangkan kyai adalah cermin dari semua yang diteladani (Mas'udi, 1985, p. 56).

Sistem pendidikan yang ada di dalam pesantren mempunyai karakter yang mandiri. Hal itu bisa kita lihat dari pengajaran sorogan. Pengajaran sorogan di sini maksudnya adalah seorang kyai mengajar para santrinya secara bergiliran dari santri satu ke santri lainnya. Saat tiba gilirannya, santri mengulangi serta mengartikan kata yang sama persis dengan yang diucapkan kyai atau guru itu kepadanya. Metode penerjemahan ini dibuat supaya mereka bisa dengan mudah mengerti dan memahami baik dari segi arti ataupun fungsi kata dalam rangkaian kalimat dalam bahasa Arab.

Dalam sistem itu, para santri harus melakukannya secara berulang-ulang dan hanya boleh menerima tambahan pelajaran apabila sudah mendalami atau menguasai pelajaran sebelumnya. Sorogan bisa diartikan sebagai sistem yang paling sulit dari keseluruhan sistem pengajaran yang ada di pesantren. Hal ini disebabkan dalam sorogan para santri dituntut untuk sabar, rajin, taat, dan disiplin. Selain sorogan dalam pesantren juga sangat familiar dengan yang namanya pengajian weton di mana sang kyai bersila di lantai masjid atau di teras rumahnya membaca atau menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat keagamaan dan para santrinya mengerumuninya sambil mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh kyai tersebut. Dalam pengajian sorogan, metode yang digunakan adalah masih dilanjutkan dengan cara memberi kuasa kepada para ustadz untuk melaksanakannya di bilik atau kamar mereka masing-masing.

Dalam tulisannya, Abdorrahman menjelaskan 8 (delapan) pola umum tentang pendidikan Islam di pesantren yaitu sebagai berikut: Hubungan yang dekat di antara kyai dan santri; pola hidup sederhana (zuhud); tradisi ketundukan atau kepatuhan seorang santri kepada kyai; sifat mandiri dari seprang santri; berkembangnya budaya tolong menolong dan suasana persaudaraan antar sesama santri; sifat disiplin yang tinggi; rela hidup menderita demi tercapainya tujuan; kehidupan dengan tingkat religuitas yang tinggi (Mas'ud, 2002, p. 14).

Dengan memiliki karakteristik yang khas, pesantren menjadi pusat pendidikan Islam yang survive keberadaannya dalam melestarikan tradisi-tradisi pesantren di tengah arus perubahan zaman yang semakin maju. Karakter khusus di pondok pesantren yaitu isi kurikulum yang fokus pada ilmu agama seperti hukum Islam, tafsir, hadis, tasawuf, retorika, tarikh, sistem yurisprudensi Islam, dan juga theologi Islam. Mengenai mekanisme kerja, pondok pesantren mempunyai keunikan dibanding dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Keunikan yang pertama yaitu masih memakai sistem tradisional di mana adanya kebebasan penuh dibanding dengan sekolah modern sehingga terjadilah hubungan dua arah antara kyai dan santri. Keunikan yang kedua adalah sistem kehidupan di pondok pesantren sangat mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persamaan, persaudaraan, dan keberanian hidup (Krisdiyanto, Muflikha, Sahara, & Mahfud, 2019).

B. Pendidikan Islam masa Pendudukan Jepang

A. Sejarah Masuknya Jepang ke Indonesia

Jepang menduduki Indonesia setelah mengalahkan Belanda dalam perang dunia ke-II yang terjadi pada tahun 1942 dengan semboyan Asia Timur Raya Satu, Asia untuk Asia. Sejak awal abad ke-20 M, Jepang menjadi imperialistis karena berbagai faktor, antara lain, Jepang dihadapkan kepada persoalan kepadatan penduduk. Sesudah Perang Dunia ke-I, minat terhadap Indonesia bangkit. Alasan bangkitnya minat itu adalah ajaran *Shintoisme* tentang *Hakko- ichiu* yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Khususnya yang menyangkut bangsa Indonesia, ajaran *Hakko-ichiu* diperkuat oleh keterangan Jepang sekitar 1930 yang menyatakan bahwa bangsa Jepang dan Indonesia itu serumpun, maka beralasan jika Jepang mengaku sebagai saudara tua, kecuali alasan tersebut masih ada lagi alasan lain yaitu alasan ekonomis (Djumhur, 1979, p. 195).

Pendapat serupa juga menyatakan bahwa pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942-1945, sebab bukan hanya Belanda saja yang mencoba berkuasa di Indonesia. Dalam Perang Pasifik (perang dunia ke-II), Jepang memenangkan peperangan pada tahun 1942 dan berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Perpindahan kekuasaan ini terjadi ketika Belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutu (Suwendi, 2004, p. 85).

Meski pendudukan Jepang di Indonesia sangatlah singkat, tetapi pengaruhnya bagi perkembangan dunia pendidikan sangatlah besar. Tujuan pendidikan pada masa itu telah disisipi misi *Nipponisasi* dan juga upaya-upaya pemberdayaan bangsa Indonesia untuk membantu kepentingan perang Jepang. Misi tersebut dilakukan dengan mendekati tokoh-tokoh kyai yang menjadi panutan umat Islam agar dapat dijadikan sandaran politik mereka. Pertemuan antara 32 ulama dengan *Gunseikan* pada 7 Desember 1942, berisi tukar pendapat mengenai keislaman dan komitmen Jepang untuk melindungi adat dan agama Islam, tidak mencampuri lembaga keagamaan bahkan diperkenankan secara resmi untuk meneruskan pekerjaannya, serta memberi kedudukan yang baik pada mereka yang telah mendapatkan pendidikan agama tanpa membedakan-bedakannya dengan golongan lain. Intinya, misi *Nipponisasi* tersebut dianggap akan tertanam lebih mudah pada rakyat kecil bila mereka sudah merebut hatinya dengan perlakuan istimewa Jepang terhadap mayoritas rakyat yang beragama Islam. Efek samping yang tidak disadari oleh Jepang karena kebijakan tersebut adalah perkembangan lembaga pendidikan keislaman non-ormas seperti pesantren dan yang formal seperti madrasah berkembang menjadi begitu pesat (Wahab, 2004, p. 18).

Demi melancarkan gerakan *Nipponisasi*, Jepang juga melakukannya lewat kebijakan pelarangan penggunaan bahasa Eropa (Inggris dan Belanda) dalam komunikasi lisan dan tulisan, dan hanya memperbolehkan komunikasi dalam bahasa Indonesia dan Jepang. Pengaruh tersebut sangat terasa dalam dunia pendidikan karena semasa pendudukan Belanda, bahasa pengantar yang dipergunakan di sekolah-sekolah adalah bahasa Belanda. Sehingga pada masa itu, Jepang membentuk juru bahasa sebagai penerjemah ketika guru sedang mengajar, mempopulerkan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda dengan membuka sekolah bahasa Jepang, mengadakan perlombaan bahasa Jepang, memasukkan bahasa Jepang dalam ujian calon guru dan ujian akhir murid. Selain itu, Jepang juga mengganti seluruh istilah yang digunakan baik dalam dunia pendidikan, surat kawat, hingga nama lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dengan bahasa Jepang (Wahab, 2004, p. 22).

Propaganda tersebut juga dilakukan melalui radio dan dunia hiburan seperti film, layar lebar, drama, wayang kulit, tari-tarian dan nyanyian. Selain itu, Jepang juga membentuk panitia penyempurnaan bahasa Indonesia, yang mana imbasnya sangatlah menguntungkan bagi perkembangan bahasa Indonesia. Demi kepentingan perangnya, Jepang melakukan banyak upaya untuk memberdayakan bangsa Indonesia, misalnya melalui indoktrinasi dengan pengasramaan kyai dan santri-santri untuk dibekali kemampuan bela diri dan kemiliteran untuk membantu Jepang. Malah tanpa disadari Jepang, kebijakan tersebut malah menumbuhkan semangat nasionalisme dan keinginan untuk merdeka yang meluap-luap pada pemuda kalangan pesantren tersebut. Di lain tempat, pekarangan sekolah-sekolah ditanami umbi-umbian dan sayur-sayuran untuk tambahan bahan makanan, serta pohon jarak untuk menambah minyak demi

kepentingan perang Jepang, tentunya semua hal tersebut dilakukan oleh para pelajar (Afifuddin, 2007, p. 87).

Selain itu, mereka juga disuruh untuk bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk kepentingan pertahanan. Para pelajar juga dibekali dengan berbagai macam ketangkasan dalam perang untuk mempertahankan diri. Ditambahkan pula dengan kewajiban untuk senam pagi untuk menguatkan fisik pelajar dalam membantu Jepang. Indoktrinasi dilakukan melalui lagu senam yang berbahasa Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang sebelum masuk kelas, melakukan penghormatan kepada Kaisar Jepang, mengucapkan sumpah setia kepada cita-cita Indonesia dalam rangka mewujudkan Asia Raya, dan seterusnya.

Diskriminasi dan diferensiasi pendidikan yang diberlakukan pada zaman Belanda dengan menggolongkan sekolah menurut golongan bangsa dan status sosial dihapuskan oleh Jepang. Sehingga hanya berlaku satu macam sekolah tiap tingkatnya untuk segala kalangan dan bangsa Indonesia pun bebas untuk memasuki sekolah-sekolah tersebut. Meskipun kebijakan tersebut diambil oleh Jepang dengan tujuan untuk memudahkan proses pengawasan dan manajerial administratif saja, tetapi dampak penghapusan diskriminasi dan diferensiasi tersebut begitu besar bagi dunia pendidikan pada masa itu (Sunanto, 2005, p. 127).

Tentunya selain dampak positif, dampak negatifnya adalah penurunan drastis jumlah sekolah, guru, dan murid secara kuantitatif. Hal itu sangat jelas terasa karena banyak sekolah yang ditutup karena penyederhanaan sistem persekolahan tersebut dan guru-guru sekolah banyak yang terserap di bidang profesi lainnya seperti menjadi pegawai pemerintah dan tentara.

B. Kebijakan Jepang Terhadap Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Jepang memang banyak yang terlihat seolah-olah ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Mulai dari pemberlakuan sekolah gratis, pemberian tambahan insentif guru, hingga penyederhanaan sistem persekolahan. Tapi pada kenyataannya, kebijakan tersebut sarat dengan muatan politis yang membawa misi *Nipponisasi* dan pemberdayaan bangsa Indonesia untuk perburuhan dan mobilisasi militer (Poesponegoro & Notosusanto, 2007, p. 139).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Jepang memasukkan berbagai unsur dalam pendidikan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, jika hal itu mengakibatkan adanya pengenalan terhadap budaya Jepang yang menyebar pada masyarakat pribumi. Jepang pun menerapkan konsep pengajaran sama seperti yang ada pada negaranya dan mengganti segala jenis konsep pendidikan barat. Di Indonesia, Jepang berusaha menerapkan perpaduan antara kurikulum lokal dengan yang ada di Jepang. Dalam penerapan tersebut, Jepang memiliki beberapa hal yang merupakan instrument penting dalam pendidikan yaitu:

a. Tujuan dan Fungsi pendidikan Jepang

Dengan Semboyan “Asia untuk Bangsa Asia” Jepang menguasai daerah yang berpenduduk empat ratus juta jiwa yang antara lain menghasilkan 50 % produksi karet dan 70% produksi timah dunia. Indonesia sebagai sumber bahan mentah merupakan sarana yang perlu dibina sebaik-baiknya untuk kepentingan perang Jepang. Tentu saja tujuan utama Jepang dalam mengaplikasikan pola pendidikannya di Indonesia adalah untuk menarik simpati pribumi agar mau membantu dan membela serta memenangkan Jepang dalam perannya di Perang Dunia ke-II (Arifin, 1991, p. 178).

Hal ini terlihat dari perubahan yang terjadi pada pola pendidikan di Indonesia yang diawali dengan penghapusan penggunaan bahasa Belanda di sekolah dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, juga penerapan bahasa Jepang dan Indonesia dalam pengantar bahasa oleh guru. Tentu saja dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi menjadikan masyarakat pribumi lebih memihak pada Jepang yang telah mengambalikan dan memberi hak mereka untuk mempelajari bahasa asli mereka. Ini adalah cara politik Jepang dalam menarik simpati pribumi, agar pribumi mau membela Jepang dalam peperangan dan memperkuat kekuatan militer Jepang. Karena dengan memberi sedikit hadiah kepada pribumi, Jepang dapat memperoleh kebaktian mereka dan pembelaan mereka untuk melawan kekuatan barat (Chatibul, 2004, p. 199).

Konkritnya tujuan pendidikan pada masa pendidikan Jepang di Indonesia adalah menyediakan tenaga cadangan (*Romusha*) dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu pelajar-pelajar diharuskan latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi ketat. Pada akhir masa Jepang terdapat tanda-tanda tujuan pendidikan men-Jepang-kan anak-anak Indonesia (Najamuddin, 2005, p. 88). Selain itu, Jepang juga memiliki konsep pendidikan yang luas dan merakyat. Hal ini terlihat dari dihapunya sistem pengkastaan dalam pendidikan. Dahulu pengkastaan ini bertujuan bahwa hanya mereka yang berasal dari keluarga ningrat yang berhak mendapat pendidikan, pengkastaan ini berlaku pada masa Belanda. Tapi, meskipun begitu dalam kelompok sosial masyarakat tetap ada perbedaan yang mendasar pada tingkat sosial masyarakat dalam pendidikan.

Sementara untuk pendidikan Islam, Jepang juga mengatur beberapa kebijakan. Sebelum menjajah Indonesia, Jepang telah meneliti tentang mayoritas masyarakat yang berupa ormas-ormas Islam, kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Mengubah kantor *Voor Islamistische Zaken* pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi *Sumubi* yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim Asy'ari. Di daerah-daerah dibentuk *Sumuka*, di mana pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang.
- 2) Mengizinkan pembentukan barisan *Hizbullah* yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin.

- 3) Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkar dan Mohammad Hatta.
- 4) Diizinkan ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan.
- 5) Diizinkan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU (Sukardjo, 2009, p. 146).

Hakku Ichiu adalah sistem pendidikan Jepang, yakni mengajak warga Indonesia untuk bekerjasama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Oleh karena itu bagi setiap pelajar, setiap hari terutama pada pagi hari, harus mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Penghapusan dualisme pengajaran dilakukan Jepang untuk melakukan perubahan pada sistem pendidikan di Indonesia.

Lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslim ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan. Kepercayaan Jepang ini dimanfaatkan juga oleh umat Islam untuk bangkit memberontak melawan Jepang sendiri. Pada tanggal 8 juli 1945 berdirilah Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Kalau ditinjau dari segi pendidikan zaman Jepang, umat Islam mempunyai kesempatan yang banyak untuk memajukan pendidikan Islam, sehingga tanpa disadari oleh Jepang sendiri bahwa umat Islam sudah cukup mempunyai potensi untuk maju dalam bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah.

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang kemudian dapat dibagi sebagai berikut: (1) Pendidikan Dasar (*Kokumin Gakko*/Sekolah Rakyat), lama studi 6 tahun, termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia-Belanda. (2) Pendidikan Lanjutan, terdiri dari *Shoto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan *Koto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun. (3) Pendidikan Kejuruan, mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. (4) Pendidikan Tinggi.

Dengan begitu habislah riwayat pengajaran Belanda yang dualistis, yang membedakan antara pengajaran barat dan pengajaran pribumi. Penghapusan ini dimaksudkan karena dualisme dianggap tidak sesuai dengan strategi *Niponisasi* Jepang. Karena dualisme pendidikan menyebabkan susahny doktrinasi terhadap para pelajar.

b. Kurikulum yang Jepang terapkan

Setelah kegagalan sistem *triple movement*, Jepang merekrut *Ki Hajar Dewantoro* sebagai perwakilan dari pribumi dalam mengatur pendidikan di Indonesia. Beliau diperintahkan Jepang untuk mengkomodifikasi kurikulum lokal dalam pendidikan yang juga diakulturasi dengan kurikulum Jepang. Meskipun menjelang akhir masa pendudukannya, Jepang berindikasi untuk menerapkan sistem *Niponisasi* kembali, yakni dengan dikerahkannya *Sendenbu* (propagator Jepang) untuk menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya.

Jepang juga memandang perlunya melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain:

- 1) Indoktrinasi ideologi *Hakko Ichiu*.
- 2) *Nippon Seisyin*, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang.
- 3) Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang.
- 4) Ilmu bumi dengan perspektif *geopolitics*.
- 5) Olahraga dan nyanyian Jepang.

Sementara untuk pembinaan kesiswaan, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini:

- a) Menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, *Kimigayo* setiap pagi.
- b) Mengibarkan bendera Jepang, *Hinomura* dan menghormati Kaisar Jepang, *Tenno Heika* setiap pagi.
- c) Setiap pagi mereka juga harus melakukan *Dai Toa*, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya.
- d) Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan *Taiso*, senam Jepang.
- e) Melakukan latihan-latihan fisik dan militer.
- f) Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan (Alfabeta, 2000, p. 54).

Pelaksanaan kurikulum ini berlaku hanya tiga tahun sesuai dengan lamanya pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu mulai tahun 1942 sampai tahun 1945. Namun demikian, pada masa Perang Kemerdekaan 1945-1949 sampai dengan Dekrit Presiden 1959, kurikulum tersebut masih digunakan dengan beberapa perubahan yang dianggap perlu sampai dengan keluarnya ketentuan yang mengatur pendidikan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (Alfabeta, 2000, p. 57).

C. Sekolah-Sekolah Jepang

a. Pendidikan Dasar (*Kokumin Gakko*/Sekolah Rakyat)

Lama pendidikan 6 tahun, termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia-Belanda.

b. Pendidikan Lanjutan

Terdiri dari *Shoto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan *Koto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun.

c. Pendidikan Kejuruan

Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian.

c. Pendidikan Tinggi

Setelah penguasaan Jepang, semua sekolah yang bercorak Belanda ditutup. Akibatnya, para guru terpaksa mengartikan segala sumber buku catatan Belanda ke dalam bahasa Jepang dan Indonesia. Lalu, perubahan sekolah akademis menjadi sekolah sekolah vokasi. Pelarangan untuk membangun sekolah swasta yang mengakibatkan ditutupnya Taman Guru dan Taman Madya (Najamuddin, 2005, p. 90). Sementara untuk mendidik guru terdapat 3 jenis sekolah yaitu:

a) Sekolah guru 2 tahun (*Syoto Sihan Gakko*)

b) Sekolah guru 4 tahun (*Gotu Sihan Gakko*)

c) Sekolah guru 6 tahun (*Koto Sihan Gakko*) (Ricklefs, 1998, p. 112)ri.

Gagasan modernisasi Islam direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan modern yang diadopsi dari sistem pendidikan Belanda. Pemerksa pertama dalam hal ini adalah organisasi-organisasi modern Islam seperti Jamiat Khair, Al-Irsyad, Muhammadiyah dan lain-lain. Pada awal perkembangan adopsi gagasan modern pendidikan Islam ini setidaknya terdapat dua kecenderungan pokok eksperimentasi organisasi-organisasi Islam di atas, pertama adalah adopsi sistem dan lembaga pendidikan modern hampir secara menyeluruh, titik tolak modernisasi pendidikan Islam disini adalah sistem dan kelembagaan pendidikan modern, bukan sistem dan lembaga pendidikan tradisional (Wahab, 2004, p. 18).

Eksperimen ini terlihat jelas dilakukan oleh Abdullah Ahmad dengan mendirikannya Madrasah Adabiyah, yang kemudian diubah menjadi sekolah Adabiyah pada tahun 1915. Hanya terdapat sedikit ciri atau unsur dalam kurikulum sekolah (HIS) Adabiyah yang membedakannya dengan sekolah Belanda selain mengadopsi seluruh kurikulum HIS Belanda, sekolah Adabiyah juga menambahkan pelajaran agama dua jam sepekan dalam proses pembelajarannya.

Selaras dengan itu Muhammadiyah mengadopsi sistem kelembagaan pendidikan Belanda secara cukup konsisten dan menyeluruh, misalnya dengan mendirikan sekolah-sekolah model Belanda, seperti: *Mulo*, *His* dan lain-lain. Sementara itu sekolah-sekolah Muhammadiyah membedakan diri dengan sekolah-sekolah Belanda hanya dengan memasukkan pendidikan agama (persisnya dalam istilah Muhammadiyah itu sendiri, *met de Qur'an*) ke dalam kurikulumnya. Muhammadiyah juga bereksperimen dengan sistem dan kelembagaan madrasah modern dengan mendirikan Madrasah Muallimin dan Madrasah Muallimat, tetapi sama dengan sistem kelembagaan sekolah-sekolahnya.

Apakah surau atau pesantren sebagai basisnya, pada pihak lain terdapat eksperimen yang bertitik tolak justru dari sistem dan kelembagaan Islam itu sendiri. Sistem pendidikan madrasah atau surau pondok pesantren yang memang secara tradisional merupakan kelembagaan pendidikan Islam (*indigenous*), dimodernisasi misalnya dengan mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan modern khususnya dalam kandungan kurikulum, teknik dan metode pengajaran. Eksperimen ini pertama kali dilakukan di pesantren *Manba'ul Ulum*, Surakarta pada tahun 1906. Pesantren ini memiliki basis pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu tradisional Islam, seperti: Alquran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan lain-lain. Terdapat juga mata pelajaran mantiq, al-Jabar, dan Ilmu Falak, selain itu pesantren *Manba'ul Ulum* juga memasukkan beberapa mata pelajaran modern ke dalam kurikulumnya seperti membaca (huruf Latin) dan berhitung (Wahab, 2004, p. 21).

Eksperimen ini terkenal dilakukan oleh H. Abdul Karim Amrullah yang pada tahun 1916 M menjadikan surau Jembatan Besi menjadi lembaga pendidikan tradisional Islam di Minangkabau sebagai basis untuk pengembangan madrasah modern yang kemudian lebih dikenal sebagai *Sumatra Thawalib*. Berbarengan dengan itu Zainuddin Labay el-Yunasi mengembangkan madrasah diniyah, yang pada awal perkembangannya merupakan madrasah sore untuk memberikan pelajaran agama pada murid-murid sekolah. Kemudian disusul pada tahun 1926 M di pulau Jawa membentuk pondok pesantren modern Gontor di Ponorogo. Perlunya modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam memiliki makna filosofis yang mendalam bahwa pesantren lebih berakar kuat dan mendalam oleh sebab itu lebih *acceptable* bagi kaum muslim.

Kedua bentuk eksperimen ini pada dasarnya terus berlanjut hingga dewasa ini, dengan ini kita melihat dua arus utama: pertama, sistem dan kelembagaan pendidikan Islam yang merupakan pendidikan umum dengan penekanan seadanya pada aspek-aspek pengajaran Islam. Termasuk dalam kategori ini adalah madrasah pasca-UUSPN 1989, yang secara eksplisit menyatakan bahwa madrasah-madrasah adalah sekolah umum yang berciri keagamaan. Kedua, sistem dan kelembagaan pesantren yang dalam banyak hal telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan, modernisasi pembangunan menemukan momennya akhir taun 1970-an.

Hal-hal yang menguntungkan Indonesia pada masa penjajahan Jepang yaitu bahasa Indonesia berkembang di seluruh kepulauan. Buku-buku bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena dalam perang hak cipta internasional diabaikan. Bahasa asing selain bahasa Jepang dilarang (H. A. R. Tilaar, 1995, p. 122). Seni bela diri dan perang dimiliki oleh pemuda-pemuda, khususnya untuk pelajar Indonesia ternyata berguna di dalam perang kemerdekaan Indonesia yang terjadi di kemudian hari. Perasaan rindu kepada kebudayaan dan kemerdekaan nasional berkembang dan bergejolak secara luar biasa. Karena dalam suasana perang serba kekurangan kreativitas para guru berkembang misalnya apabila tidak memperoleh buku dari kantor pengajaran (*Bunkyo Kyoku*) maka mereka menerjemahkan langsung buku-buku bahasa asing.

Alat-alat perang yang diciptakan dari bahan-bahan yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan dan agama ditiadakan sehingga semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Bangsa Indonesia dilatih dan dididik untuk memegang jabatan pimpinan walaupun di bawah pengawasan orang-orang Jepang. Sekolah-sekolah diseragamkan dan di negerikan meskipun sekolah-sekolah swasta seperti Muhammadiyah, Taman Siswa, dan sekolah-sekolah bekas *Zending* dan *Missei* diizinkan terus berkembang tetapi di bawah pengaturan sekolah negeri.

BAB IV

PENDIDIKAN ISLAM SETELAH KEMERDEKAAN

Oleh: Siti Aisyah, Dedi Nurniadi, Rabiatul Adawiyah, Herwina Azhabi, Syam's Ismail Ghifari

A. Kebijakan Pendidikan Islam di masa Awal Kemerdekaan

1. Pendidikan Agama Sub-Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan agama sub-sistem pendidikan nasional berkaitan dengan sistem, kurikulum dan metode pendidikan pada masa Orde Lama, terutama pada sekolah-sekolah umum. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia mengalami integritas pendidikan dan pencapaian bidang penguatan perlawanan terhadap penjajah dan memperkuat kesatuan bangsa. Sistem pendidikan di Indonesia pada masa Orde Lama ditandai juga dengan berdirinya Sekolah Rakyat (SR), kurikulumnya diajarkan selama 6 tahun. Kurikulum yang diajarkan pada Sekolah Rakyat ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertanggal 19 November 1946 dengan nomor keputusan No. 1153/Bhg A di mana isi keputusan tersebut menyatakan bahwa, *“kurikulum yang diajarkan wajib memuat dan memperkuat pelajaran bahasa Indonesia, hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran peserta didik, meningkatkan pemahaman peserta didik, serta meningkatkan semangat nasionalis untuk mempertahankan nilai-nilai perjuangan para pejuang dalam meraih kemerdekaan dari kolonial”* (Syamsuddin, 1993, pp. 19–20).

Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum, dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20 (tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta). Sebelumnya ada ketetapan bersama Departemen PKK dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari Tahun 1951. Berdasarkan pada ketentuan keberlakuan pendidikan agama tersebut melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Pengajaran bahwa kemunculannya berdasarkan pada awal terbentuknya kurikulum yang dituliskan dalam status sistem pendidikan secara nasional (hal ini juga berlaku sejak ditetapkannya pada tanggal 20 Januari 1951).

ketetapan Menteri Pendidikan dan Pengajaran pada tanggal 20 Januari 1951 tersebut merupakan perpanjangan maklumat dari Presiden Sukarno yang diamanatkan kepada wakil Presiden (Mohammad Hatta) bahwa perlunya dan ditetapkannya dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah di NKRI agar pendidikan dan pengajaran tersebut dapat diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai nasional bangsa Indonesia. Ketetapan itu menegaskan bahwa:

- a) Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam per minggu. Di lingkungan istimewa, pendidikan agama dapat dimulai dari kelas 1 dan jam pelajarannya boleh ditambah sesuai kebutuhan, tetapi dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.

- b) Di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
- c) Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sebanyak 10 orang dalam 1 kelas dan mendapat izin dari orang tua dan walinya.
- d) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Kemudian daripada itu selain dalam penguatan terhadap kecintaan kepada kesatuan Negara Republik Indonesia, tujuan dari pembelajaran yang diajarkan pada peserta didik khususnya pada tingkatan menengah pertama ada dua jenis sekolah yang dikembangkan, yaitu:

(1) Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah ini serupa dengan masa pendidikan pada waktu Jepang menjajah. Untuk kurikulum pendidikan diberikan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pasti. Akan tetapi pada hakikatnya mata pelajaran yang ditekankan dalam kurikulum ini adalah praktik administrasi dan bahasa.

(2) Sekolah Menengah Tinggi (SMT)

Sekolah Menengah Tinggi hanya berada di pulau Jawa, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Cirebon. Sedangkan di luar pulau Jawa pusat administrasi pemerintahan dalam kementerian pendidikannya di bawah pengawasan provinsi daerah masing-masing. Sistem pendidikannya memuat tentang;

- 1) Pemenuhan akan kebutuhan nasional. Intinya bahwa tetap pada sistem pendidikan pada tahun 1945, yakni penguatan terhadap nasionalisme.
- 2) Penguatan terhadap bahasa Indonesia, tujuan pendidikan ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap kultur dan budaya Indonesia.
- 3) Mutu pendidikannya harus setara dengan Sekolah Menengah Pertama. Di mana untuk ujian akhir dilaksanakan oleh masing-masing sekolah selama belum adanya ujian Negara (atau saat ini disebut dengan ujian Nasional).

Selain dari dua sekolah di atas, terdapat sekolah kejuruan (atau saat itu disebut dengan sekolah *vokasional*). Pendidikan kejuruan ini berfokus pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Sistem pendidikannya memuat tentang:

- a) Pembelajaran dagang atau pembelajaran yang menekankan pada aspek perdagangan. Sekolah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau pembukuan. Penyelenggaraan sekolah ini dikomandoi langsung oleh inspektur sekolah dagang.
- b) Pembelajaran tentang emansipasi kewanitaan. Pembelajaran ini diadakan di Sekolah Kepandaian Putri (SKP) kemudian di tahun 1947 berubah menjadi Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) di mana kurun waktu pembelajarannya dilaksanakan selama 4 tahun belajar (Rifa'i, 2016, pp. 138–139).

Sebelum Indonesia merdeka mengenai berdirinya Taman Siswa sebagai cikal bakal pendidikan nasional seiring bersamaan dengan berdirinya sistem, kurikulum dan

tujuan pendidikan secara nasional pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Prinsip berdirinya taman siswa ini adalah *patrap triloka* di mana konsep kebangunan ini adalah; a) yang di depan memberi teladan, b) yang di tengah membangun kemauan/inisiatif, dan, c) dari belakang mendukung. Dengan tiga konsep dasar berdirinya *patrap triloka* ini sebagai patronis pembangunan bangsa secara nasional, dari konsep ini pula lahir kebangunan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

2. Pesantren, Madrasah dan Sekolah

Pesantren, madrasah dan sekolah termasuk ke dalam sistem, kurikulum dan metode pendidikan pada pondok pesantren, madrasah *ibtidaiyah*, *tsanawiyah* dan *aliyah* masa Orde Lama. Keberadaan pondok pesantren sebelum Indonesia merdeka diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Pada masa kolonialisme, dari pondok pesantren banyak lahir tokoh-tokoh nasional yang tangguh yang menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan Indonesia, seperti: KH. Hasyim Asyari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Zaenal Mustopa dll. Maka dapat dikatakan bahwa masa itu Pondok pesantren memberikan kontribusi yang besar bagi terbentuknya republik ini. Bila dianalisis lebih jauh kenapa dari lembaga pendidikan yang sangat sederhana ini muncul tokoh-tokoh nasional yang mampu menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah, jawabannya karena figur kiai sebagai pimpinan pondok pesantren sangat dihormati dan disegani, baik oleh komunitas pesantren (santri) maupun masyarakat sekitar pondok. Mereka meyakini bahwa apa yang diucapkan kiyai adalah wahyu Tuhan yang mengandung nilai-nilai kebenaran hakiki (*Ilahiyyah*).

Pasca kemerdekaan, pondok pesantren mengalami perkembangan pasang surut dalam mengemban misinya sebagai pencetak generasi kaum muslim yang mumpuni dalam bidang agama (*tafaqquh fiddien*). Pada periode transisi antara tahun 1950-1965, pondok pesantren mengalami fase stagnasi, di mana kyai yang disimbolkan sebagai figur yang ditokohkan oleh seluruh elemen masyarakat Islam, terjebak pada percaturan politik praktis, yang ditandai dengan bermunculannya partai politik bernausa Islami pada pemilu pertama tahun 1955, contohnya dengan lahirnya Partai Politik Nahdlatul Ulama (NU) yang mewaliki warga Nahdiyyin. Partai politik tersebut dapat dikatakan merepresentasikan dunia pondok pesantren. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengurus dari parpol tersebut adalah kiyai pimpinan pondok pesantren.

Dapat dikatakan bahwa atensi atau perhatian para ulama/tokoh agama pada pembinaan pendidikan agama Islam di era Orde Lama bertransmisi dalam percaturan politik Indonesia. Perlakuan ini dilakukan untuk menjaga eksistensi agama Islam sebagai basis mayoritas di Indonesia. Masyarakat pada umumnya beraliran sama dengan tokoh agama, untuk mempertahankan nilai-nilai Islam, perlu adanya elit politik yang diduduki oleh lintas agama/tokoh agama sebagai penyeimbang antara kekuatan politik pemerintahan Orde Lama dengan masyarakat muslim Indonesia. Pada tahun 1955 sebagai awal percaturan politik pemilu dilaksanakan sebagai tindakan yang

preventif/perlawanan terhadap kurangnya perhatian pemerintah Orde Lama terhadap pendidikan agama Islam.

Pembinaan pendidikan agama setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah secara formal intitusional memberikan kepercayaan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Dalam Undang-Undang no. 12 tahun 1950 itu juga terdapat pasal yang mengupas tentang pendidikan dan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri. Pasal ini terdapat pada Bab XII pasal 20 yang berbunyi:

- (a) Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran Agama. Orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
- (b) Cara menyelenggarakan pelajaran yang ditetapkan oleh menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan bersama-sama dengan menteri agama (Hasbullah, 1999, p. 77).

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur di samping pelajaran umum. Dengan persyaratan tersebut, diadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat. Jenjang pendidikan pada sistem madrasah pada masa itu terdiri dari tiga jenjang, yaitu:

- a. Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun;
- b. Madrasah Tsanawiyah Pertama pendidikan 4 tahun;
- c. Madrasah Tsanawiyah Atas pendidikan 4 Tahun.

Sedangkan kurikulum madrasah terdiri dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya adalah pelajaran umum. Rumusan kurikulum tersebut bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan madrasah tidak cukup hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga harus mengajarkan pendidikan umum. Kebijakan seperti itu untuk menjawab kesan tidak baik yang melekat kepada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah umum.

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan, khususnya di wilayah Minangkabau. Tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia. Perhatian dan perlakuan pada masa

pemerintahan Orde Lama terhadap pendidikan agama Islam merupakan bentuk perlakuan bersifat edukasi. Hal ini menandakan bahwa pendidikan agama Islam yang diajarkan di madrasah dan berdirinya pendidikan hakim Islam negeri dimulainya masa percayanya pemerintah Orde Lama terhadap perkembangan pendidikan agama Islam. Dengan berdirinya pendidikan guru agama dan pendidikan hakim Islam negeri turut meningkatkan persepsi masyarakat dan tokoh agama terhadap pemerintahan Orde Lama khususnya pendidikan agama Islam.

Sejarah perkembangan PGA dan PHIN bermula dari program Departemen Agama yang secara teknis ditangani oleh Bagian Pendidikan. Pada tahun 1950, bagian itu membuka dua lembaga pendidikan dan madrasah profesional keguruan. Sekolah Guru Agama Islam (SGAI), SGAI terdiri dari dua jenjang:

- (1) Jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan SR/MI.
- (2) Jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah.

Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI), SGHAI ditempuh selama 4 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah, SGHAI memiliki empat bagian:

- (1) Bagian "a" untuk mencetak guru kesusastraan.
- (2) Bagian "b" untuk mencetak guru Ilmu Alam/Ilmu Pasti.
- (3) Bagian "c" untuk mencetak guru agama.
- (4) Bagian "d" untuk mencetak guru pendidikan agama.

Dari keterangan di atas, jelaslah dikatakan bahwa peran, persepsi dan perlakuan pemerintah masa orde lama terhadap kedudukan pendidikan agama Islam dilaksanakan dalam penguatan pemahaman masyarakat terhadap hukum Indonesia berbasis hukum konstitusional dengan tidak menghilangkan pengaruh pendidikan agama Islam. Karenanya pengaruh pendidikan agama Islam tersebut diimplementasikan ke dalam lembaga atau instansi pemerintahan formal, yakni madrasah dan sekolah umum sampai pada perguruan tinggi yang di dalamnya memuat tentang pemahaman terhadap kurikulum pendidikan agama Islam. Hal inilah yang menandakan bahwa persepsi dan perhatian pemerintah Orde Lama terhadap perkembangan pendidikan agama Islam mendapatkan tempatnya bersamaan dengan semangat jihad tokoh agama dan masyarakat berbaur dalam pemerintahan Orde Lama.

Perguruan Tinggi Islam khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, fakultas agama UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) di bawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1957, di Jakarta didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinasi di pemerintahan (Kementerian Agama) dan

untuk pengajaran agama di sekolah. Pada tahun 1960 PTAIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN.

Pada masa pemerintahan Orde Lama inilah kejayaan dan kebangunan modernisasi perubahan pendidikan agama Islam dari PTAIN dan ADIA membentuk institusi agama berbasiskan IAIN. Perhatian dan perlakuan tokoh agama dan masyarakat terhadap kebangunan pendidikan agama Islam pada masa orde lama turut dilihat dengan berpartisipasi mereka dalam mengkaji dan memperdalam ilmu agama di IAIN.

Pada masa ini antara tahun 1945-1950, pendidikan tinggi dibuka bagi masyarakat umum tanpa adanya syarat tertentu. Lembaga pendidikan tinggi yang dibangun pada tahun ini dilakukan melalui perjuangan fisik. Maka kemudian sistem pembelajarannya dilaksanakan disela waktu dalam perjuangan garis depan. Lembaga pendidikan tinggi ini bernama Universitas Gajah Mada, beberapa sekolah tinggi dan akademi juga dibangun di Jakarta. Sedangkan sekolah tinggi lainnya juga ada di daerah Klaten, Solo, dan Yogyakarta sendiri. Sistem pendidikannya diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1950. Jenis atau pola pendidikan diajarkan di perguruan tinggi ini adalah:

- a. Pendidikan dan pengajaran tinggi diajarkan dengan tujuan memberikan kesempatan pelajar untuk menjadi orang yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan, terutama dari sisi perjuangan pasca kemerdekaan. Masyarakat banyak hidup dalam kelas ekonomi ke bawah, karenanya peran *output* dalam substansi yang dibangun ini adalah siap mengabdikan diri pelajarnya di masyarakat (Syamsuddin, 1993, p. 11).
- b. Pendidikan dan pengajaran tinggi diajarkan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada Negara. Kebangunan pemikiran yang dikonsepskan dalam mata kuliah ini adalah untuk tetap menjaga dan mengeksplorasikan nilai-nilai juang para pahlawan kepada pelajar.

Perkembangan pendidikan tinggi pada masa Orde Lama ini kendati mengalami berbagai tantangan, tetapi tidak juga dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Mengenai hal ini salah satu kekuatan dari seluruh rakyat perjuangan terhadap kemerdekaan diawali juga dengan pendirian sekolah tinggi kedokteran sebagai transformasi berdirinya Ika Daigaku. Pada bulan November 1946 dibuka pula sekolah tinggi hukum serta filsafat dan sastra.

Setelah agresi militer Belanda pertama, kedua lembaga pendidikan tinggi terakhir itu (Sekolah Tinggi Hukum Filsafat dan Sastra serta Sekolah Tinggi Kedokteran) ditutup oleh Belanda sehingga secara resmi sudah tidak ada lagi. Dengan demikian pendidikan tinggi pada masa itu terbagi ke dalam dua sistem, yaitu: a) pendidikan tinggi republik, b) pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda.

Adapun pendidikan tinggi yang dibangun pada masa (1945-1950) dalam buku Haidar Putra Daulay, terbagi ke dalam:

- a) Sekolah tinggi republik didirikan pada tanggal 17 Februari 1946 oleh Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta;
- b) Balai perguruan tinggi Gajah Mada didirikan pada tanggal 3 Maret 1946 oleh Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada, yang terdiri dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusasteraan di Yogyakarta;
- c) Perguruan tinggi kedokteran dan kedokteran gigi didirikan pada bulan Februari 1946 di Malang;
- d) Perguruan tinggi kedokteran I didirikan pada tanggal 4 Maret 1946 di Solo;
- e) Perguruan tinggi kedokteran II didirikan pada tanggal 5 Maret 1946 di Klaten;
- f) Fakultas pertanian dan fakultas farmasi berdiri pada tanggal 27 September di Klaten. Semua perguruan tinggi yang tercantum pada poin d, e, dan f berada di bawah Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Klaten;
- g) Perguruan tinggi kedokteran hewan, didirikan pada bulan November 1946 oleh Kementerian Kemakmuran Republik Indonesia di Bogor, namun karena adanya gejatan senjata oleh Agresi Militer 1 oleh Belanda pada bulan Juli 1947, perguruan tinggi tersebut (poin d, e dan f dipindahkan ke Malang);
- h) Universitas Gajah Mada didirikan pada tanggal 19 Desember 1949 di Yogyakarta, yang terdiri dari enam fakultas (Hasan & Ali, 2003).

3. Pendidikan Islam pasca Kemerdekaan

a. Sebagai Lembaga

Pendidikan agama yang diajarkan di lembaga pendidikan umum dari tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi berdasarkan pada sistem pendidikan nasional pemerintah yang dituangkan pada keputusan Presiden Sukarno melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Pengajaran tertanggal 20 Januari 1951. Sedangkan lembaga pendidikan seperti madrasah ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun dan untuk pendidikan agamanya diberikan 6 jam perminggunya. Madrasah tsanawiyah pertama pendidikan 4 tahun dan diberi pendidikan agama 6 jam perminggunya serta madrasah tsanawiyah atas pendidikan 4 tahun diberikan pendidikan agama 4 jam perminggunya. Kemudian pendidikan agama di pondok pesantren diberikan selama 24 jam perminggunya. Hal ini mengingat bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengajarkan tentang berbagai metode, di antaranya adalah metode *sorogan*, yakni sebuah metode yang diajarkan atau cara penyampaianya dilakukan secara bergilir (Dhafoer, 1984, p. 30).

Metode *wetonan*, yakni sebuah metode ajar dengan cara gurunya membaca, menerjemahkan, menerangkan kemudian mengulas buku-buku Islam atau kitab kuning sementara santrinya mendengarkan (Muhammad, 1999, p. 283). Kemudian menggunakan metode *bandongan*, di mana gurunya membuat lingkaran kemudian menginstruksikan murid-muridnya untuk maju satu persatu ditambah dengan materi yang diajarkan. Lembaga-lembaga pendidikan pada masa kemerdekaan Indonesia tidak

terlihat integrative antara pendidikan formal dan non-formal, sebab berdasarkan pada keputusan Presiden Sukarno pada tanggal 20 Januari 1951 tersebut belum memuat unsur lembaga pendidikan non-formal, karenanya sistem pendidikan nasional yang dilahirkan melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Pengajaran tersebut sifatnya masih pada tatanan pragmatis, yakni mengenai pendidikan agamanya saja. Sedangkan pada masa Orde Baru dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Bahwa pendidikan agama merupakan pendidikan yang wajib diajarkan di sekolah, madrasah, maupun di pondok pesantren. Ketiga lembaga pendidikan tersebut menjadi pondasi dasar dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Sebagai Mata Pelajaran

Setelah menguraikan penjabaran lembaga pendidikan di atas sebagai sub-sistem pendidikan nasional yang tertuang pada tanggal 20 Januari 1951 tersebut, terlihat bahwa lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan agama di atas adalah wilayah masing-masing sekolah, madrasah dan pesantren yang telah ditentukan pemerintah. Adapun mata pelajaran yang diajarkan wajib pada masa orde lama ini (berdasarkan pada keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 20 Januari 1951) adalah mata pelajaran Alquran dan hadis serta sejarah kebudayaan Islam. Sementara mata pelajaran akidah akhlak dan fikih tidak diajarkan sebagai mata pelajaran agama yang wajib di sekolah umum, namun di lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren diajarkan. Berdasarkan hal ini penulis menganalisis bahwa mata pelajaran agama yang wajib diajarkan di lembaga pendidikan umum hanya 3 mata pelajaran agama, sedangkan selebihnya diajarkan di lembaga pendidikan agama.

4. Sistem Pendidikan

Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an sampai dengan 1990-an. Pada masa pemerintahan Orde Baru, lembaga pendidikan madrasah dikembangkan dalam rangka dan bertujuan untuk pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan (Hasbullah, 1999). Haluan penyelenggaraan pendidikan dikoreksi melalui Tap MPR No. XXII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan kebudayaan ketetapan ini memuat tujuh pasal di antaranya sebagai berikut:

- (1) Mengubah diktum ketetapan MPRS No II/MPRS/1960 Bab II pasal 2 ayat (3) dengan menghapus kata “.....dengan pengertian bahwa murid-murid dewasa menyatakan keberatannya.....” Sehingga kalimatnya berbunyi sebagai berikut: “menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri” (pasal 1).
- (2) Dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila (pasal 2).

- (3) Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan undang-undang dasar 1945 dan isi UUD 1945.

Agar mencapai dasar dan tujuan tersebut, isi pendidikan adalah sebagai berikut:

- (1) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama.
- (2) Mempertinggi kecerdasan-kecerdasan dan keterampilan.
- (3) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Dengan demikian sejak tahun 1966, pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari sekolah dasar sampai pemerintah dan rakyat guna membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan tekad dan semangat tersebut, kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya memperoleh tempat yang kuat dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Sebagaimana perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama, perkembangan pada Orde Baru juga dapat dibagi dalam:

a. Sistem, Kurikulum, Metode dan Tujuan Madrasah Pada Masa Orde Baru

Pada tahun 1967 terbuka kesempatan untuk menerbitkan madrasah swasta untuk semua tingkatan, Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Namun ketentuan itu hanya berlangsung 3 tahun, dan dengan alasan pembiayaan dan fasilitas yang sangat terbatas, maka keluarnya Keputusan Menteri Agama No. 213 tahun 1970 tidak ada lagi penerbitan bagi madrasah-madrasah swasta. Namun kebijakan tersebut tidak berlangsung lama, memasuki tahun 2000 kebijakan penerbitan dimunculkan kembali (Nizar, 2010, p. 361), sistem pendidikan pada masa ini ditandai dengan:

(1) Kesejajaran Madrasah dan Sekolah Umum

Lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. SKB ini muncul dilatarbelakangi bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah yang ingin melanjutkan, diperkenankan melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang setingkat di atasnya. Bagi siswa madrasah yang ingin pindah sekolah dapat pindah ke sekolah umum setingkat. Ketentuan ini berlaku mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi.

Lahirnya MAPK ditandai dengan dilatarbelakangi akan kebutuhan tenaga ahli di bidang agama Islam ("ulama") di masa mendatang sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Maka dilakukan usaha peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah. Lebih lanjut dibentuklah Madrasah Aliyah Pilihan Ilmu-Ilmu Agama

(MAPK) dengan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Kekhususan MAPK ini adalah komposisi kurikulum 65 studi agama dan 35 pendidikan dasar umum. Sasarannya adalah penyiapan lulusan yang mampu menguasai ilmu-ilmu agama yang nantinya menjadi dasar lulusan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bidang keagamaan dan akhirnya menjadi calon ulama yang baik. Selanjutnya MAPK berganti nama menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Namun lebih lanjut program ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga nasibnya sampai hari ini belum jelas keberadaannya.

(2) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Perkembangan pendidikan pondok pesantren pada periode Orde Baru, seakan tenggelam eksistensinya karena seiring dengan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada kepentingan umat Islam. Setitik harapan timbul untuk nasib umat Islam setelah terjadinya era reformasi, pondok pesantren mulai berbenah diri lagi dan mendapatkan tempat lagi di kalangan pergaulan nasional. Salah satunya adalah pendidikan pondok pesantren diakui oleh pemerintah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pondok pesantren tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan tradisional yang illegal, namun pesantren diakui oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai kesetaraan dalam hak dan kewajibannya dengan lembaga pendidikan formal lainnya (Maliki, 2010, p. 6).

Perhatian dan perlakuan pemerintah Orde Baru terhadap dunia pendidikan di pondok pesantren merupakan bentuk atensi yang normatif, sebab di samping Indonesia berpenduduk mayoritas muslim, juga memiliki pondok pesantren terbanyak. Hal inilah yang menandakan bahwa perlakuan pemerintah pada masa Orde Baru memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan akhlak manusia. Pada masa ini pondok pesantren terbagi ke dalam tiga bagian, yakni:

(a) Pesantren salafiyah

Pesantren ini tidak mengajarkan pendidikan mata pelajaran non-agama, tidak perlu ujian nasional, kajiannya adalah berfokus pada kitab kuning. Sifat pesantren ini adalah tradisional, tidak perlu melanjutkan ke perguruan tinggi yang bersifat umum. Pondok pesantren salafiyah ini juga tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah, pondok pesantren salafiyah ini juga dalam kesehariannya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi komunikasi antara santri dengan kiai, namun aspek kelemahan dalam pondok pesantren salafiyah ini adalah lemah terhadap penggunaan teknologi atau IPTEK, akan tetapi tujuan akhir dari pesantren salafiyah ini adalah *ukhrawi* (urusan akhirat).

(b) Pesantren Khalafi

Pesantren ini mengajarkan kombinasi antara kajian kitab kuning dengan mata pelajaran umum serta mengaktualisasikan antara kajian kitab kuning dengan mata pelajaran umum setiap harinya. Pelaksanaan pendidikan di pondok pesantren khalafi ini menggunakan SKB 3 menteri, ikut ujian nasional, pendidikannya berlanjut bisa ke Aliyah atau ke SMA, bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya canggung, namun perkembangan agama dan umum tetap berlanjut.

(c) Pesantren modern

Pondok pesantren modern ini cenderung tidak menggunakan kitab kuning, ikut ujian nasional, menguasai bahasa Inggris dan kurang menguasai bahasa Arab. Ketekunannya adalah mendalami ilmu teknologi dan kurang mendalami ilmu agama, menguasai teknologi dan manajemen, alumni pondok pesantren modern ini bisa berlanjut sampai ke pendidikan tinggi umum.

(3) Perguruan Tinggi Agama Islam

IAIN sebagai salah satu bagian dari PTAI, merupakan bagian dari salah satu sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia. IAIN didirikan pada awal tahun 1960 sebagai suatu respon atas kebutuhan pemerintah akan tenaga pendidik yang ahli di bidang ilmu-ilmu keislaman, untuk mengembangkan sistem pendidikan madrasah. Akhirnya dalam perkembangannya IAIN jumlahnya semakin bertambah dan berkembang.

Perkembangannya sejak masa Orde Baru bukan saja pada aspek fisiknya tetapi juga pada aspek tenaga pendidik atau dosennya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Islam akan Ilmu dan pengetahuan serta teknologi peran perguruan tinggi agama Islam semakin bertambah, oleh karena itu beberapa tahun ini beberapa IAIN telah berkembang menjadi universitas Islam. Dalam pelayanannya, selain memberi pendidikan bidang studi keagamaan juga memberikan pelayanan pendidikan umum. Saat ini Perguruan Tinggi Agama Islam telah tersedia 15 IAIN, 6 UIN dan 31 STAIN.

Sementara itu kurikulum pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut:

- (a) Pesantren klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama, yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah;
- (b) Madrasah diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun;
- (c) Madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern, yang bersamaan dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran-pelajaran umum;
- (d) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), yaitu sekolah dasar negeri enam tahun, di mana perbandingan umum kira-kira 1:2;

- (e) Suatu percobaan baru telah ditambahkan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 tahun, dengan menambahkan kursus selama 2 tahun, yang memberikan latihan ketrampilan sederhana;
- (f) Pendidikan teologi agama tertinggi. Pada tingkat universitas diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN. IAIN ini dimulai dengan dua bagian/dua fakultas di Yogyakarta dan dua fakultas di Jakarta.

Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN sejak tahun 1973 hingga sekarang selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan. Bahkan pendidikan agama sudah di kembangkan sejak Taman Kanak-kanak (Bab V pasal 9 ayat I PP nomor 27 tahun 1990 dalam UU nomor 2 tahun 1989). Pendidikan Islam menempati kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan manusia seutuhnya.

Hal ini mudah dimengerti karena bangsa Indonesia yang beragama tidak dapat melepaskan agamanya dari setiap aktivitas pendidikan yang dilakukannya. Secara komprehensif agama bagi bangsa Indonesia adalah “generator” pembangkit listrik bagi pengisian aspirasi dan inspirasi bangsa. Agama merupakan alat pengembangan dan pengendalian bagi bangsa Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan di segala sektor-sektor. Bentuk perhatian dan perlakuan pemerintah pada masa Orde Baru terhadap pendidikan agama Islam merupakan bentuk partisipatif kekinian, sebab dengan mengedepankan pembangunan pondok pesantren, pendidikan agama di sekolah umum dapat membantu pemerintah dalam pencarian alumni-alumni yang dididik dan ditempatkan sebagai produk Islami, oleh karenanya berdirinya MTQ sebagai ajang kompetisi Alquran juga turut menciptakan generasi bangsa yang Qurani. Sedangkan kurikulum pada masa Orde Baru terbagi menjadi:

a) Kurikulum 1968

Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dengan suatu pertimbangan untuk tujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pada pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Muatan materi pelajaran bersifat teoretis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan (K.Rujiati, 2010, p. 65). Pada masa ini siswa hanya berperan sebagai pribadi yang massif, dengan hanya menghafal teori-teori saja, tanpa ada mengaplikasikan dari teori lain. Aspek afektif dan psikomotorik tidak ditonjolkan pada kurikulum ini. Praktis, kurikulum itu hanya menekankan pada pembentukan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja.

b) Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasarkan pada MBO (*Management by Objective*). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI), yang

dikenal dengan istilah 'satuan pelajaran' yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi; tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi.

Pada kurikulum ini peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib memuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung. Tiap guru harus detail dalam perencanaan pelaksanaan program belajar-mengajar. Setiap tatap muka telah diatur dan dijadwalkan sedari awal. Dengan kurikulum ini semua proses belajar-mengajar menjadi sistematis dan bertahap (H. A. Tilaar, 2000, p. 130).

c) Kurikulum 1984

Kurikulum ini mengusung sebuah tema dengan judul '*Process Skill Approach*' proses ini merupakan sebuah kurikulum yang menjadi lebih penting dalam pelaksanaannya. Peran siswa atau peserta didik dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini juga disebut sebagai Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL). CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pada kurikulum ini siswa diposisikan sebagai subjek dalam proses belajar-mengajar. Siswa juga diperankan dalam pembentukan suatu pengetahuan dengan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan sesuatu.

d) Kurikulum 1994

Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini bentuk operasi kepada peserta didik mulai terjadi dengan beratnya beban belajar siswa, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain.

Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Siswa dihadapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menerima atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi.

B. Pendidikan Islam di Sistem Pendidikan Nasional

Membahas pendidikan berarti membicarakan tentang masalah diri manusia sendiri sebagai makhluk yang dipersiapkan Allah SWT menjadi khalifah-Nya untuk menjaga, memakmurkan, melestarikan bumi dalam kerangka mengabdikan kepada-Nya. Pendidikan Islam dikaitkan dengan konsepsi kejadian manusia yang dari sejak awal kejadiannya

sebagai makhluk yang paling sempurna yang dibekali potensi hidayah akal dan ilmu. Maka itu merupakan proses panjang yang tidak berkesudahan sehingga siap untuk memikul amanat Allah SWT dan tanggung jawab sepanjang dunia masih ada. Oleh sebab itu problematika pendidikan Islam yang muncul selalu *complicate* serumit persoalan manusia itu sendiri (Muhaimin, 2009, p. 76).

Pendidikan Islam dan keberadaanya sebagai bagian dalam pembangunan bangsa di Indonesia, memiliki peranan yang sangat penting dan ini berlangsung sejak jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat praktik pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh umat Islam melalui majelis taklim, pengajian, baca tulis Alquran baik di rumah-rumah guru maupun di lembaga- lembaga pendidikan seperti: di Aceh ada meunasah, rangkang, dayah, selanjutnya ada surau, masjid, pesantren, madrasah yang masih ada hingga sekarang. Setelah kemerdekaan Indonesia penyelenggaraan pendidikan Islam semakin memperoleh pengakuan dan payung hukum dengan adanya berbagai produk perundang-undangan tentang Pendidikan Nasional.

Dalam proses selanjutnya, pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 dinyatakan bahwa “*pemerintah akan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.*” Sejumlah kebijakan dalam dunia pendidikan pun kemudian dikeluarkan oleh pemerintah. Ada yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan ada pula yang kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai bentuk kebijakan baru menyikapi kebijakan pendidikan pada era Orde Baru, lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang merupakan salah satu produk Undang-Undang tentang pendidikan sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya. Undang-undang tersebut diikuti oleh seperangkat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai kebijakan yang mengatur pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, ataupun tentang pendidikan luar biasa dan pendidikan luar sekolah, dan sebagainya.

Jika ditelusuri dari sejarah bangsa Indonesia setelah merdeka pendidikan di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu :

1. Awal Kemerdekaan (1945-1950)
2. Era Demokrasi Liberal (1951-1959)
3. Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
4. Era Orde Baru (1966-1998)
5. Era Reformasi (1998-2011)
6. Era Rekonstruksi (2012-2019)

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam didefinisikan sebagai proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya (Umar, 2010, p. 29). Menurut Zarkowi Soejoeti sebagaimana yang dituturkan oleh M. Ali Hasan dan Mukti Ali, terbagi dalam tiga pengertian. Pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya, maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Kedua, jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain. Ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan (Hasan & Ali, 2003, p. 45).

Zakiah Darajat berpendapat pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim, atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam (Daradjat, 2011, p. 28). Muhammad Quthb yang dikutip oleh Abdullah Idi, menyatakan pendidikan Islam adalah usaha melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, baik dari segi jasmani maupun rohani, baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya, dalam kegiatan di bumi ini (Idi & Suharto, 2006, p. 48).

Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat (Langgulung, 1980, p. 94). Sejalan dengan itu, Muhammad Atiyah Al-Abrasyi berpendapat bahwa pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang berdasarkan pada etika Islam, pembentukan moral, dan latihan jiwa (Al-Abrasyi, 1991, p. 1).

Sedangkan Haidar Putra Daulay memberikan kesimpulan atas semua pendefinisian tentang pendidikan Islam, pendidikan Islam baginya adalah proses pembentukan manusia seutuhnya sesuai dengan tuntunan Islam (Daulay, 2014b, p. 15). Lebih tegas lagi beliau menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik jasmani maupun rohani, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah SWT, manusia dan alam semesta (Daulay, 2012a, p. 1).

2. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam menurut 'Atiyah Al-Abrasyi dalam Haidar Putra Daulay bahwa erat kaitanya dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai 'abd Allah, yaitu:

1. Membantu pembentukan akhlak mulia;
2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat;
3. Menumbuhkan ruh ilmiah (*scientific spirit*);
4. Menyiapkan peserta didik dari segi profesional;
5. Persiapan untuk mencari rezeki (Daulay, 2012a, p. 3).

Muhammad Fadil al-Jamali, mengemukakan tujuan pendidikan Islam, yaitu:

1. Memperkenalkan kepada manusia akan tempatnya di antara makhluk, dan akan tanggungjawab persoalan dalam hidup ini;
2. Memperkenalkan kepada manusia tentang hubungan sosialnya dan tanggungjawabnya dalam rangka suatu sistem sosial manusia;
3. Memperkenalkan kepada manusia tentang makhluk (alam), dan mengajaknya untuk memahami hikmat (rahasia) penciptaannya dan memungkinkan manusia untuk menggunakannya;
4. Memperkenalkan kepada manusia tentang pencipta alam ini (Daulay, 2014a, p. 79).

Dalam UU No. 2 tahun 1989 Bab II Dasar, Fungsi dan Tujuan: Pasal 4 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Selanjutnya UU No. 20 tahun 2003 Bab II Dasar, Fungsi dan Tujuan: Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari uraian di atas bahwa tujuan pendidikan Islam sebagaimana dirumuskan oleh para ahli tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, bahkan ditemukan beberapa kesamaan berkaitan dengan tujuan pendidikan yakni mengembangkan seluruh potensi manusia untuk membentuk akhlak mulia, beriman dan bertaqwa

kepada sang Pencipta, profesional dan bertanggungjawab sebagai makhluk sosial.

3. Pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003

Secara *de jure* cikal bakal sistem pendidikan nasional dianggap terjadi pada tahun 1922, saat Taman Siswa didirikan Ki Hadjar Dewantara dan secara tegas menyatakan dirinya sebagai “lembaga pendidikan nasional.” Nasionalisme di Taman Siswa pada masa awal ditandai dengan perekrutan guru-guru yang berasal dari aktifis-aktifis pergerakan kemerdekaan, pembiayaan yang dikelola secara otonomi berbasis swadaya kerakyatan daerah dan berpulang kepada nilai-nilai budaya lokal.

Sebelum membahas bagaimana pendidikan Islam dalam UU No. 20 tahun 2003, perlu diketahui bahwa sebelumnya sudah ada produk Undang-Undang di Indonesia setelah merdeka berkaitan dengan pendidikan, yaitu:

1. UU No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pengajaran;
2. UU No. 12 tahun 1954 tentang berlakunya UU No. 2 tahun 1950;
3. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Daulay, 2012b, p. 4).

Secara historis sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam membenahi masalah pendidikan. Secara kronologi catatan sejarah menunjukkan keseriusan dan kesungguhan para pendiri negara ini untuk membenahi pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tahun 1946, membentuk panitia penyelidikan pendidikan dan pengajar.
2. Tahun 1947, Kongres Pendidikan I di Solo.
3. Tahun 1948, membentuk panitia pembentukan Rancangan Undang-Undang Pendidikan.
4. Tahun 1949, Kongres Pendidikan II di Yogyakarta.
5. Tahun 1950, lahirnya UU No. 4 Tahun 1950 Undang-Undang tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUDP).
6. Tahun 1954, lahirnya UU No. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya UU No. 4 Tahun 1950.
7. Tahun 1961, lahirnya Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi. Tahun 1965, lahirnya Majelis Pendidikan Nasional.
8. Tahun 1989, lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN).
9. Tahun 1990, lahirnya PP No. 27, 28, 29, 30 Tahun 1990.
10. Tahun 1991, lahirnya PP No. 72, 73 Tahun 1991.
11. Tahun 1992, lahirnya PP No. 38, 39.
12. Tahun 1999, lahirnya PP No. 60 dan 61.
13. Tahun 2003, lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
14. Tahun 2005, lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

15. Tahun 2005, lahirnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
16. Tahun 2007, lahirnya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Menurut Haidar Putra Daulay bahwa dalam UU No. 20 tahun 2003, memberikan peluang dan kedudukan yang kuat terhadap pendidikan Islam, berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Ada beberapa pasal yang menyinggung tentang pendidikan Islam. Di dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam.

Pertama, kelembagaan formal, non-formal dan informal didudukannya madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang setara kedudukannya dengan sekolah, dengan menegaskan bahwa madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, diakuinya majelis taklim sebagai pendidikan non-formal dan Raudhatul Athfal sebagai pendidikan anak usia dini, dan ditegaskan pula diniyah dan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. *Kedua*, dikokohkannya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. *Ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai (*value*), terdapat seperangkat nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional (Daulay, 2015, p. 57).

Agar lebih jelas bagaimana kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam UU No 20 tahun 2003 sebagai berikut:

- i. Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

- ii. Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional adalah:

Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.

- iii. Pasal 4 ayat (1)

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

iv. Pasal 12 ayat (1)

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh guru/pendidik yang seagama. Tiap sekolah wajib memberikan ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif.

v. Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

vi. Pasal 17 ayat (2)

Pendidikan dasar terbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

vii. Pasal 18 ayat (3)

Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

viii. Pasal 28 ayat (3)

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Salah satu jenis pendidikan nasional adalah pendidikan agama. Setingkat taman kanak-kanak (TK) dinamakan raudatul athfal (RA), sekolah dasar (SD) dinamakan madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dinamakan madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA) dinamakan madrasah aliyah (MA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dinamakan madrasah aliyah kejuruan (MAK).

ix. Pasal 30 Tentang Pendidikan Keagamaan

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Dalam hal ini pendidikan agama merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Di samping sekolah/madrasah formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, madrasah), nonformal (taman pendidikan Al- Qur'an (TPA), majlis taklim) maupun informal (madrasah diniyah).

x. Pasal 36 ayat (3)

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada Peningkatan iman dan takwa, Peningkatan akhlak mulia; dan seterusnya.

xi. Pasal 37

b. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan; dan seterusnya

c. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

12. Pasal 55 ayat (1) mengenai Pendidikan Berbasis Masyarakat

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Haidar Putra Daulay mengklasifikasikan pendidikan Islam dalam UU No. 20 tahun 2003 sebagai berikut:

1. Pendidikan Islam sebagai lembaga

a. Lembaga pendidikan formal

1) Pendidikan dasar (Pasal 17) menyebutkan:

Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

2) Pendidikan menengah (Pasal 18) menyebutkan:

Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

3) Pendidikan tinggi (Pasal 20) menyebutkan:

Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

b. Lembaga pendidikan nonformal (Pasal 26)

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.

c. Lembaga pendidikan informal (Pasal 27)

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri,

d. Lembaga pendidikan usia dini (Pasal 28)

Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

D. Pendidikan Islam Sebagai Mata Pelajaran

Pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib yang harus diberikan pada semua jenjang dan jalur pada pendidikan dasar, menengah dan mata kuliah wajib pada pendidikan tinggi (Daulay & Pasa, 2012, pp. 12–15). Dari pasal-pasal tersebut dapat dicermati bahwa posisi pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan nasional merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Dalam penjelasan pasal 15 UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.

UU No 20 tahun 2003 dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, walaupun ada sebagian pasalnya, pemerintah belum secara proposional merealisasikan, contohnya Pasal 49 ayat 1 tentang anggaran pendidikan.³ Sebenarnya upaya untuk memperbaikinya sudah ada tetapi belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Hal ini sebagaimana dinyatakan Sanaky bahwa usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara professional (Sanaky, 2003, p. 9).

Namun secara umum, dapat dilihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam UU No. 20 tahun 2003, dari pelbagai Pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk

³ Pasal 49 ayat (1) berbunyi: Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).

Jika dicermati dari tiap Pasal UU No. 20 tahun 2003 di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama mempunyai posisi yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih menfokuskan diri dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Meskipun pendidikan agama mempunyai peranan penting dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berperilaku/akhlak mulia. Akan tetapi dalam realitas, lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia belum berjalan dengan baik, bahkan pendidikan agama masih dipandang pendidikan nomor dua oleh sebagian masyarakat. Hal ini terlihat masih rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra/putri mereka ke lembaga-lembaga pendidikan agama, seperti madrasah maupun pesantren.

Lembaga pendidikan agama menjadi prioritas kedua setelah sekolah. Salah satu alasannya adalah kualitas lembaga pendidikan agama lebih rendah dibandingkan sekolah yang sifatnya umum. Maka lembaga pendidikan Islam yang memiliki landasan kuat dari agama dan mendapat jaminan dari undang-undang negara harus melakukan perbaikan dan peningkatan standar mutu pendidikan agar dapat menjadi sebuah lembaga layanan publik yang diminati oleh masyarakat Indonesia.

Dukungan pemerintah terhadap pendidikan agama Islam dalam anggaran penyelenggaraan pendidikan agama Islam semestinya ditingkatkan mengingat pendidikan agama Islam dianggap sebagai solusi terhadap perbaikan karakter bangsa Indonesia yang semakin buruk. Oleh karena itu memberikan anggaran pendidikan yang lebih ataupun paling tidak sama dengan pendidikan umum diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam itu sendiri baik secara lembaga, fasilitas belajar, kesejahteraan pendidik maupun *output* dan *outcome* dari pendidikan agama Islam. Sehingga minat masyarakat terhadap pendidikan Islam semakin meningkat dan anggapan pendidikan Islam sebagai pendidikan nomor dua (*alternatif*) tidak ada lagi.

C. Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Islam

Perguruan Tinggi Islam merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah dirintis oleh tokoh-tokoh pendidikan yang menginginkan kemajuan rakyat Indonesia. Sebagaimana pembahasan sebelumnya mengenai perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pra-kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Terdapat perbedaan perhatian penjajah pada masa kolonial Belanda maupun Jepang terhadap perkembangan pendidikan Islam. Pesantren yang awalnya menjadi lembaga pendidikan Islam yang melahirkan lulusan yang bukan hanya memiliki ilmu agama akan tetapi juga

memiliki semangat nasionalis merupakan bukti pentingnya pengembangan pendidikan Islam.

Melanjutkan pendidikan yang telah ditempuh di lembaga pesantren maupun madrasah yang memiliki ciri pengetahuan agama, para pendiri Perguruan Tinggi Islam merasa harus membentuk lembaga pendidikan tinggi. Cikal bakal Pendidikan Tinggi Islam tersebut terus berkembang menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri hingga sekarang dikenal dengan IAIN dan UIN. Melalui lembaga ini akan lahir lulusan yang memiliki kecakapan dalam ilmu agama maupun ilmu umum sebagai wujud dari keseimbangan pendidikan.

1. Akademi Dinas Ilmu Agama Jakarta

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN di Indonesia berjumlah 52 yang terdiri dari 6 UIN, 15 IAIN dan 31 STAIN, sedangkan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) berjumlah lebih kurang 306 buah. Dalam perjalanannya tidaklah mudah menempatkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ke dalam jajaran perguruan tinggi umum (PTU) Indonesia. Lembaga ini memiliki riwayat tersendiri yang berbeda dari lembaga pendidikan tinggi lain. Pada awalnya lembaga ini tidak didirikan untuk memenuhi kebutuhan akademik saja, melainkan juga agama, ideologi dan politik.

Perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia, terutama IAIN merupakan perkembangan lebih lanjut dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang ada di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. Dari dua lembaga ini, kemudian Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) berkembang dengan pesat, sampai akhir tahun 1970-an IAIN sudah ada 14 buah. Fakultas cabang IAIN yang ada di daerah-daerah sebanyak 33 buah dijadikan menjadi STAIN pada tahun 1997.

Sebagai respon untuk menjawab tuntutan masyarakat dan kemajuan sains dan teknologi, serta globalisasi, maka muncul pembaruan lembaga pendidikan Islam, termasuk terhadap lembaga pendidikan tinggi Islam. Pembaruan sistem pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran IAIN dan PTI yang merupakan kelanjutan pembaruan sistem pendidikan sebelumnya. Hal ini menarik dikaji tentang kaitan pembaruan sistem pendidikan di Indonesia dengan perkembangan pendidikan tinggi Islam.

Sejarah perguruan tinggi di Indonesia bermula sejak pemerintah Hindia-Belanda memberlakukan Politik Etis yang salah satu programnya adalah pendidikan. Program pendidikan mendorong timbulnya sekolah-sekolah yang semula hanya sekolah dasar untuk belajar membaca, menulis, dan menghitung, kemudian diperluas pada sekolah menengah dan perguruan tinggi. Sistem persekolahan pada pendidikan tinggi pada zaman Hindia-Belanda pada abad ke-20 M bernama *Hooger Onderwijs* (Mudyahardjo, 2006, p. 266). Perguruan tinggi ini yang kemudian menjadi cikal bakal berkembangnya universitas dan fakultas di Jakarta, Bandung dan Surabaya.

Sejarah awal dirintisnya perguruan tinggi ini hanya di bidang kesehatan saja. Pada tahun 1902 di Batavia didirikan *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (*School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen* atau dikenal sebagai Sekolah Dokter Bumi Putera) kemudian NIAS (*Nerderlandsch Indische Artsen School*) tahun 1913 di Surabaya. Ketika STOVIA tidak menerima murid lagi, didirikanlah Sekolah Kedokteran Tinggi GHS (*Geneeskundige Hooge School*) pada tahun 1927. Perguruan inilah yang sebenarnya merupakan embrio fakultas kedokteran Universitas Indonesia. Di Bandung tahun 1920 didirikan *Technische Hooge School* (THS) yang pada tahun itu juga dijadikan perguruan tinggi negeri. THS ini adalah embrio ITB. Pada tahun 1922 kemudian berdiri sekolah hukum (*Rechts School*) yang kemudian ditingkatkan menjadi sekolah tinggi hukum (*Recht Hooge School*) pada tahun 1924. Sekolah tinggi inilah embrio Fakultas Hukum di Universitas Indonesia (Mudyahardjo, 2006, p. 269).

Selanjutnya di Jakarta tahun 1940 didirikan *Faculteit de Letterenen Wijsbegeeste* yang kemudian menjadi Fakultas Sastra dan Filsafat di Universitas Indonesia. Dengan demikian, perguruan tinggi umum zaman Hindia-Belanda pada abad ke-20 M, setidaknya telah berdiri sebanyak tiga perguruan tinggi setingkat sekolah tinggi yaitu Sekolah Tinggi Teknik (*Technische Hoogeschool*) di Bandung 1920, Sekolah Tinggi Hukum (*Rechts Hoogeschool*) di Jakarta pada tahun 1924, dan Sekolah Tinggi Kedokteran (*Geneeskundige Hoogeschool*) di Jakarta pada tahun 1927, serta satu buah perguruan tinggi setingkat fakultas yang berada di Jakarta *Faculteit de Letterenen Wijsbegeeste* yang kemudian menjadi Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia (Mudyahardjo, 2006, p. 118).

Dalam perkembangan berikutnya perguruan tinggi telah menjadi sub sistem pendidikan nasional, hal ini tercermin dalam UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi dalam undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah.

Dengan demikian, corak pendidikan tinggi pada masa tersebut (Orde Baru), bertujuan membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang makmur, materiil, dan sprituil (Mudyahardjo, 2006, p. 412). Pada tahun 1954 didirikan Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) berdasarkan kesepakatan antara Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dengan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Dalam perkembangan selanjutnya PTPG ini diintegrasikan ke dalam universitas sebagai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Akan tetapi, FKIP yang pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan tenaga guru di sekolah lanjutan, ternyata tidak memenuhi harapan menteri sehingga didirikan lagi Institut Pendidikan Guru (IPG) pada tahun 1962. Keberadaan FKIP dan IPG ini menimbulkan konflik sehingga presiden turun tangan mempertemukan pihak yang bertikai dan menghasilkan kesepakatan

serta ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1963 tentang Peleburan FKIP dan IPG Menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Selain itu, pada tahun 1954 universitas-universitas lain pun didirikan antara lain Universitas Andalas di Padang, Universitas Airlangga di Surabaya, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Udayana di Denpasar, Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, di samping itu didirikan pula Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya, dan Institut Pertanian Bogor.

Pemerintah Orde Baru juga mencanangkan bahwa di setiap provinsi terdapat sekurang-kurangnya satu universitas. Termasuk di antaranya pada 10 November 1962 berdirilah Universitas Cendrawasih di Irian Jaya (Papua). Sampai tahun 1968/1969 jumlah perguruan tinggi yang awalnya hanya 5 universitas pada tahun 1945, kemudian melonjak tajam menjadi 183 universitas dengan mahasiswa berjumlah sekitar 156.000 orang. Perkembangan tersebut diimbangi dengan fasilitas-fasilitas laboratorium, buku teks dan buku perpustakaan lainnya. Sejak awal Repelita III (1978/1979) sampai Repelita V (1993/1994) telah disebar alat laboratorium sebanyak 21.277 set ke seluruh Perguruan Tinggi Negeri yang pada tahun 1993/1994 berjumlah 51 buah. Dari tahun 1978/1979 sampai pada repelita V telah dikirimkan buku teks sebanyak 285.000 eksamplar dan buku perpustakaan sebanyak 993.000 ke 51 PT Negeri dan 1.122 Swasta di seluruh Indonesia (Pairin, 2012, p. 123).

Terdapat faktor penting penyebab pertumbuhan kelembagaan Islam di Indonesia yaitu ekspansi kaum santri melalui pendidikan. Harus diakui, bahwa kaum muslim Indonesia umumnya hanya memiliki akses yang sangat terbatas ke dalam sistem pendidikan kolonial Belanda. Tetapi dengan tercapainya kemerdekaan, kaum muslim memperoleh kesempatan lebih luas untuk mendapatkan pendidikan. Kesempatan lebih luas itu mulai secara aktual terwujud khususnya sejak akhir 1950-an dengan pembentukan universitas-universitas negeri, dan lebih khusus lagi Perguruan Tinggi Agama Islam (Azra, 1999a, p. 189).

Upaya tokoh-tokoh Islam untuk memberdayakan umat Islam di Indonesia dalam jalur pendidikan juga diwujudkan dengan mendirikan Perguruan Tinggi Islam (PTI) sebagai sebuah lembaga lanjutan. Upaya ini disempurnakan secara berkesinambungan mulai dari awal hingga sekarang dengan berbagai terobosan yang bersifat politis, kultural, sosial, maupun birokratis. Secara kualitatif, upaya tersebut dapat dinilai berhasil karena belakangan ini telah bermunculan berbagai perguruan tinggi yang berlabel Islam. Perguruan tersebut mulai dari yang berlokasi di Ibu Kota (Jakarta) hingga di wilayah kecamatan yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia (Qomar, 2007, p. 100).

Hasrat untuk mendirikan semacam lembaga Pendidikan Tinggi Islam sudah juga dirintis sejak zaman penjajahan. Dr. Satiman Wirjosandjoyo dalam Pedoman Masyarakat No. 15 Tahun IV (1938) pernah melontarkan gagasan pentingnya sebuah lembaga Pendidikan Tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum muslim di

wilayah Hindia-Belanda. Dikatakan oleh Satiman antara lain bahwa sewaktu Indonesia masih tidur, *onderwijs* (pengajaran) agama di pesantren mencukupi keperluan umum. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, maka diperlukan adanya sekolah tinggi agama. Apalagi dengan kedatangan kaum Kristen yang banyak mendirikan sekolah dengan biaya rendah dan dikelola oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, maka keperluan akan adanya sekolah tinggi agama Islam itu semakin terasakan dan jika tidak maka pengaruh Islam akan semakin kecil (Hidayat, 2000, p. 62).

Perguruan Tinggi Islam pada awalnya sudah didirikan oleh Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI) di Padang yang dipimpin oleh Mahmud Yunus dengan nama Sekolah Islam Tinggi. Perguruan Tinggi Islam itu dibuka pada tanggal 9 Desember 1940 M, yang memiliki dua fakultas, yakni fakultas syari'ah (agama) dan fakultas pendidikan dan bahasa Arab. Perguruan Tinggi Islam ini menjadi Perguruan Tinggi Islam pertama di Indonesia. Perguruan Tinggi Islam ini bertahan sampai tahun 1942, karena pada bulan Maret 1942 Jepang memasuki Kota Padang. Pemerintah Jepang menutup Sekolah Islam Tinggi tersebut, karena Jepang hanya mengizinkan membuka sekolah maupun madrasah dari tingkat rendah sampai menengah saja (Yunus, 1992a, p. 103). Tujuan yang diinginkan pada waktu itu adalah untuk mendidik dan mencetak ulama-ulama yang handal dan berwawasan luas.

Sejarah Pendidikan Tinggi Islam dimulai dengan lahirnya Sekolah Tinggi Islam di tahun 1940 sebagai hasil pertemuan beberapa guru muslim di Padang. Pada tahun 1945 (sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia) di tingkat nasional berdiri Sekolah Tinggi Islam, atas inisiatif Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai ketua dan Mohammad Natsir sebagai sekretaris dan dipimpin oleh Prof. Kahar Muzakir. Pada tahun 1946, sekolah ini pindah ke Yogyakarta mengikuti perpindahan Ibu Kota negara. Berdiri pula Akademi Dakwah Islam (ADIA) di Jakarta berdasarkan Peraturan Presiden No. 01 Tahun 1957 (Muzhar, 2000, p. 62).

Melalui Peraturan No. 34 Tahun 1950, fakultas agama Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta diubah menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Hal ini disebabkan cakupan pengetahuan agama Islam yang demikian luas tidak mencukupi untuk diajarkan dalam satu fakultas. Pada tahun 1960, PTAIN dengan ADIA Jakarta disatukan. Sejak tanggal 9 Mei 1960 namanya menjadi IAIN al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah yang berada di dua kota, yaitu Yogyakarta dan Jakarta. Dalam Kongres ke II Majelis Islam 'Ala Indonesia (MAI) yang berlangsung tanggal 2-7 Mei 1939 juga salah satu agenda pembahasannya adalah tentang Perguruan Tinggi Islam. Realisasi hasil kongres tersebut didirikanlah di Solo Perguruan Tinggi Islam yang dimulai dari tingkat menengah dengan nama *Islamiche Midelbare School* (IMS) (Daulay, 2014).

Keinginan umat Islam Indonesia untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam adalah sesuatu yang logis yang tentunya didorong oleh dua faktor pertama faktor internal yakni dorongan karena telah berdirinya perguruan-perguruan tinggi umum, seperti Sekolah Teknik di Bandung tahun 1920, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta tahun 1920, dan

Sekolah Tinggi Kedokteran juga di Jakarta tahun 1927. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dan masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia. Di beberapa negara telah berdiri Universitas Islam seperti Al Azhar di Mesir, Aligarh di India dan lain sebagainya.

2. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta

Pada tanggal 22 Januari 1950, sejumlah pemimpin Islam dan para ulama juga mendirikan sebuah universitas Islam di Solo. Pada tahun itu juga, fakultas agama yang semula ada di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta diserahkan ke pemerintah, yakni Kementerian Agama dan kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri untuk golongan Islam yang diambil dari Fakultas Agama UH berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950 (Alfabeta, 2000, p. 199).

Pada perkembangan berikutnya pada tanggal 24 Agustus 1960 diresmikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Yogyakarta sebagai gabungan antara PTAIN yang berkedudukan di Yogyakarta dan Akademik Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang berkedudukan di Jakarta, untuk memenuhi tenaga guru di Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHA) dan tenaga dosen agama Islam di perguruan tinggi umum, maka Departemen Agama mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). PTAIN didirikan di Yogyakarta pada bulan September 1951 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950, yang ditanda tangani oleh Presiden RI. Pada bulan Juni 1957 di Jakarta dibuka Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) oleh Departemen Agama berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1957. Tujuannya untuk mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri, untuk menjadi guru agama pada sekolah lanjutan atas atau menjadi petugas di bidang pendidikan di lingkungan Departemen Agama.

Program Pascasarjana (PPs) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) telah terselenggara dalam waktu yang cukup lama. PPs pertama kali diselenggarakan di IAIN Jakarta (Sejak 1982), dan IAIN Yogyakarta (sejak 1983). Selanjutnya disusul oleh IAIN Banda Aceh (sejak 1989), IAIN Ujungpandang (sejak 1990), IAIN Surabaya, IAIN Padang, IAIN Medan (ketiganya sejak 1994) (Azra, 1999b, p. 175). Sampai ini program pascasarjana didirikan di berbagai PTAIN dan PTAIS, bahkan semua UIN dan IAIN sudah memiliki program pascasarjana, serta beberapa STAIN sudah memiliki program pascasarjana. Hal ini menandakan bahwa sejak awal didirikan program pascasarjana pada tahun 1982 sudah diikuti oleh beberapa perguruan tinggi Islam.

Program pascasarjana IAIN memiliki tujuan umum untuk menghasilkan tenaga ahli ilmu agama Islam yang merupakan inti dari tenaga penggerak pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu. Adapun tujuan khususnya adalah; *pertama*, mengembangkan kemampuan dan keahlian peserta untuk menguasai bidang ilmu agama Islam termasuk ilmu bantu yang diperlukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam serta mengamalkannya pada masyarakat. *Kedua*, memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidang-bidang ilmu agama Islam dan penelitian sesuai dengan bidang

program yang bersangkutan. *Ketiga*, memiliki sikap ilmiah dan amal ilmiah sebagai tenaga ahli di bidang ilmu agama Islam yang bertanggung jawab (Azra, 1999b, p. 176).

Adanya pendirian program pascasarjana ini juga tidak bisa dilepaskan dari keinginan umat Islam untuk menggali dan mengembangkan Islam lebih luas ke seluruh Indonesia, bahkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas lembaga pendidikan Islam. Kehadiran program pascasarjana ini memberikan dampak yang luas terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Berbagai upaya tetap dilakukan untuk memperbaiki mutu dan kualitas lembaga pendidikan Islam. Saat ini program pascasarjana sudah menyebar hampir di seluruh penujuru Indonesia, sehingga memudahkan umat Islam untuk lebih banyak menggali lebih dalam tentang studi Islam.

D. Transformasi Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) sebagai salah satu model perguruan tinggi pendidikan Islam masih selalu menjadi perbincangan hangat di berbagai kegiatan akademik maupun pemerhati pendidikan. Universitas Islam Negeri sebagai institusi pendidikan Islam yang tumbuh sebagai harapan untuk mampu bersaing di tengah-tengah perkembangan transformasi institusi pendidikan di era modern. UIN yang dahulunya bernama IAIN (Institut Agama Islam Negeri) sepertinya masih terkesan berjalan stagnan, tidak ada kemajuan khazanah keilmuan secara signifikan. Tradisi keilmuan yang selalu memisahkan diri antara keilmuan umum dan agama telah menjadi pemicu tertinggalnya IAIN dibanding perguruan tinggi umum (Ali, 1993, p. 39). Ironisnya lagi, prodi-prodi studi keislaman IAIN semakin kurang diminati masyarakat. Hal inilah kemudian menyebabkan berbagai kalangan menginginkan perubahan/transformasi (konversi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Wacana tentang perubahan STAIN dan IAIN menjadi UIN sebenarnya sudah lama muncul, meski sebagian besar hingga kini belum mengalami perubahan.⁴ Memang banyak kalangan yang menilai sangat tidak relevan jika IAIN harus diubah menjadi UIN, pasalnya selain identitas keislaman (*Islamic Identity*) yang masih kuat, perubahan IAIN menjadi UIN dikhawatirkan akan melemahkan sendi-sendi keislaman yang selama ini berjalan baik di tiap program studi (prodi) perkuliahan maupun dalam budaya akademik sehingga mensinyalir, *Islamic Studies* yang menjadi identitas itu akan kurang diminati dan kalah dengan prodi umum (F. Ismail, 1996, p. 29).

⁴ Mukti Ali, mantan Menteri Agama RI pada akhir tahun 1971 menyatakan bahwa IAIN sebagai perguruan tinggi di bawah Departemen Agama, sudah saatnya melakukan pembaharuan. Hal ini karena IAIN pada umumnya memiliki tiga kelemahan dan kekurangan. Pertama, lemahnya semangat dan mentalitas keilmuan di kalangan tenaga pengajarnya yang seterusnya merembet kepada mahasiswanya. Kedua, kurangnya penguasaan terhadap bahasa asing, khususnya bahasa Arab dan Inggris. Ketiga, lemahnya penguasaan metodologi keilmuan yang sebenarnya merupakan model utama pengembangan keilmuan keagamaan IAIN.

Universitas Islam Negeri merupakan lembaga pendidikan saat ini mengacu pada globalitikal 4.0 (four point zero) karenanya dalam sistem kelembagaan dan sistem pendidikannya mentransformasikan nilai-nilai digitalisasi perkembangan modern. Perkembangannya seiring dengan revolusi industrial, revolusi mental dan *go road map* menuju kelembagaan birokrasi dan teknokrasi yang bersih. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Agama (periode 2014-2019) Lukman Hakim Saefuddin dan dilanjutkan oleh Menteri Agama saat ini (periode 2019-2024) oleh Fachrurrazi bahwa perkembangan Universitas Islam Negeri harus sejajar dengan lembaga perguruan tinggi umum baik dalam kacamata regional, nasional dan internasional. Buku ini mencoba untuk menghantarkan satu konsepsi umum bahwa universitas Islam Negeri yang notabene menciptakan produktivitas dalam negeri terutama dalam bidang sains keilmuan yang intergratif dan terpadu seiring dengan perkembangan zaman, terutama pada era 4,0. Karenanya berdirinya UIN merupakan satu sisi transformatif dalam mengaktualisasikan nilai keilmuan sains dan teknologi tersebut berbasis pada moralitas dan karakter seorang muslim.

1. Kelembagaan di Perguruan Tinggi Islam

Rencana pengembangan IAIN menjadi UIN pada hakikatnya merupakan bagian dari yang perlu diintensifkan. Namun bersamaan dengan itu, masih terdapat berbagai kekhawatiran dan permasalahan lainnya yang perlu segera diatasi agar rencana transformasi tersebut dapat diwujudkan. Paling kurang terdapat lima alasan yang melatarbelakangi perlunya transformasi STAIN dan IAIN menjadi UIN dalam pandangan ontologism yaitu sebagai berikut:

- Pertama, adanya perubahan jenis pendidikan pada Madrasah Aliyah. Jika pada masa lalu Madrasah Aliyah merupakan sekolah agama, maka sekarang Madrasah Aliyah sudah menjadi sekolah umum yang berciri khas agama. Oleh karenanya revitalisasi dan restrukturisasi Madrasah Aliyah pada pengembangan ontologi merubah pola pikir masyarakat bahwa madrasah Aliyah harus bisa mampu bersaing dengan global etik wawasan umum.
- Kedua, adanya dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Masalah dikotomi tersebut antara lain dapat diatasi dengan program integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Dalam kajian epistemologis hal ini sebagai telaah untuk mengkaji distorsi dan primordial ilmu-ilmu agama dapat menjadi barometer dan menjadi benteng pertahanan wawasan keilmuan umum secara dilematis.
- Ketiga, perubahan STAIN dan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang kepada para lulusannya untuk dapat memasuki lapangan kerja yang lebih luas. Selama ini para lulusan atau sarjana IAIN sebagian besar bekerja di Kementerian Agama, dan walaupun mereka bekerja di departemen atau instansi lainnya, namun bidang pekerjaannya tetap, yaitu bidang keagamaan. Dalam aksiologisnya hal ini berjalan sebagai landasan untuk mengaplikasikan ilmu keagamaan mampu berdaya kompetitif di dunia globalistik *network, netcommon, net communication*.

- Keempat, perubahan STAIN dan IAIN menjadi UIN diperlukan dalam rangka memberikan peluang kepada lulusan IAIN untuk melakukan mobilitas vertikal, yakni kesempatan dan peran untuk memasuki medan gerak yang lebih luas. Para lulusan UIN nantinya tidak akan termarginalisasikan (terpinggirkan) lagi, melainkan akan dapat memasuki wilayah gerak yang lebih bervariasi dan bergengsi.
- Kelima, perubahan STAIN dan IAIN menjadi UIN juga sejalan dengan tuntutan umat Islam yang selain menghendaki adanya pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang profesional dan berkualitas tinggi, juga lebih menawarkan banyaknya pilihan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya tuntutan era globalisasi yang menghendaki lahirnya manusia-manusia yang unggul dan mampu merebut peluang dalam situasi dan kondisi yang penuh tantangan dan kompetitif (Nata, 2010, pp. 54-56).

Rencana perubahan IAIN dan STAIN menjadi UIN bukanlah tanpa masalah. Di dalamnya terdapat sejumlah permasalahan baik yang legalitas formal, kelembagaan, filosofis, historis, psikologis, bahkan politis. Dari segi legalitas formal atau peraturan yang ada, seperti PP No. 60 Tahun 1999, peluang IAIN untuk menyelenggarakan program akademis bidang studi non-keagamaan tidak dimungkinkan. Peraturan tersebut menggariskan bahwa, institut adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam satu kelompok bidang studi tertentu, seperti kelompok bidang studi agama saja, hukum, pertanian, dan seterusnya. IAIN misalnya hanya menyelenggarakan pendidikan kelompok bidang studi agama saja seperti hukum Islam, pendidikan Islam, filsafat Islam, komunikasi Islam dan seterusnya.

Karena IAIN bukan universitas, dimungkinkan sekali jurusan-jurusan umum dari IAIN tersebut belum diakui oleh masyarakat pada umumnya dan para lulusannya sering mengalami kesulitan ketika akan menggunakan ijazah dari jurusan umum tersebut untuk memasuki lapangan kerja (*civil effect*). Permasalahannya adalah karena mereka berasal dari IAIN, sungguhpun berasal dari jurusan umum, namun gelarnya tetap saja Sarjana Keagamaan.

Masalah lain yang mungkin muncul berkaitan dengan perubahan IAIN menjadi UIN ini berkenaan dengan pertimbangan yang bersifat politis. Menurut catatan sejarah, bahwa berdirinya IAIN tidak lepas dari penghargaan pemerintah pada saat itu terhadap peran dan kontribusi umat Islam dalam ikut serta memperjuangkan tegaknya Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut umat Islam memiliki otoritas untuk memasyarakatkan dan mengembangkan ajaran Islam, serta mencerdaskan umat Islam melalui dibukanya perguruan tinggi Islam. Melalui lembaga inilah proses peningkatan dan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan.

Dengan cara demikian, umat Islam akan mempunyai kemampuan dan peluang untuk ikut serta membangun bangsa sekaligus menikmati hasilnya. Perubahan IAIN menjadi UIN ini dikhawatirkan bisa mengubur fakta historis umat Islam. Meskipun kekhawatiran ini dapat diatasi dengan mengatakan, bahwa dengan perubahan IAIN

menjadi UIN ini justru akan menghasilkan para sarjana muslim yang berkualitas unggul yang pada gilirannya dapat melakukan peran sosial, politik, dan sebagainya. Sebaliknya, jika IAIN tetap dibiarkan seperti sekarang, maka IAIN akan menghasilkan para sarjana yang ruang geraknya amat terbatas, kurang mampu bersaing pada era global yang kompetitif, dan pada akhirnya akan terpinggirkan (Nata, 2010).

Itulah di antara sebab-sebab mengapa IAIN perlu merubah dirinya dari bentuknya yang ada sekarang menjadi universitas. Perubahan ini tampak mendesak dan sudah waktunya untuk dilakukan. Selain itu jika diamati secara seksama sebenarnya nama IAIN yang dalam bahasa Arabnya *al-Jami'ah al-Islamijah al-Hukumiyah* secara harfiah sudah menunjukkan pada arti universitas. *Al-Jami'ah* secara harfiah berarti universitas. Hal ini sejalan dengan kenyataan beberapa fakultas yang ada di IAIN sekarang yang sebenarnya cukup menggambarkan sebuah universitas. Saat ini IAIN memiliki beberapa fakultas, di antaranya: Fakultas Tarbiyah (Pendidikan), Fakultas Syari'ah (Hukum), Fakultas Adab (Sastra), Fakultas Dakwah (Komunikasi dan Informasi), Fakultas Ushuluddin (Pokok-pokok Agama).

Nama-nama fakultas ini sudah menggambarkan adanya universitas, karena nama-nama tersebut bukan hanya menggambarkan fakultas agama, melainkan juga fakultas non-keagamaan seperti pendidikan, hukum, sastra, dan komunikasi. Namun masalahnya adalah mengapa fakultas-fakultas yang dilihat dari segi namanya ini sebenarnya bukan fakultas agama (kecuali Ushuluddin). Hal ini mungkin disebabkan karena istilah-istilah fakultas tersebut menggunakan bahasa Arab, sehingga setiap yang berbau Arab itu Islam. Hal lain adalah karena masyarakat Islam pada umumnya melihat istilah-istilah yang berbahasa Arab sebagai suatu yang identik dengan Islam. Cara melihat istilah yang kurang tepat ini disebabkan sulitnya memisahkan antara bahasa Arab dengan ajaran Islam, sehingga setiap apa saja yang menggunakan simbol-simbol Arab dianggap sebagai yang bernuansa Islam.

Istilah *al-Jami'ah* dengan makna universitas dan sekaligus terkait dengan konotasi Islam sebagaimana dikemukakan di atas, sebenarnya sudah cukup menguntungkan dilihat dari segi misi perubahan IAIN menjadi UIN, yaitu lembaga yang di samping menyelenggarakan program studi umum, juga bernuansa Islam. Dengan demikian, jika dilihat dari gramatika bahasa Arab, sebenarnya istilah IAIN didalamnya terdapat kata yang sudah menggambarkan makna universitas. Namun istilah IAIN menjadi berbeda artinya ketika kata *al-Jami'ah* tersebut diartikan menjadi institut. Di sinilah letak kesalahan dan kurang taktisnya para pendahulu kita yang menerjemahkan *al-Jami'ah* menjadi institut, dan bukan dengan terjemahan universitas (Nata, 2010, p. 57).

Berdasarkan catatan sejarah, digambarkan bahwa sistem kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) tidak terlepas dari lima poin atau lima unsur transformasi IAIN menjadi UIN. Sistem kelembagaan UIN saat ini terbagai menjadi, yaitu:

a. Kelembagaan Rektorat

Kelembagaan rektorat dipimpin oleh Rektor bilamana sebelumnya IAIN juga dijabat sebagai nama Rektor akan tetapi jika di STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) maka dipimpin oleh ketua. Kelembagaan rektorat ini menaungi beberapa sistem internal, di antaranya adalah; 1) sistem pendaftaran mahasiswa baru, 2) sistem portal akademik, 3) sistem pendaftaran wisuda, 4) sistem absensi perkuliahan, 5) sistem pendaftaran kuliah antar semester, 6) sistem akademik, 7) sistem KKN, 8) sistem kepegawaian, 9) sistem remunerasi, 10) sistem perencanaan Biro PPK, 11) sistem absen dosen dan karyawan, 12) sistem registrasi, 13) sistem pembuatan PIN portal, 14) sistem *e-learning*, 15) sistem pencarian buku, 16) sistem e-journal, 17) sistem repository, 18) sistem informasi evaluasi pembelajaran, dan 19) sistem informasi pangkalan data. Dari ke 19 sistem kelembagaan rektorat di atas, pada dasarnya memang dikelola langsung oleh pihak fakultas, akan tetapi sistem kelembagaan tersebut tetap berada dalam tanggung jawab rektor, sebab rektor merupakan pucuk pimpinan tertinggi di UIN.

b. Kelembagaan Fakultas

Kelembagaan fakultas dipimpin oleh dekan. Para dosen yang mengajar di fakultas adalah dosen yang memiliki kualifikasi jenjang pendidikan magister maupun doktoral bahkan sampai pada tingkat guru besar (professor). Perencanaan pengembangan karir sumber daya dosen diawali dengan langkah pertama dengan penentuan jenjang karir bagi dosen. Beberapa jenjang karir dosen di fakultas ialah; a) penilaian kinerja, b) penilaian dan evaluasi kompetensi mendidik, c) penilaian terhadap kompetensi dan akuntabilitas sebagai tenaga pendidik. Dengan demikian sistem kelembagaan fakultas mendeskripsikan bahwa sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi dan akuntabilitas perwujudannya dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pada sistem ini, bagi sumberdaya dosen (tenaga pendidik) yang kinerjanya di atas standar akan mendapatkan *reward*, demikian juga sebaliknya.

Sistem penilaian kinerja yang dibangun menunjukkan keadilan, kehandalan dan validitas yang sungguh-sungguh atas perilaku kerja dari dosen. Sistem penilaian kinerja yang baik, akan diikuti pula oleh program perbaikan kinerja bagi mereka kinerjanya dinilai di bawah standar, serta juga program pengembangan kinerja bagi mereka yang kinerjanya di atas standar.

c. Kelembagaan Jurusan

Kelembagaan jurusan dipimpin oleh kepala jurusan (kajur). Pada dasarnya program kerja kepala jurusan dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni; 1) pemerataan dan perluasan akses, 2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta 3) penguatan tata kelola, administrasi akuntabilitas dan pencitraan publisitas dan publik. Penetapan tiga bagian di atas merupakan rencana strategis yang dibangun melalui Depdiknas dengan maksud agar program kerja di satuan lembaga jurusan ini adalah relevan dengan apa yang dimuat dalam rencana strategis Depdiknas. Selain itu juga dimaksudkan agar

evaluasi program lembaga jurusan yang dilakukan setiap tahunnya disampaikan kepada dekan fakultar dan dilaporkan ke Laporan Kinerja Instansi Fakultas (LKIF).

d. Kelembagaan Akademik

Tugas pokok dan fungsi kelembagaan akademik di UIN merupakan unsur pelaksana fakultas yang mengkoordinasikan, melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau olah raga yang mencakup program pendidikan sarjana, dan program berkelanjutan. Fungsi lainnya adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas, perencanaan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau olah raga, perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, merencanakan dan melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sivitas akademika, urusan tata usaha dan inventarisasi.

Kemudian jika kelembagaan akademik ini di program pascasarjana tugas pokok kelembagaan akademik merupakan unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik serta professional. Melalui pendidikan program magister dan dokotr untuk sejumlah cabang ilmu dan atau bidang ilmu interdisiplin. Hal ini difungsikan untuk; a) merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan pendidikan, b) merencanakan dan melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, c) merencanakan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, d) pembinaan kepada civitas akademika dan e) urusan tata usaha dan inventarisasi.

e. Kelembagaan LPPM

Kelembagaan LPPM dipimpin oleh ketua. Tugas pokok kelembagaan LPPM adalah melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan, peneltiian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsinya adalah; a) penyusunan rencana, program, dan anggaran UPM, b) pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran, c) pelaksanaan peningkatan mutu proses pembelajaran, d) pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan, e) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan, f) pelaksanaan urusan administrasi UPM, dan g) mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu tingkat universitas dengan pusat penjaminan mutu di fakultas-fakultas dan program pascasarjana serta program doktoral (Moestopo, 2010, p. 63).

2. Faktor Sosial-Politik Hadirnya Perguruan Tinggi Islam

Pendidikan di perguruan tinggi saat ini membutuhkan konsepsi umum bahwa alumni dari perguruan tinggi keislaman harus mampu mensejajarkan nilai-nilai keilmuan yang didapat pada komunitas sosial yang multikultural dan plural. Karenanya kesepahaman dalam peningkatan aktualitas tersebut dipadankan pada keseluruhan

yang kompetitif. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang penting adalah Perguruan Tinggi Islam. Sejak awal abad ke-20 M, Perguruan Tinggi Islam mulai bermunculan dan terus mengalami penambahan yang cukup pesat (Sirozi, 2004, p. 37). Sejarah berdirinya Perguruan Tinggi Islam adalah sebagai reaksi atas kebijakan pendidikan kolonial Belanda yang sekuler, dan juga merupakan wujud dari upaya pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim Indonesia. Hal ini beralasan karena sudah tidak sesuai lagi dalam tuntutan dan perkembangan zaman, namun pada kenyataannya Perguruan Tinggi Islam mengalami ketertinggalan karena tidak memperoleh legitimasi yang lebih luas, sehingga menjadi lembaga pendidikan yang dinomorduakan.

Tetapi sejak dikeluarkannya UU PT No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, maka Perguruan Tinggi Islam mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga Perguruan Tinggi yang lain. Sehingga Perguruan Tinggi Islam juga mempunyai peluang terhadap peningkatan mutu yang meliputi tenaga pendidik, sarana pra-sarana dan jaminan pengakuan keluaran Perguruan Tinggi Islam. Salah satu hal krusial lainnya adalah pengakuan Dosen yang berbunyi: *“Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.”*

Dengan adanya iklim dan budaya organisasi yang kondusif, diharapkan agar para pegawai dapat mewujudkan kemampuannya, dalam arti berkemampuan untuk melakukan sesuatu (*be able to do something*). Kemampuan ini diwujudkan dalam performansi yang dapat diamati dan terukur. Kompetensi tidak cukup diukur hanya dengan pengetahuan, tetapi juga dengan performansi atau unjuk kerja. Pengertian ini sejalan dengan batasan yang diungkap Len Holmes, *“A competence is a description of something which a person who works in a given occupational area should be able to do. It is a description of an action, behaviour or outcome which a person should be able to demonstrate”*. Jadi, kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan (*be able to do*) seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Dengan adanya kinerja yang baik maka dengan sendirinya akan menghasilkan keluaran yang bermutu (Qomar, 2007, p. 129). Kinerja menurut Robbin merupakan produk dari fungsi kemampuan dan motivasi, kemampuan adalah hasil dari kecerdasan dengan pelatihan dan kemampuan (Robbin, 2008, p. 57).

Upaya untuk mewujudkan semua itu diperlukan keahlian manajerial pimpinan perguruan tinggi dalam mengarahkan tujuan pendidikan, karena apabila pimpinan perguruan tinggi tidak memiliki keahlian dalam mengatur, maka perkembangan perguruan tinggi akan stagnan. Keterampilan manajerial pimpinan dapat dimiliki dengan cara selalu menambah wawasan, baik dari lingkungan, pengalaman sehari-hari, ataupun mendapatkan wawasan dari perkuliahan. Semakin tinggi jenjang pendidikan

yang dimiliki oleh pimpinan perguruan tinggi, maka semakin ahli dalam memegang tanggung jawab yang dipikulnya. Sukses atau tidaknya perguruan tinggi dalam mencapai prestasi tertentu banyak dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Secara keseluruhan perbaikan sistem perguruan tinggi akan dapat terlaksana apabila pimpinan perguruan tinggi sebagai pemimpin dan manajer menyadari dan melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya (Mulyadi, 2010).

3. Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi Islam

Sistem pendidikan di Universitas Islam Negeri tidak terlepas dari pendidikan Karakter. Sebab bila dilihat dari standar nasional pendidikan yang menjadi acuan pengembangan kurikulum, dan implementasi pembelajaran dan penilaian di perguruan tinggi seperti di Universitas Islam Negeri, tujuan pendidikannya dapat dicapai dengan baik. Pembinaan karakter juga termasuk dalam materi yang harus diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya, pendidikan karakter di Universitas Islam Negeri selama ini baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai, dan belum secara optimal pada tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang diinginkan oleh Kementerian Agama bahwa pendidikan karakter di UIN harus mampu mengembangkan *grand design* pendidikan karakter untuk setiap jalurnya, jenjang, dan jenis bahkan sampai pada satuan pengembangan pendidikan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi berdampak terhadap semua dimensi kehidupan sosial. Kondisi ini terus bergulir dalam dinamika kehidupan masyarakat, bahkan PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) juga mengalami dampak dari perkembangan terkini (perkembangan terkini yang dimaksud juga di dalam metode, tujuan, rumusan, visi dan misi sampai pada sumber daya manusia UIN itu sendiri).

Oleh karena itu UIN terus berupaya memperbaiki sistem kelembagaannya dan kurikulumnya, sehingga UIN dapat lebih bertahan dan memiliki ketangguhan dalam menghadapi perubahan yang terjadi di era globalisasi (era milineal dan era revolusi industrial). Sebagaimana dikatakan oleh Muzayyin Arifin, abad ini akibat timbulnya perubahan sosial seperti perkembangan teknologi, perkembangan informasi, semuanya berkembang dengan media sosial berbasis digitalisasi. Ini berarti bahwa sistem pendidikan melalui kurikulumnya di bagi ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Sistem Kurikulum Digitalisasi di Perguruan Tinggi Islam

Era digital telah membawa perubahan pada setiap bidang layanan, baik itu bidang pembinaan kemahasiswaan termasuk preservasi koleksi maupun bidang layanan penggunaan kurikulumnya. Era ini memungkinkan bahkan telah terbukti bahwa sistem kurikulum digitalisasi di UIN tidak selalu harus ke perpustakaan. Sistem kurikulum digitalisasi merupakan kebutuhan terkini dalam meng-*update* seluruh peristiwa pembelajaran, baik itu pembelajaran secara tematik maupun kapita selekta. Kemudian

digitalisasi yang digunakan di UIN terutama di perpustakaan menggunakan teknologi *Scan Snap SV600+Rock2 Filter* sebagai bahan materi, praktikum dalam mata kuliah teknologi informasi merupakan salah satu permasalahan tersendiri untuk menghadapi tuntutan kompetensi tenaga perpustakaan di era digitalisasi ini. Beraneka ragamnya teknologi alih media digital yang tersedia dapat menjadikan salah satu penyebab diterima dan tidaknya teknologi tersebut bagi sebagian mahasiswa yang melakukan praktikum digitalisasi di perpustakaan terutama di perpustakaan UIN Sumatera Utara, Medan.

b. Sistem Kurikulum Kelas di Perguruan Tinggi Islam

Sistem kurikulum kelas atau tatap muka, adalah sistem perkuliahan secara langsung. Hal ini dinamakan sebagai pembelajaran *face to face*. Artinya setiap pembelajaran di kelas dilangsungkan dengan menggunakan metode presentase makalah. Hal ini dilakukan karena sistem kurikulum di perguruan tinggi menggunakan sistem *Students' Central Learning (SCL)*, yaitu sistem pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal ini dikarenakan *Students' Central Learning* adalah menemukan masalah, dan menemukan solusinya, serta dapat menjabarkannya, hal ini berkaitan dengan menemukan masalah dengan memaparkan solusinya. Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya yang berjudul "*Manajemen Pengembangan Kurikulum*", mengatakan bahwa sistem perkuliahan presensi di kelas pada dasarnya bertujuan agar mahasiswa dapat mencari masalah dan menemukan solusinya. Tambahnya, setidaknya ada tiga peranan penting sistem kurikulum presensi di kelas, yaitu:

- (a) Peranan konservatif;
- (b) Peranan kritis dan evaluative serta;
- (c) Peranan kreatif (Hamalik, 2010, p. 20).

BAB V

PENDIDIKAN AGAMA DAN PENGAJARAN

Oleh: Yusnaili Budianti, Maja Hamdani, Desrayanti Sullama

A. Pendidikan Agama Islam di Tingkat Sekolah

1. Kedudukan Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia sebenarnya telah melaksanakan sistem pendidikan dan pengajaran agama. Akan tetapi sistem pendidikan agama yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Maka dalam hal ini muncul dua sistem pendidikan pada waktu itu, yaitu:

- (1) Sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tak mengenal ajaran agama, merupakan sistem yang pada waktu sebelum kemerdekaan pendidikan agama pada masa pemerintah kolonial Belanda masih dibatasi. Agama tidak boleh dicampur adukkan dengan kepentingan politik mereka pada waktu itu. Sehingga pendidikan agama kurang mendapat perhatian dan memunculkan sikap sekularisme. Pendidikan agama yang sistemnya masih seperti pada masa tersebut masih ada, padahal Indonesia sudah merdeka. Dalam hal inilah sistem pendidikan agama yang sekuler ini belum dihilangkan oleh berbagai kalangan masyarakat.
- (2) Sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri, baik yang bercorak isolatif-tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya (Daulay, 2014, p. 76).

Kemudian pasca proklamasi kemerdekaan, usaha-usaha yang dilakukan dalam mengembangkan pendidikan ialah; membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran tahun 1946 pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Soewandi, panitia tersebut diketuai langsung oleh Ki Hajar Dewantoro yang sebelumnya menjabat Menteri Pendidikan pertama pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Panitia itu bertugas untuk meninjau kembali dasar-dasar, isi, susunan, dan seluruh usaha pendidikan atau pengajaran. Pada masa ini sudah memasuki pada Kabinet Syahrir II yang sebelumnya Menteri Pengajaran dijabat oleh Muhammad Sjafi'i sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947.

Adapun rencana pokok-pokok pengajaran yang dirumuskan panitia ini memberikan sebuah gambaran bahwa yang dimaksud dengan satu sistem pengajaran nasional yang dikehendaki oleh pasal 31 UUD 1945 adalah pendidikan dan pengajaran nasional yang bersendikan agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat (Daulay, 2014b, p. 83). Kemudian dalam SKB Tiga Menteri secara yuridis juga telah menempatkan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum memiliki kedudukan yang jelas. Kedudukan pendidikan agama di

sekolah umum juga diperkuat karena terakomodir dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 5 Tahun 1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 di seluruh wilayah Indonesia. Terbitnya undang-undang ini juga yang mengakomodir keberadaan pendidikan agama Islam di sekolah umum menjadi landasan yang kokoh untuk mengembangkan pendidikan agama Islam. Meskipun demikian, keadaan politik pada awal kemerdekaan yang masih rawan merupakan tantangan berat bagi pendidikan agama Islam di sekolah umum (Hamami, 2004, p. 187).

Namun demikian, kedudukan Pendidikan Agama Islam juga diperkuat dalam TAP MPRS No. XXVII Tahun 1966 ini menyempurnakan TAP MPRS No. II Tahun 1960 dengan menghapus kata-kata "*dengan pengertian bahwa murid-murid berhak untuk tidak ikut serta apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.*" Ketetapan MPRS No. XXVII Tahun 1966 ini merupakan kebijakan yang menjadi dasar dalam menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan di sekolah negeri seperti yang dinyatakan undang-undang sistem pendidikan berikutnya (Djamas, 2009, p. 128).

Berdasarkan penetapan-penetapan ini, maka semakin mengukuhkan status dan kedudukan pendidikan agama di sekolah- sekolah umum. Dengan demikian sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib para siswa mulai dari Sekolah Dasar. Begitupun juga demi mencapai tujuan dari pada pendidikan nasional yang menurut Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa: "*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*"

2. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah secara resmi dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1947 yang didahului oleh keluarnya peraturan bersama Menteri PP & K dan Menteri Agama dan diajarkan pada kelas IV Sekolah Dasar (Sekolah Rakyat). Hal ini menyesuaikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi:

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

a. Materi

Materi yang diberikan di sekolah adalah sesuai dengan usia atau tingkatannya: yaitu praktik ibadah, baca tulis Alquran, muamalah dan lain sebagainya untuk anak usia SD, SMP dan SMA.

Contoh: Materi PAI kelas XII

- Q.S. Ali Imran/3: 190-191, dan Q.S. Ali Imran/3: 159
 - Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159.
 - Asbabun nuzul Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159.
 - Makna dan pesan-pesan yang terkandung pada Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159 serta hadis terkait.

- Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83
 - Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83.
 - Asbabun nuzul Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83.
 - Makna dan pesan-pesan yang terkandung pada Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83 serta hadis terkait.

- Beriman kepada hari akhir
 - Makna beriman kepada hari akhir.
 - Tanda-tanda hari akhir.
 - Dalil-dali yang berkaitan dengan hari akhir.
 - Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir.

- Iman kepada Qadha dan Qadar
 - Makna beriman kepada qada dan qadar.
 - Tanda-tanda qada dan qadar.
 - Dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar.
 - Hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar.

- Bekerja keras dan tanggung jawab
 - Makna bekerja keras dan tanggung jawab.
 - Cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab.
 - Dalil-dali yang berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab.
 - Hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab.

- Pernikahan dalam Islam
 - Ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
 - Dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
 - Hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.

- Ketentuan waris dalam Islam
 - Ketentuan waris dalam Islam.
 - Dalil-dalil tentang ketentuan waris dalam Islam.
 - Hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam.
- Strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia
 - Strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia.
 - Hikmah dan manfaat strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia.
- Sejarah perkembangan Islam di Indonesia
 - Sejarah perkembangan Islam di Indonesia.
 - Hikmah dan manfaat sejarah perkembangan Islam di Indonesia.
- Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia
 - Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia.
 - Hikmah dan manfaat faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia.
- Faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia
 - Faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia.
 - Hikmah dan manfaat faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia.

b. Materi

Adapun guru yang dipercayakan mengasuh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi pada awalnya adalah seseorang yang memiliki pengetahuan lebih dibanding masyarakat umum dalam bidang agama Islam. Akan tetapi seiring perkembangan zaman dan keilmuan lainnya, guru PAI juga dituntut agar lebih profesional. Hal demikian adalah agar generasi bangsa ini dididik dengan cara yang lebih baik. Sebagaimana profesi lain, maka guru PAI juga memiliki syarat tertentu untuk dapat mengajar di jenjang tertentu: setiap guru dituntut memiliki empat kompetensi yaitu kepribadian, sosial, pedagogic dan profesional.

Profesi secara umum adalah suatu pekerjaan yang didasarkan asumsi sebagai berikut: (a) pekerjaan itu dilakukan terus menerus untuk melayani orang lain/masyarakat; (b) pekerjaan itu memerlukan pendidikan atau keterampilan khusus yang tidak semua orang bisa melakukannya; (c) pekerjaan itu memerlukan pendidikan tersendiri dan memerlukan waktu yang cukup panjang; (d) pekerjaan itu mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat, artinya masyarakat percaya penuh bahwa pekerjaan tersebut benar-benar mampu melayani orang lain; (e) pekerjaan itu memerlukan komitmen tinggi untuk melakukan tugas dan tanggung

jawabnya; (f) pekerjaan itu memiliki organisasi profesi yang mengatur rumah tangganya sendiri.

Indikator guru PAI yang profesional selalu dilihat dari perspektif kinerja dalam menjelaskan, memahami dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam kepada peserta didik dan masyarakat. Oleh sebab itu semua kriteria atau persyaratan profesi guru, khusus untuk guru PAI harus ditambah satu lagi yaitu pekerjaan itu memerlukan kemampuan menjelaskan, memahami nilai-nilai ajaran Islam kepada masyarakat. Di sinilah letak perbedaan utama antara guru PAI yang profesional dengan guru non-PAI yang profesional. Artinya guru PAI yang profesional sudah memenuhi kriteria guru profesional, tetapi guru profesional belum tentu memenuhi kriteria guru PAI yang profesional. Guru PAI yang profesional posisinya lebih tinggi daripada guru non-PAI.

Perbedaan itu tidak cukup hanya di dalam tingkatan lisan dan idealisme tetapi harus benar-benar bisa dipraktikkan dalam realitas kehidupan masyarakat dan realitas pembelajaran. Guru PAI yang profesional selain mahir dalam memberi motivasi belajar, terampil menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran, ahli dalam melakukan gaya mengajar yang bervariasi, rajin melaksanakan pengabdian atau melayani masyarakat juga harus memiliki keterampilan dan keahlian dalam memahami nilai-nilai atau norma agama Islam kepada masyarakat dan peserta didik. Masyarakat dan peserta didik harus memiliki cara pandang terhadap ayat dan hadis secara tepat, utuh, proporsional sehingga benar-benar mampu menampilkan dan menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang ramah, damai, demokratis, anti-kekerasan dan memiliki toleransi tinggi dengan siapapun yang berbeda agama, suku, warna kulit dan golongan.

Guru PAI yang profesional setidaknya memiliki tiga misi yaitu; pertama misi dakwah Islam, Islam harus bisa dijelaskan dan ditunjukkan dengan sikap, kepribadian dan perilaku yang menarik bagi semua manusia tanpa melihat asal-usulnya. Islam diturunkan tidak hanya untuk umat Islam saja, melainkan untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kedua misi pedagogik, pembelajaran memiliki peran sangat besar dalam merubah atau menanamkan keyakinan peserta didik. Guru yang baik adalah guru yang mampu mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang memiliki informasi baru bagi siswa, sedangkan pembelajaran efisien adalah pembelajaran yang mampu menyimpan makna atau kesan yang menarik bagi siswa. Dengan kata lain proses pembelajaran itu dilakukan secara menyenangkan tidak menakutkan bagi peserta didik. Ketiga misi pendidikan, guru selain bertugas dalam realitas pembelajaran juga memiliki tugas membimbing dan membina etika dan kepribadian peserta didik saat di sekolah ataupun di luar sekolah. Profil guru yang mampu dijadikan contoh (*uswah*) bagi peserta didik dan masyarakat merupakan peran penting dalam mensukseskan misi edukasi bagi guru.

c. Masalah dan Solusi

Masalah yang sering dihadapi antara lain:

- Pengetahuan dasar siswa yang sangat rendah seperti: kemampuan membaca Alquran yang sangat rendah bahkan ada yang belum bisa sama sekali, kemampuan salat masih rendah.
- Waktu belajar yang kurang, yaitu hanya 3 jam/ minggu.

Solusi yang dapat diambil adalah menambah jam pelajaran dan melatih siswa baca tulis Alquran.

B. Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

1. Kedudukan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Ditinjau dari awal sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia telah mencatat bahwa pada tahun 1910, ada pendapat umum yang menyatakan bahwa Indonesia belum layak memiliki perguruan tinggi. Namun ada pula yang menyatakan bahwa pada suatu saat nanti Indonesia harus mempunyai perguruan tinggi dengan tujuan untuk melatih para ahli dan pekerja kepada kedudukan yang lebih tinggi. Sebaliknya, ada pula yang berpendapat bahwa pendidikan tinggi bagi orang Indonesia akan merusak pribadinya karena tidak sesuai lagi dengan lingkungan dan akan mengalami konflik untuk mengasimilasikan diri dengan masyarakat Belanda (UGM, 2006, pp. 23–25).

Muncullah pendapat bahwa orang Indonesia tidak dapat dididik dalam ilmu pengetahuan yang setaraf dengan orang Barat, sekalipun orang Indonesia dapat menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam mencapai gelar akademik. Tentu hal ini mempunyai alasan bahwa sejarah menunjukkan Indonesia adalah negara jajahan Belanda. Misi Belanda itu sendiri adalah untuk melakukan pembodohan terhadap negara jajahannya. Jadi tidaklah mengherankan jika situasi sosial politik seperti ini yang muncul pada saat itu.

Perlu diketahui bahwa cara Belanda menjajah sangat berbeda dengan cara Inggris. Kalau Inggris justru mencerdaskan negara jajahannya. Apabila negara jajahannya mulai 'cerdas' mereka memberi kemerdekaan. Seiring dari perjalanan waktu yang terus berkelanjutan maka dukungan terhadap perguruan tinggi di Indonesia pun semakin kuat.

Kemudian dalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia, pada tanggal 2 April 1950 tepatnya di Yogyakarta muncullah UU No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia. Pada saat itu dari segi politik bentuk negara Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan ibukota negara berada di Yogyakarta. Kedudukan pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum dalam UU No. 4 tahun 1950 belum dibicarakan secara spesifik atau khusus. Adapun kutipan bunyi pasal tersebut terdapat pada pasal 3, pasal 7 ayat 4 dan pasal 20 yang menunjukkan:

1. Pasal 3

Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

2. Pasal 7

Ayat 4, Pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memberi pimpinan di dalam masyarakat dan yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.

3. Pasal 20.

Ayat 1, Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Ayat 2, Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

Selanjutnya tahun 1960 Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi baru dimulai dengan adanya ketetapan MPRS No. II/ MPRS/1960 yang berarti pendidikan agama sebelum itu secara formalnya baru diberikan di Sekolah Rakyat sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat atas saja. Adapun dasar operasionalnya, pelaksanaan pendidikan Agama di Perguruan Tinggi tersebut ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Dalam Bab III Pasal 9 ayat 2 sub b, terdapat ketentuan sebagai berikut: *“Pada Perguruan Tinggi Negeri diberikan Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran dengan pengertian bahwa mahasiswa berhak tidak ikut serta apabila menyatakan keberatan.”*

Kemudian setelah meletusnya G. 30 S. PKI pada tahun 1965, diadakan sidang umum MPRS pada tahun 1966, maka mulai saat itu status pendidikan agama di sekolah-sekolah berubah dan bertambah kuat. Dengan adanya ketetapan MPRS XXVII/MPRS/1966 Bab I pasal 1 berbunyi: *“Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai dengan Universitas-Universitas Negeri.”*

Setelah ditetapkannya pendidikan agama sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, maka kedudukan pendidikan agama di perguruan tinggi merupakan pendidikan mata kuliah yang menjadi ujung tombak dalam pengembangan kepribadian mahasiswa. Harapannya agar mahasiswa memiliki karakter yang tangguh dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam UU No. 2 tahun 1989 yang menunjukkan kedudukan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi dalam Undang-Undang secara umum tertuang dalam tujuan Pendidikan Nasional tercantum dalam Bab II pasal 4 yang berbunyi: *“Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,*

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dalam Bab II pasal 3 juga dinyatakan bahwa: *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”* (Rafiah, 2013, pp. 88–90)

Hal ini semakin jelas bahwa kedudukan pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi Umum dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang Tujuan Pendidikan Nasional dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Fungsi Pendidikan Nasional menempati posisi yang diperhitungkan, yaitu sebagai mata kuliah wajib. Bagaimanapun juga pendidikan agama merupakan salah satu mata kuliah dalam kurikulum perguruan tinggi umum, bahkan menjadi mata kuliah strategis dalam pengembangan kepribadian. Bersama mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk itulah mata kuliah pendidikan agama menjadi mata kuliah wajib yang harus diajarkan pada semua program studi. Tujuannya adalah untuk membangun karakter mahasiswa yang unggul, kepribadian mulia, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran kemanusiaan secara luas (Sulaiman, 2015).

2. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dari pengertian ini pendidikan agama khususnya di perguruan tinggi sangat diharapkan untuk membentuk kepribadian yang baik dan mulia di dalam diri mahasiswa.

Dalam pelaksanaannya pendidikan agama di Perguruan Tinggi umum (PTU) telah memperoleh landasan yang kokoh sejak dikeluarkan Ketetapan MPRS Nomor II Tahun 1960 dan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961, yang mewajibkan pengajaran mata kuliah agama di Perguruan Tinggi Negeri. Begitu juga dalam GBHN dinyatakan bahwa dasar dan tujuan pendidikan nasional adalah pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Mata kuliah pendidikan agama pada perguruan tinggi dalam proses belajarnya menggunakan sistem kredit semester yang masing-masing perguruan tinggi

menggunakan jumlah dan besar SKS yang bervariasi. Rata-rata pendidikan agama Islam di perguruan tinggi hanya mendapat 2 SKS dalam satu semester awal yang dimasukkan dalam komponen mata kuliah MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum). Kemudian muncul SK Mendiknas No.232/U/2000 pada tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pada Bab I; Ketentuan Umum, yaitu pada pasal 1 ayat 7 dinyatakan bahwa: *“Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”* (Rafiah, 2013, p. 90).

Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum, menurut Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, merupakan salah satu mata kuliah kelompok pengembangan kepribadian (MPK). Misi mata kuliah tersebut menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan peserta didik mengembangkan kepribadiannya. Sedangkan misinya membantu peserta didik agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dalam menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang diuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Berdasarkan visi dan fungsi pendidikan agama di PTU, maka secara konseptual pendidikan agama di PTU dikembangkan ke arah paradigma organisme. Akan tetapi, realitas di lapangan PTU pada umumnya masih berkuat pada paradigma dikotomis atau mekanisme.

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum (PTU) merupakan kelanjutan dari pengajaran yang diterima oleh peserta didik mulai dari Tingkat Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Atas. Pada November 1947 dibentuk Panitia Perbaikan Sekolah Tinggi Islam (STI), yang dalam sidangnya sepakat mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) pada 10 Maret 1948 dengan empat fakultas: agama, hukum, ekonomi, dan pendidikan. Pada 20 Februari 1951 Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII), yang berdiri di Surakarta pada 22 Januari 1950, bergabung dengan UII yang berkedudukan di Yogyakarta. Sebagai wujud penghargaan pemerintah bagi Yogyakarta sebagai Kota Revolusi, kepada golongan nasionalis diberikan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tanggal 16 Desember 1949.

Sementara itu, kepada golongan Islam diberikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yang diambil dari Fakultas Agama UII berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950. Peresmian PTAIN dengan jurusan Da'wah (kelak Ushuluddin), Qodlo (kelak menjadi Syari'ah) dan Pendidikan (Tarbiyah) menjadi Perguruan Tinggi Negeri dilakukan pada 26 September 1951. Sementara di Jakarta, enam tahun kemudian berdiri pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada 14 Agustus 1957 berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957. Karena pentingnya arti

dan fungsi pendidikan agama di pendidikan tinggi, pemerintah mengambil langkah strategis dalam merumuskan dan memasukkan pendidikan agama pada kebijakan negara di bidang pendidikan. Untuk itulah dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tentang pelaksanaan pendidikan agama di perguruan tinggi disesuaikan dengan tingkat berpikir mahasiswa dengan prinsip-prinsip dasar agama dan didiplin ilmu yang ditekuni khususnya dalam pendidikan agama Islam.

3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subyek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu (Thoha, 1999, p. 1). Menurut Hasan Langgulung tujuan pendidikan agama harus mampu mengakomodasikan tiga fungsi dari agama, yaitu:

- a. Fungsi spiritual yang berkaitan dengan aqidah.
- b. Fungsi psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku individual termasuk nilai-nilai akhlak yang menyangkut derajat manusia ke derajat yang lebih sempurna.
- c. Fungsi sosial yang berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan manusia dengan manusia lain atau masyarakat di mana masing-masing menyadari hak-hak dan tanggung jawabnya untuk menyusun masyarakat yang harmonis dan seimbang.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam bertujuan membentuk karakter bangsa yang berakhlak mulia, tentunya bagi agama dan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan kurikulum pendidikan agama Islam untuk siswa sekolah/madrasah berfungsi sebagai berikut:

- a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan social dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.

- d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), system dan fungsionalnya.
- g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain (Majid, 2004, p. 15).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (1990). *Pemikiran Umat Di Nusantara Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad Ke-19*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Adam, A. W. (2004). *Pelurusan Sejarah Indonesia* (cetakan pertama). Yogyakarta: Tride.
- Afifuddin. (2007). *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Prosfect.
- Al-Abrasyi, M. A. (1991). *Dasar-Dasar Pendidikan Islam* (T. Sulaiman, trans.). Ponorogo: PSIA.
- Al-Attas, S. M. N. (1967). New Light on the Life of Hamzah Fansurî. *JMBRAS*, 40(2).
- Al-Qurtuby, S. (2017). *Arus Cina-Islam-Jawa Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Nusantara Abad 15 & 16*. Semarang: eLSA Press.
- Alfabet, Z. (2000). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Ali, M. (1993). *Ketaatan, Kesalehan dan Kecendikiaan*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Amin, S. M. (2015). *Sejarah Peradaban Islam* (ke-5). Jakarta: Amzah.
- Anam, S. (2017). Karakteristik dan Sistem Pendidikan Islam: Mengenal Sejarah Pesantren, Surau, dan Meunasah di Indonesia. *JALIE*, 1(1).
- Arifin, M. (1991). *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Armando, C. (1967). *The Suma Oriental of Tome Pires an Account of The East, from The Red Sea to Japan Written in Malacca and India*. Liechtenstein: Kraus Reprint Limited Nendeln.
- Assegaf, J. (n.d.). *Kafaah dalam Perkawinan dan Dimensi Masyarakat Sulsel*. Makassar: tanpa penerbit.
- Azra, A. (1996). *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernime hingga Post-Modernisme* (Cet. 1.). Jakarta: Paramadina.
- Azra, A. (1999a). *Konteks Berteologi di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Azra, A. (1999b). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Boestami, B., Naim, S. A., & Anwar, Z. (1981). *Aspek arkeologi Islam tentang makam dan Surau Syekh Burhanuddin Ulakan*. Padang: Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbala Sumatera Barat.
- Bruinessen, M. van. (1995). *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Chatibul, U. (2004). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Kudus: PT. Menara Kudus.
- Cummings, & Worley. (2005). *Organizational Developmen*. South Western: Thompson Gale Corporation.
- Daliman. (2012). *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Daradjat, Z. (2011). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Daudy, A. (1978). *Syekh Nuruddin ar-Raniri*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Daulay, H. P. (2012a). *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Daulay, H. P. (2012b). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Daulay, H. P. (2014a). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Daulay, H. P. (2014b). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Cetakan ke). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Daulay, H. P. (2015). *Pendidikan Islam di Era Global*. Medan: Perdana Publishing.
- Daulay, H. P., & Pasa, N. (2012). *Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Davis, J. (1880). *The Voyages and Works of John Davis: The Navigator* (A. H. Markham, ed.). London: The Hakluyt Society.
- Dhafoer, Z. (1984). *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Dhofier, Z. (1984). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Diya, T. (1975). *Orang-Orang Besar Indonesia III*. Jakarta: Antara.
- Djamas, N. (2009). *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Djojoseuroto, K. (2006). *Analisis Teks Sastra dan Pengajarannya* (cetakan pe). Yogyakarta: Pustaka.
- Djumhur. (1979). *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV. Aneka Ilmu.
- Djumhur, & Danasuparta. (1976). *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu.
- Duli, A., Rahman, A., Sulistyono, B., Muhaeminah, Mutmainnah, Raodah, ... Sumalyo, Y. (2013). *Monumen Islam di Sulawesi Selatan* (M. A. R. Effendy, ed.). Makassar: BPCB Makassar bekerjasama dengan Identitas Unhas dan Danarosi Media.
- Graaf, H. J. De. (1986). *Awal Kebangkitan Mataram Masa Pemerintahan Senapati*. Jakarta: Grafiti Press.
- Hadi, A. (2018). Mengungkap Beberapa Dimensi Budaya Kerajaan Aceh: (Sebuah Kajian Historis). *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, XXXII(1).
- Hakimy, I. (1978). *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hall, D. G. E. (1988). *Sejarah Asia Tenggara* (M. H. Mustopo, ed.; I. P. Soewasha, trans.). Surabaya: Usaha Nasional.
- Hamalik, O. (2010). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamami, T. (2004). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM SEBAGAI KEHARUSAN SEJARAH. *Pendidikan Agama Islam*, 1(2).
- Hamid, A. (2006). Semangat Islam Dalam Kebudayaan Orang Bugis-Makassar. *Jurnal Jaffray*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.25278/jj71.v4i1.129>

- Hamka. (1963). *Sjeh Yusuf Tadju'i Chalwati (Tuanta Salamaka), 1626-1699*. Medan: Madju.
- Hana, M. Y. (2018). Dinamika Sosio-Ekonomi Pedagang Santri dalam Mengembangkan Industri Kretek di Kudus, 1912-1930. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 15-35. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1420>
- Harun. (1995). *Kerajaan Islam Nusantara abad XVI & XVII*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera.
- Hasan, M. A., & Ali, M. (2003). *Kapita Selektta Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hasbullah. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasjmi, A. (1980). *Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, Ulama Negarawan yang Bijaksana*. Medan: Waspada.
- Hasjmi, A. (1983). *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*. Jakarta: Buena.
- Hasjmi, A. (1990). *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasjmy, A. (1989). *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: al-Ma'arif.
- Hasjmy, A. (1999). *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Taj'ul Alam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasymy, A. (1975). *Pendidikan Islam di Aceh Dalam Perjalanan Sejarah*. Banda Aceh: Sinar Darussalam.
- Hawas, A. (1980). *Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-Tokohnya di Nusantara*. Surabaya: al-Ikhlâs.
- Hidayat, K. (2000). *Problem dan Prospek IAIN*. Jakarta: Direktorat Pembinaan PT Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Hikmah, R. (1993). *Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbala Sumatera Barat*. Jakarta: Lich Stope.
- Hurgronje, C. S. (1997). *Aceh Rakyat dan Adat Istiadatnya*. Jakarta: INIS.
- Ibrahim, M., Arifm, M., Sulaiman, N., Sufi, R., Ahmad, Z., Ambary, H. M., & Alflan, T. I. (1991). *Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Idi, A., & Suharto, T. (2006). *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ismail, F. (1996). *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ismail, R. H. (2012). *Sejarah Melayu: Cerakinan Sejarah, Budaya, dan Bahasa*. Pulau Pinang: University Sains Malaysia Press.
- Jaffar, H. F. S. (2020). *Jaringan Ulama dan Islamisasi Indonesia Timur*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- K.Rujiati, E. (2010). *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kartodirdjo, S. (1988). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, S., & Dkk. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan*

- Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kodir, A. (2015). *Sejarah Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Krisdiyanto, G., Muflikha, M., Sahara, E. E., & Mahfud, C. (2019). Sistem Pendidikan Pesantren dan Tantangan Modernitas. *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(1), 11–21. <https://doi.org/10.32939/TARBAWI.V15I1.337>
- Langgulang, H. (1980). *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Lombard, D. (2008). *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: KPG.
- Mahasin, A. (1996). *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Aneka Budaya Nusantara*. Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal.
- Mahfud, A. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam Pemikiran Gus Dur (Cetakan pe)*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Majid, A. (2004). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Maliki, Z. (2010). *Agama Priyayi, Makna di Tangan Elite Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Massiara, H. A. (1983). *Syekh Yusuf Tuanku Salamaka dari Gowa*. Jakarta: Yayasan Lakipadada.
- Matthes, B. F. (1883). *Makassaarsche Chrestomathie*. Amsterdam: Spin & Zoon.
- Mattulada. (1983). *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moertono, S. (1985). *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moestopo. (2010). *Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mudyahardjo, R. (2006). *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2009). *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pelembagaan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum, hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, H. (1999). *Kontekstualisasi Kitab Kuning; Tradisi Pengajian dan Metode Pengajaran*. Bandung: Cita Pustaka Setia.
- Mukti, A. (2017). *Konstruksi Pendidikan Islam: Belajar dari Kejayaan Nizhamiyah Dinasti Saljuq*. Medan: Perdana Publishing.
- Mulyadi. (2010). *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Dalam Mengembangkan Budaya Mutu*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mulyati, S. (2006). *Tasawuf Nusantara*. Jakarta: Kencana.
- Muzhar, M. A. (2000). *Kedudukan IAIN sebagai Perguruan Tinggi dalam Problem & Prospek IAIN*. Jakarta: Ditbinpertais.

- Najamuddin. (2005). *Perjalanan Pendidikan di Tanah Air (Tahun 1800-1945)*. Bandung: Rineka Cipta.
- Nasution, H. (1999). *Falsafah & Mistisisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nata, A. (1998). *Ilmu Kalam, Filsafat dan Tasawuf*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nata, A. (2010). *Manajemen Pendidikan* (Cetakan ke). Jakarta: Kencana Media Group.
- Nata, A. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nieuwenhuijze. (1945). *al-Din van Pasai*. Leiden: E.J. Brill.
- Nieuwenhuijze. (1953). *Syams al-Dîn al-Sumatranî, "Nûr al-Daqâ'iq: the Sumatran Mystic Shamsu'î Din ibn 'Abdullah*. Leiden: JRAS.
- Nizar, S. (2010). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Pairin, P. (2012). Sejarah Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Shautut Tarbiyah*, 18(2), 116–141. <https://doi.org/10.31332/STR.V18I2.79>
- Poelinggomang, E. L. (2002). *Makassar Abad XIX (Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1992). *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2007). *Sejarah Nasional Indonesia (Zaman Jepang dan Zaman Republik) Jilid VI Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwadi. (2006). Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit. *Konstitusi*, 3(4).
- Qomar, M. (2007). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Rafiah, G. (2013). Tradisi Keilmuan Islam Di Perguruan Tinggi Umum Studi Tinjauan di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1).
- Rahim, A. R. (1989). *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Unhas.
- Ramayulis. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat, dan Metodologi dari Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ricklefs, M. C. (1998). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi.
- Rifa'i, M. (2016). *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia*. (1963). Medan.
- Ritongan, A. A. (2008). *Pendidikan Islam dalam Buaian Arus Sejarah*. Bandung: Citapustaka Media.
- Robbin, S. P. (2008). *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi* (cetakan ke; Halida, trans.). Jakarta: Erlangga.
- Saharman, S. (2018). Sejarah Pendidikan Islam di Minangkabau. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 6(1), 93–104. <https://doi.org/10.15548/turast.v6i1.693>
- Said, M. (1981). *Aceh Sepanjang Abad* (Cetalkan P). Medan: Waspada.
- Saifullah. (2010). *Sejarah & Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

- Saleh, A. R. (2000). *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: PT. Gemawindu Pancaperkasa.
- Samad, D. (2003). *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau: Syarak Mandaki Adat Manurun*. Jakarta: The Minangkabau Foundation.
- Sanaky, H. (2003). *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Santosa, R. B., Suwito, Y. S., Dwianto, D., Nugraheni, D., Haris, A., & Yuliani, P. (2008). *Revianto Budi Santosa Yuwono Sri Suwito (Member), Djoko Dwianto (Member), DS Nugraheni (Member), Andreas Haris (Member), Pratiwi Yuliani (Editor)*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
- Saridjo, M. (1980). *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bakti.
- Schrieke, B. J. O. (1973). *Pergolakan Agama di Sumatera Barat* (S. Poerbakawatja, trans.). Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Sewang, A. M. (2005). *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sirozi, M. (2004). *Politik Kebijakan Pendidikan Di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam Dalam Penyusunan UU No. 2/ 1989*. Jakarta: INIS.
- Steenbrink, K. A. (1988). *Kitab Suci atau Kertas Toilet: Nuruddin ar-Raniri dan Agama Kristen*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Steenbrink, K. A. (1991). *Pesantren Madrasah dan Sekolah*. Jakarta: LP3ES.
- Subhan, A. (2012). *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20*. Jakarta: Kencana.
- Sufi, U. (1987). *Pandangan dan Sikap Ulama di Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: LIPI.
- Sukardjo, M. (2009). *Landasan Pendidikan, Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sulaiman, R. (2015). PENDIDIKAN (AGAMA) ISLAM DI PERGURUAN TINGGI: Tawaran Dimensi Esoterik Agama Untuk Penguatan SDM. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 153. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v10i2.818>
- Sunanto, M. (2005). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sunny, I. (1980). *Bungong Rampai Tentang Aceh*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Suwendi. (2004). *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syamsuddin, H. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia; Zaman Kemerdekaan, 1945-1966*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Thoha, C. (1999). *Metodologi Pengajaran Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H. A. (2000). *Paradigma Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (1995). *Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia 1945-1995*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Toha, H. M. C. (1996). *Kapita Selektta Pendidikan Islam (I)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tudjimah. (1987). *Syekh Yusuf Makassar: Riwayat Hidup, Karya, dan Ajarannya*. Jakarta: Departemen P & K.

- UGM, T. D. P. A. I. (2006). *Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM.
- Umar, B. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Usman, A. R. (2003). *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wahab, R. (2004). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Yatim, B. (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yunus, M. (1992a). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Yunus, M. (1992b). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Yusrianto, E. (2011). *Lintasan Sejarah Pendidikan Islam*. Pekanbaru: Intania Grafika.
- Yusuf, M. (2006). *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Kelompok Penerbit Pinus Pustaka.
- Zainuddin, M. (1961). *Tarich Atjeh dan Nusantara*. Banda Aceh: Pustaka Iskandar Muda.
- Zuhairini. (2008). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuhairini, M. K. (1985). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Departemen Agama.
- Zuhairini, Z. (2004). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

RIWAYAT EDITOR DAN PENULIS



Prof. Dr. Abdul Mukti, MA lahir di Sumbok, Aceh Utara, Provinsi Aceh, pada tanggal 01 Oktober 1959. Ia menyelesaikan pendidikan S₁ pada tahun 1984 dari jurusan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, IAIN-SU Medan, S₂ pada tahun 1993 dari Pascasarjana IAIN-Syarif Hidayatullah, Jakarta, sedangkan S₃ diselesaikan pada tahun 2000 dari IAIN-SUKA, Yogyakarta. Pada saat ini ia menjadi Dosen Tetap Pascasarjana IAIN-SU Medan. Buku yang ia tulis antara lain: *Konstruksi Pendidikan Islam: Belajar Dari Kejayaan Madrasah Nizhamiyah Dinasti Saljuq*, *Pembaharuan Lembaga Pendidikan Islam di Mesir: Studi Tentang Sekolah-sekolah Modern Muhammad Ali Pasya*, dan *Paradigma Pendidikan Islam: Dalam Teori dan Praktek Sejak Periode Klasik Hingga Modern*. Selain itu ia pernah menulis beberapa tulisan yang dimuat dalam buku kolektif dan jurnal.

Dr. Solihah Titin Sumanti, M.Ag, lahir di Balige, Sumatera Utara tanggal 13 Juni 1973, menempuh tingkat pendidikan dasar di SD Negeri 173523 Balige, Tapanuli Utara (1986). Lanjutan pendidikannya di tingkat Menengah maupun Atas pada MTS/MA Pesantren Modern Daar Al- Uluum Asahan-Kisaran SUMUT (1992). Setelah itu, melanjutkan studi (S-1) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Prodi SKI Fakultas Adab IAIN Su-Ka (1998). Selesai studi di Yogyakarta, melanjutkan



Studi Magister dan Doktor Pendidikan Islam di UIN Sumatera Utara. Dengan judul Tesis: *Pendidikan Wanita di Era Abbasiyah (2002)* dan Disertasi: *Modernisasi Isi pendidikan Muhammadiyah, NU dan Al-Wahliyah tahun 1900 – 1942 (2017)*.

Saat ini kegiatan sehari-hari adalah Dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UIN Sumatera Utara Medan dengan NIDN. 2013067301. Selain itu, saya juga sedang mengemban amanah sebagai Sekretaris Jurusan Sejarah Peradaban Islam periode 2017-2020 dan sekarang sebagai Sekretaris Jurusan Prodi Ilmu Komunikasi periode 2021-2024. Karya tulis yang dihasilkan berupa buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya sudah banyak dipublikasikan ditingkat nasional maupun internasional. Beberapa karya dalam bentuk buku yaitu; *Dasar-Dasar Materi Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum (2015)*, *Makam Kuno dan Sejarah Islam di Kota Medan (2019)*, dan *Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara: Menelusuri Jejak Masjid di Kesultanan Serdang (2019)*.

Keaktifannya menulis di berbagai jurnal, di antaranya: Konsep Pendidikan dalam Al-Qur'an Sebuah Upaya Memaknai Pendidikan Islam, Lembaga Pendidikan Klasik Pra Madrasah: Masjid dan Kuttab, Kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda Terhadap Islam yang Merupakan, Kajian Sosial Politik, Kitab Kuning Membangun Apresiasi yang Tepat, dan Perkembangan Organisasi Islam Era Kolonial Di Sumatera Utara, New Religious Authority of Islamic Millennial: A Study of Rohis Community in Medan City, The Development of Islamic Educational Institution in Medan: Typology, Orientation, and Commercialization dll. Memiliki google scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=E8OoUkQAAAAJ&hl=id> dan ID Sinta: 6124160.



Dr. Yusnaili Budianti, M. Ag, Lahir di Desa Hajoran Labuhan Batu, 15 Juni 1967, adalah putri kelima dari Alm. Bapak R. Nasution dengan Alm. A. Hasibuan. Memulai pendidikan di SD Negeri Sidonok Hajoran (tamat tahun 1980). Kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tarbiyah Islamiyah No. 144, selama tujuh tahun (tamat tahun 1987). Setelah rampung melalui kelas tujuh, dengan keinginan yang

kuat dan dorongan keluarga mengadakan rihlah ilmiah ke Kota Medan yang berjarak kira-kira 400 km dari kampung kelahirannya. Diterima menjadi mahasiswa IAIN, tapi memilih kuliah di UISU karena berbagai pertimbangan, merupakan awal perjuangannya menampilkan eksistensi diri di perantauan.

Tamat dari FATAR UISU (Tahun 1993) memberanikan diri menerima tawaran seorang tokoh masyarakat membuka satuan pendidikan (MDA) dan menjadi tenaga pendidik satu-satunya ketika itu. Setelah berjalan setahun (1994) tertantang menjelajah dunia luar dengan mengikuti program Inpres Desa Tertinggal. Selama tiga tahun menjadi masyarakat Minangkabau di pelosok Sumatera Barat, merasa terpanggil untuk kembali ke kampus. Maka pada tahun akademik 1998/1999 melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 di IAIN SU prodi Pendidikan Islam (tamat tahun 2002).

Sejak tahun 2001 mengabdikan diri di IAIN SU dan pada tahun 2003 resmi diangkat sebagai tenaga pendidik di IAIN SU Medan. Selama ini selalu aktif dalam kegiatan ilmiah berupa seminar, menulis artikel, diskusi dosen, penelitian serta menulis buku. Tahun 2017 meraih gelar Doktor Jurusan Pendidikan Islam di PPS UIN SU Medan. Sejak Januari 2021 diamanahkan mengelola prodi PEDI PPS UIN SU Medan.

Taslim Batubara, S.Hum, lahir di Medan pada tanggal 11 Februari 1998. Penulis lahir beberapa bulan sebelum terjadinya peristiwa Reformasi besar-besaran di negeri ini. Ia tumbuh dan besar di Kota Para Ketua (Medan) dengan berbagai kultur dan budayanya yang majemuk. Penulis merupakan anak dari Bapak Hisyam Batubara dan Ibu Neliwaty Ritonga. Ia adalah bungsu dari tiga orang bersaudara. Pendidikan dasar penulis tempuh di SD Swasta Tamah Harapan (2004-2010), pada tingkat menengah penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 2 Medan (2010-2013), dan tingkat atas ditempuh di SMK Swasta Tritech Informatika (2013-2016). Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, UIN Sumatera Utara (2016-2020) dengan skripsi berjudul *Interaksi Sosial Komunitas Alawiyyin di Kota Medan dalam Bingkai Multietnik, 1905-1962*. Setelah menyelesaikan pendidikan pada tingkat strata-1, saat ini penulis juga sedang menempuh pendidikan pada tingkat strata-2 (magister) di Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2021-sekarang).



Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam bidang kepenulisan, beberapa karya-karya penulis, di antaranya: buku berjudul *Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara: Menelusuri Jejak Masjid Kesultanan Serdang* (2019), artikel jurnal, *Mengukur Intelektual Muslim dari Kualitas Perpustakaan* (2019); *Memutar Sejarah "Gambar Idoep" Masa Silam: Industri Perfilman dan Dampaknya di Medan pada Era Kolonial Belanda sampai Orde Baru* (2020); *Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar: Sang Penakluk dari Kesultanan Acen Darussalam* (2020); *Diaspora Orang Arab di Kota Medan: Sejarah dan Interaksi Sosial Komunitas Alawiyyin pada Abad ke-XX* (2021). Selain itu penulis juga pernah menjuarai beberapa lomba penulisan, baik tingkat lokal maupun nasional, yaitu: Juara 3 Artikel Ilmiah, Pekan Kreatifitas Mahasiswa FIS UIN-SU (2018); Juara 1 Lomba Artikel Islami tingkat Nasional, Pekan Kreatifitas Pena Persma LPM Dinamika UIN-SU (2018); Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah, Library Festival UIN-SU (2018), dan karya-karya lainnya yang sudah dipublikasikan di beberapa media online.

Penulis juga terlibat di beberapa organisasi, di antaranya: Historical Sumatera Utara (2017-sekarang); Komunitas KitaBaca (WeRead) (2018-sekarang); Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia (IKAHIMSI) (2017-2019); Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) (2019-2020); dan Pelita Toleransi (2021-sekarang). Penulis saat ini juga aktif sebagai editor jurnal *Local History and Heritage* yang berada di bawah lembaga Medan Resource Center (MRC). Disela-sela padatnya kegiatan perkuliahan dan aktif di beberapa organisasi, kegiatan penulis lainnya adalah seorang driver ojek online yang telah dilakoni sejak masa awal kuliah. Penulis memiliki motto hidup, *"Hidup Cuma Sekali, Maka Hidup Harus Berarti."*



Fitri Kamelia Hutapea

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 040459 Berastagi (1999-2005)
2. MTsN Kabanjahe (2005-2008)
3. MAN Kabanjahe (2008-2011)
4. S-1 UIN-SU Medan (2011-2015)
5. S-2 UIN-SU Medan (2018-sekarang)

Motto: "Fastabiqul Khairat"



Eny Ernawati

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 048232 Kabanjahe (1999-2005)
2. MTss Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen (2005-2008)
3. Mu'allimaat Muh Yogyakarta (2008-2011)
4. S-1 UIN-SU Medan (2011-2015)
5. S-2 UIN-SU Medan (2018-sekarang)

Motto: "Hidupku dan Matiku Karena Allah"



Ilham Imara Malik Daulay

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 024771 Binjai (2001-2007)
2. MTsN Binjai (2007-2010)
3. MAN Binjai (2010-2013)
4. STAI Al Ishlahiyah Binjai (2013-2017)
5. Pascasarjana UINSU (2018-Sekarang)

Motto: "Hilang Bukan Berarti Habis"



Siti Asiyah

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 05 Wirosari Kabupaten Grobogan Jateng (1978 - 1984)
2. MTsN Blora (1985-1988)
3. SMAN 1 wirosari (1989-1992)
4. STIP pelita bangsa Binjai (2013-2017)
5. Pascasarjana UINSU (2018-nov 2020)

Motto: "Memberi Tidak Kehilangan"

Aisyah



Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 133889 Tanjung Balai (2002-2008)
2. MTs. Ponpes. Bina Ulama, Kisaran, Asahan (2008-2011)
3. MA. Ponpes. Bina Ulama, Kisaran, Asahan (2011-2014)
4. S1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2014-2018)
5. S2 Pascasarjana niversitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018-Sekarang)

Motto: "Raih Keberkahan Hidup Lewat Ilmu dan Amal untuk Allah dan Rasul-Nya"



Maja Hamdani

Riwayat Pendidikan:

1. SD NEGERI 010085 (1992-1998) Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan
2. Mts Falahiyah (1998-2001) Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan
3. SMK NEGERI (2001 - 2004);Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan
4. S-1 IAIDU ASAHAN (2009 - 2014) Kab. Asahan
5. S-2 UINSU MEDAN (2018- 2021)

Motto: "Nikmatnya Hidup Jika Bermanfaat Bagi Orang Lain"



Imron Bima Saputra

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 067952 Medan (2000-2007)
2. MTs PonPes Darul Arafah (2007-2010)
3. MAS PonPes Darul Arafah (2010-2013)
4. S1 STAI Darul Arafah (2014-2018)
5. S2 UIN-SU Medan (2018-2020)
6. S3 UIN-SU Medan (2020-Sekarang)

Motto: “Ilmu Tidak Akan Memberikan Sebagiannya kepadamu, Sampai Kamu Memberikan Bagianmu Semua kepadanya”



Dedi Nurniadi

Riwayat Pendidikan:

1. SD Al-Washliyah Pematang Pelintahan (1989-1994)
2. MTs. Al-Washliyah Simpang Bedagai (1994-1997)
3. MAS. PPQ. Al-Washliyah Firdaus (1997-2000)
4. S1 IAIN Sumatera Utara FT/PAI (2000-2004)
5. S2 Pascasarjana UIN Sumatera Utara (2018-sekarang)

Motto: “Ikhlas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana”



Harmida Ramadhani Nasution

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 040464 (1999-2005)
2. SMP Galih Agung PonPes Darul Arafah (2005-2008)
3. SMA Galih Agung PonPes Darul Arafah (2008-2011)
4. S1 STAI Darul Arafah (2012-2015)
5. S2 UIN-SU Medan (2018-2020)

Motto: “Syukur, Sabar dan Ikhlas Adalah Kunci Kebahagiaan”



Rabiatul Adawiyah

Riwayat Pendidikan:

1. SD Impres No. 137697 (1984-1990) Kota Tanjungbalai
2. Mts N (1990-1993) Kota Tanjungbalai
3. MA Daar Al-Falah (1993-1996) Kota Tanjungbalai
4. S-1 IAIDU ASHAN (2006-2010) Kab. Asahan
5. S-2 UINSU MEDAN (2017-2021)

Motto: “Hidup Adalah Anugrah, Jalani Hidup dengan Senyum”



Nurul Huda ZH Harahap

Riwayat Pendidikan:

1. SD PAB 29 (2000-2006)
2. MTS PAB 3 (2006-2009)
3. MAN2 MODEL MEDAN (2009-2012)
4. S1 FAKULTAS DAKWAH & KOMUNIKASI UINSU (2012-2016)
5. S1 FAKULTAS AGAMA ISLAM DHARMAWANGSA (2014-2017)
6. S2 PASCASARJANA UINSU (2017-2021)

Motto: “Sabar dan Ikhlas Adalah Kunci Ketenangan Hidup”



Irwan Syahrudin

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 117520 (1996-1992) Kualuh Hilir
2. MTs. Alwashliyah (1992-1995) Kualuh Hilir
3. MAS GUPPI (1998-2000) Tebing Tinggi
4. S1 STAI Tebing Tinggi Deli (2006-2011)
5. S2 UIN-SU Medan(2018-2021)

Motto: “Teruslah Berbuat Kebaikan Karena Masa Depan yang Baik Cerminan di Masa Lalu”



Syam's Ismail Ghifari

Riwayat Pendidikan:

1. SDN. 050736 Pulau Banyak, Tanjung pura, Langkat (1999-2005)
2. Mts. S Tarbiyah Waladiyah Pulau Banyak , Tanjung pura, Langkat (2005-2008)
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jatim (2008-2012)
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS)/ (2013-2018)
5. UINSU PASCASARJANA (2018- Hingga kini)

Motto: “Ridho Allah dan Orang Tua Kunci Sukses Dunia Akhirat”



Neng Nurcahyati Sinulingga

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 020263 (2002-2007) Kota Binjai
2. MTSN Binjai (2007-2010) Kota Binjai
3. MAN BINJAI (2010-2013) Kota Binjai
4. S1 STAI Al- ISHLAHIYAH ABDUL HALIM HASAN KOTA BINJAI (2013 -2017)
5. S2 UIN-SU Medan(2018-2020)

Motto: “Nikmati Prosesmu Raihlah Kesuksesanmu”



Desrayanti Sullama

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 112247 (2002-2007) Hutagodang
2. MTs.S Islamiyah (2007-2010) Hutagodang
3. SMA N2 Rantau Utara (2010-2013) Rantau Prapat
4. S1 UIN sumatera Utara Medan (2013 -2017)
5. S2 Pascasarjana UIN-SU Medan (2018-2021)

Motto: “Libatkan Allah dalam Setiap Aktivitasmu”



Herwina Azhabi

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 060893, Medan (1989 -1995)
2. SMP Negeri 7, Medan (1995 - 1998)
3. SMA Swasta Kesatria, Medan (1998 - 2001)
4. S1 - Universitas Sumatera Utara (2001 - 2006)
5. S2 - Pascasarjana UINSU (2018 - 2020)

Motto: “Hidup untuk Ibadah”

Mekkah dan Madinah yang sering juga disebut dengan al-Haramayn menduduki posisi penting dalam Islam dan kehidupan kaum muslim. Selain menjadi pusat ibadah, Haramayn merupakan pusat intelektual di dunia muslim. Hal ini menyebabkan para ulama dan penuntut ilmu yang mengajar dan belajar di Mekkah dan Madinah pada umumnya memiliki pandangan keagamaan yang lebih kosmopolitan dibandingkan mereka yang berada di kota-kota muslim lain. Selain itu, superioritas yang didapat para penuntut ilmu selama belajar di Haramayn tidak hanya memperkuat dalam diri mereka ciri-ciri umum yang universal bagi seluruh muslim, tetapi juga menempa mereka ke dalam suatu formulasi masyarakat muslim maupun dunia Islam lainnya.

Ketika islamisasi telah mencapai tanah Indonesia yang dahulu disebut Nusantara, eksistensi Mekkah dan Madinah sebagai pusat intelektual muslim membuat para pelajar Indonesia banyak yang bercita-cita ingin menimba ilmu di tempat ini. Hal itu terbukti dari survei yang dilakukan pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1860 M, disebutkan bahwa bangsa terbesar yang berada di Mekkah adalah orang "Jawah" (Nusantara) dan karena itu bahasa Melayu merupakan bahasa terbesar kedua di Mekkah setelah bahasa Arab.



"Pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir."

- Ki Hajar Dewantara -